

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2011.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Walikota Surabaya atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya.
- b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca dan LAK).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2011 ;
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Memuat informasi tentang: Ekonomi makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas pelaporan keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

BabVII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan

Perekonomian kota Surabaya pada tahun 2011 masih berbasis pada kelompok sektor tersier terutama sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Hal ini sesuai dengan kontribusi sektoral yang ditunjukkan pada tabel 1. Jumlah ketiga sektor tersebut pada tahun 2011 memberikan kontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surabaya secara berturut-turut sebesar 42.63% untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai PDRB ADHK sebesar Rp 40,25 triliun; sektor industri pengolahan dengan nilai PDRB ADHK sebesar Rp 20,19 triliun dengan kontribusi sebesar 21,37%; serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang berkontribusi 11,75% dengan nilai PDRB ADHK sebesar Rp 11,09 triliun. Adapun perkembangan kontribusi sembilan sektor ekonomi selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
KONTRIBUSI SEKTOR EKONOMI TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SURABAYA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2007-2011*
(dalam persen)

SEKTOR/SUB SEKTOR	2007	2008	2009	2010	2011*
1. PERTANIAN	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,008	0,01	0,01	0,01	0,01
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	23,69	23,15	22,61	21,89	21,37
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	2,41	2,36	2,39	2,37	2,36
5. KONSTRUKSI	7,06	6,88	6,74	6,71	6,69
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	40,52	41,57	41,62	42,16	42,63
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	10,88	10,74	11,24	11,48	11,75
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	6,56	6,48	6,55	6,54	6,53
9. JASA - JASA	8,75	8,71	8,75	8,76	8,58
TOTAL PDRB SURABAYA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS Kota Surabaya, Bappeko, 2011, diolah
Catatan : *) data sementara

Data yang disajikan pada tabel diatas semakin menguatkan posisi Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa. Hal ini dikarenakan jumlah kontribusi sektoral dari tiga sektor unggulan, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri

pengolahan; serta sektor pengangkutan dan komunikasi adalah 75,75% dari PDRB ADHK Kota Surabaya tahun 2011.

Nilai perdagangan ekspor non migas Kota Surabaya tahun 2011, mencapai US\$ 17,54 milyar. Nilai ekspor non migas tersebut meningkat sebesar 26,78% dari US\$ 13,84 milyar pada tahun 2010. Ditinjau berdasarkan negara tujuannya, ekspor terbesar ditujukan ke negara Jepang (US\$ 3,49 milyar); China (US\$2,22 milyar), Amerika Serikat (US\$ 1,53 milyar), Malaysia (US\$ 1,32 milyar) dan Thailand (US\$ 633,67 juta). Ekspor ke lima negara tersebut mencakup 52,47% dari total ekspor non migas di tahun 2011. Meningkatnya ekspor Surabaya ke negara-negara di kawasan Asia dikarenakan semakin terbukanya perdagangan internasional sesuai dengan perjanjian-perjanjian dagang yang telah disepakati sebelumnya, seperti *China-Asean Free Trade Area*. Statistik mengenai kondisi ekspor kota Surabaya tahun 2011 terlihat pada tabel 2.

Tabel 2
EKSPOR NON MIGAS KOTA SURABAYA
MENURUT NEGARA TUJUAN DAN KOMODITI KUMULATIF
TAHUN 2011*

No.	Ekspor		Kode HS 2 digit	Ekspor	
	Negara Tujuan	Nilai (Juta US\$)		Kelompok Barang	Nilai (Juta US\$)
1	Jepang	3.497,83	74	Tembaga dan Barang dari tembaga	2.668,91
2	China	2.219,96	29	Bahan Kimia Organik	2.374,36
3	Amerika Serikat	1.533,51	48	Kertas dan karton	1.094,99
4	Malaysia	1.318,86	40	Karet dan Barang dari karet	983,41
5	Thailand	633,67	44	Kayu dan Barang dari kayu	903,60
6	Singapura	582,34	03	Ikan dan Udang	789,34
7	Australia	560,96	15	Lemak dan Minyak hewan	779,37
8	Korea Selatan	380,55	71	Mutiara, Batu permata, Logam mulia & Perhiasan imitasi	578,39
9	Vietnam	342,62	94	Perabot & Penerangan rumah	543,06
10	Taiwan	257,69	38	Produk Kimia Lainnya	523,65
Jumlah 10 Negara di atas		11.327,99	Jumlah 10 Kelompok Komoditi di atas		11.239,09
Jumlah dari Negara Lainnya		6.213,19	Jumlah Komoditi Lainnya		6.302,09
Total Ekspor Non Migas		17.541,17	Total Ekspor Non Migas		17.541,17

Sumber data: Bank Indonesia, Bappeko, 2011, diolah

Catatan : *) data sementara

Sedangkan jika ditinjau berdasarkan kelompok barang, tiga komoditas ekspor unggulan kota Surabaya adalah Tembaga dan Barang dari tembaga; Bahan kimia organik; serta Kertas dan karton. Nilai ekspor Tembaga dan Barang dari tembaga pada tahun 2011 mencapai US\$ 2,67 milyar atau 15,22% dari total ekspor non migas.

Dalam usaha meningkatkan nilai ekspor kota Surabaya, maka kebijakan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2011 salah satunya adalah meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur untuk memperlancar transportasi barang ekspor dari kota Surabaya dan memberi kemudahan dalam proses perijinan.

Pada dasarnya, besaran ekspor dapat menggambarkan kinerja sektor perdagangan Kota Surabaya di pasar internasional. Semakin meningkat nilai ekspor dari tahun ke tahun, yang didukung dengan adanya peningkatan volume ekspor, maka posisi perdagangan suatu negara semakin kuat dalam pasar perdagangan internasional, atau dengan kata lain memiliki daya saing produk yang relatif cukup baik. Oleh karena itu, dalam usaha meningkatkan nilai ekspornya, maka salah satu kebijakan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2011 adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur untuk memperlancar transportasi barang ekspor dari Kota Surabaya dan memberi kemudahan dalam proses perijinan.

Peningkatan nilai ekspor Kota Surabaya ternyata juga diiringi dengan peningkatan nilai impornya. Pada tahun 2010 nilai impor Kota Surabaya sebesar US\$ 11,75 milyar dan meningkat cukup tinggi yaitu 35,89% menjadi US\$ 15,97 milyar di tahun 2011. Secara statistik, impor terbesar berasal dari dua negara yaitu China (US\$ 3,35 milyar); dan Amerika (US\$ 1,33 milyar). Sedangkan impor tiga kelompok komoditas tertinggi adalah mesin, pesawat mekanik; besi dan baja; dan gandum-gandum, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3
IMPOR NON MIGAS KOTA SURABAYA
MENURUT NEGARA ASAL DAN KOMODITI KUMULATIF TAHUN 2011*

No.	Impor		Kode HS 2 digit	Impor	
	Negara Asal	Nilai (Juta US\$)		Kelompok Barang	Nilai (Juta US\$)
1	China	3.351,19	84	Mesin, pesawat mekanik	1.709,01
2	Amerika Serikat	1.330,76	72	Besi dan Baja	1.538,22
3	Singapura	810,16	10	Gandum-gandum	1.362,51
4	Thailand	803,52	23	Ampas/sisa industri makanan	917,12
5	India	773,64	39	Plastik dan barang dari plastik	903,23
6	Australia	750,73	31	Pupuk	851,53
7	Jepang	705,09	29	Kimia Organik	597,43
8	Kanada	570,64	28	Kimia Anorganik	503,56
9	Malaysia	562,94	85	Mesin/Peralatan Listrik	500,91
10	Korea Selatan	533,04	76	Alumunium	496,70
Jumlah 10 Negara di atas		10.191,71	Jumlah 10 Kelompok Komoditi di atas		9.380,24
Jumlah dari Negara Lainnya		5.779,54	Jumlah Komoditi Lainnya		6.591,01

Total Impor Non Migas	15.971,25	Total Impor Non Migas	15.971,25
-----------------------	-----------	-----------------------	-----------

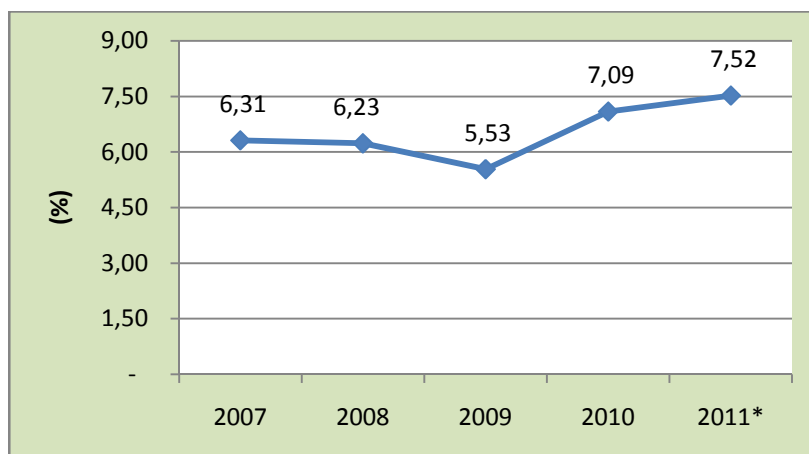
Sumber data: Bank Indonesia Kota Surabaya, 2011, diolah

Catatan : *) data sementara

b. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data BPS, tingkat pertumbuhan ekonomi Surabaya berada diatas 6% sejak tahun 2007, bahkan meningkat menjadi di atas 7% sejak tahun 2010. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi kota Surabaya sebesar 6,31% kemudian menurun di tahun 2008 dan 2009 masing-masing sebesar 6,23% dan 5,53%. Penurunan ini dikarenakan berkejolaknya perekonomian dunia akibat krisis keuangan (*global financial crises*) yang melanda beberapa negara di kawasan Amerika seperti masalah *Subprime Mortgage* dan masalah membengkaknya hutang di beberapa negara Eropa. Akan tetapi pada tahun 2010 pertumbuhannya meningkat menjadi 7,09% dan di tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 7,52%. Pertumbuhan yang pesat ini salah satunya disebabkan karena meningkatnya permintaan pasar ekspor dari Kota Surabaya seiring membaiknya perekonomian dunia pada tahun 2010. Perkembangan pertumbuhan ekonomi ini ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2007-2011*



Sumber data: BPS Kota Surabaya, Bappeko, 2011, diolah.

Catatan : *) data sementara

Pertumbuhan ekonomi kota Surabaya di tahun 2011 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur (7,22%) dan Nasional (6,46%). Hal ini menyebabkan jumlah PDRB ADHB kota Surabaya di tahun 2011 meningkat 14,67% dibanding tahun 2010 yang mencapai Rp 235,26 triliun. Demikian halnya dengan jumlah PDRB ADHK kota Surabaya 2011 yang juga meningkat menjadi Rp 94,44 triliun, lebih tinggi dari 2010 yang nilainya Rp 87,83 triliun. Dengan bertambahnya jumlah penduduk kota Surabaya tahun 2011 yang mencapai 3 juta jiwa maka nilai PDRB perkapitanya (berdasarkan nilai ADHB) menjadi sebesar Rp 77,78

juta. Data selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
PERBANDINGAN INDIKATOR EKONOMI
KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR DAN NASIONAL
TAHUN 2011*

	Surabaya	Jawa Timur	Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,52	7,22	6,46
PDB/PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	235,26	884,14	7.427,1
PDB/PDRB Atas Dasar Harga Konstan (triliun Rp)	94,44	366,98	2.463,2
PDB/PDRB Perkapita (Juta Rp)	77,78	23,46	30,8

Sumber data: BPS Povinsi Jawa Timur, Bappeko 2011, diolah.

Catatan : *) data sementara

Tingginya pertumbuhan ekonomi kota Surabaya dicapai karena hampir semua sektor ekonomi kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif. Satu-satunya sektor yang tumbuh negatif di tahun 2011 ini adalah sektor pertanian yaitu -5,97%. Semakin berkembangnya perekonomian di Kota Surabaya terutama di sektor perdagangan dan konstruksi, menyebabkan luas lahan pertanian di Kota Surabaya semakin menurun karena digunakan untuk pembangunan gedung pertokoan, tempat tinggal dan perkantoran. Akibatnya pertumbuhan sektor pertanian di Kota Surabaya semakin menurun hingga mencapai angka yang minus.

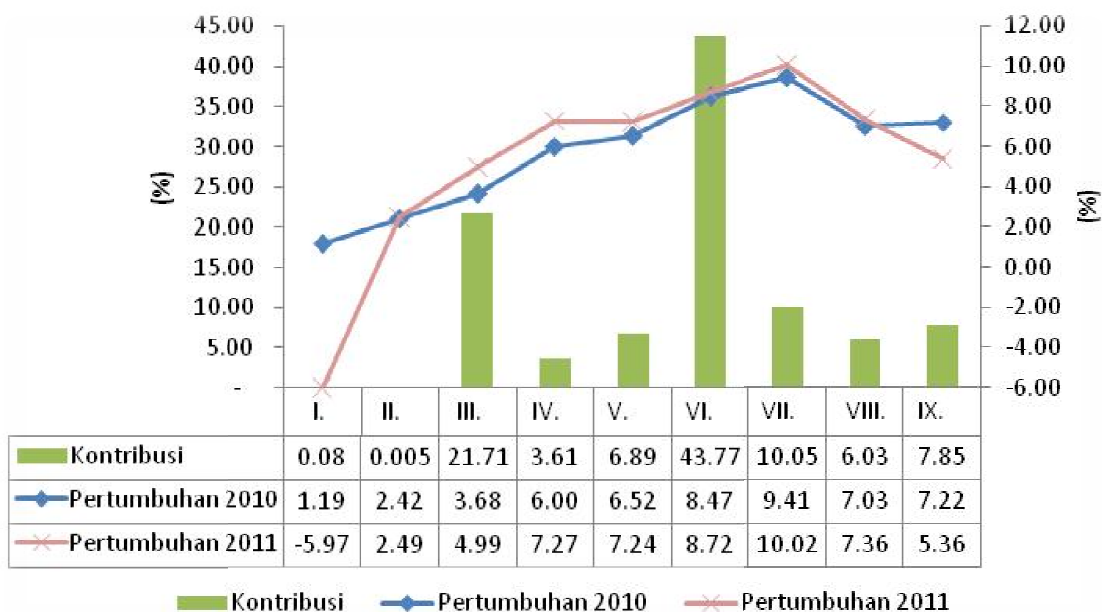
Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi yaitu 10,02%. Tingginya pertumbuhan pada sektor ini dikarenakan gabungan antara harga perangkat yang kian murah dan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, bisnis telekomunikasi tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir termasuk di Kota Surabaya. Kinerja perusahaan telekomunikasi terus tumbuh seiring pertumbuhan pelanggan dan layanan yang semakin beragam.

Sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua dan ketiga di tahun 2011 adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (8,72%) dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (7,36%). Terjaganya iklim usaha menyebabkan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor perdagangan, terbukti dengan semakin tumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan di kawasan Surabaya. Selain itu, aktivitas di sektor perbankan juga semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya perdagangan di Surabaya baik yang berskala besar maupun UMKM.

Ditinjau dari kontribusi sektoralnya, (i) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR), (ii) Sektor Industri Pengolahan dan (iii) Sektor Angkutan dan Komunikasi, adalah tiga sektor yang mendominasi pembentukan PDRB Kota Surabaya dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011, PDRB sektor Perdagangan, Hotel, dan

Restoran (PHR) sebesar Rp 102,97 triliun atau berkontribusi sebesar 43,77%. Sedangkan sektor Industri Pengolahan dan sektor Angkutan dan Komunikasi menghasilkan PDRB masing-masing sebesar Rp 51,06 triliun (21,71%) dan Rp 23,65 triliun (10,05%). Pembentukan PDRB pada ketiga sektor utama tersebut proporsi totalnya adalah 75,53% dari PDRB Kota Surabaya pada tahun 2011. Selanjutnya, pertumbuhan dan kontribusi sembilan sektor dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011



Sumber: BPS Kota Surabaya, diolah

Keterangan: I. Sektor Pertanian
 II. Sektor Pertambangan dan Penggalian
 III. Sektor Industri Pengolahan
 IV. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
 V. Sektor Konstruksi
 VI. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
 VII. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
 VIII. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
 IX. Sektor Jasa-Jasa

Kondisi perekonomian kota Surabaya tahun 2011 menunjukkan performa yang sangat baik, sesuai dengan kinerja perekonomian di tingkat Provinsi dan Nasional. Mengingat, periode 2010 dan 2011 merupakan masa pemulihan akibat terjadinya krisis keuangan (peningkatan hutang) yang melanda beberapa negara di kawasan Eropa pada tahun 2008 yang lalu. Terlebih karena Jawa Timur merupakan salah satu dari tiga provinsi penyumbang terbesar PDB Nasional, di mana kota Surabaya berkontribusi sebesar 26,6% terhadap PDRB ADHB Jawa Timur di tahun 2011.

Secara kumulatif, angka pertumbuhan kota Surabaya sejak triwulan I hingga IV (*year on year*) tahun 2011 selalu stabil di atas 7 persen. Pada triwulan I perekonomian Surabaya tumbuh sebesar 7,25% dan meningkat di triwulan II dan III dengan

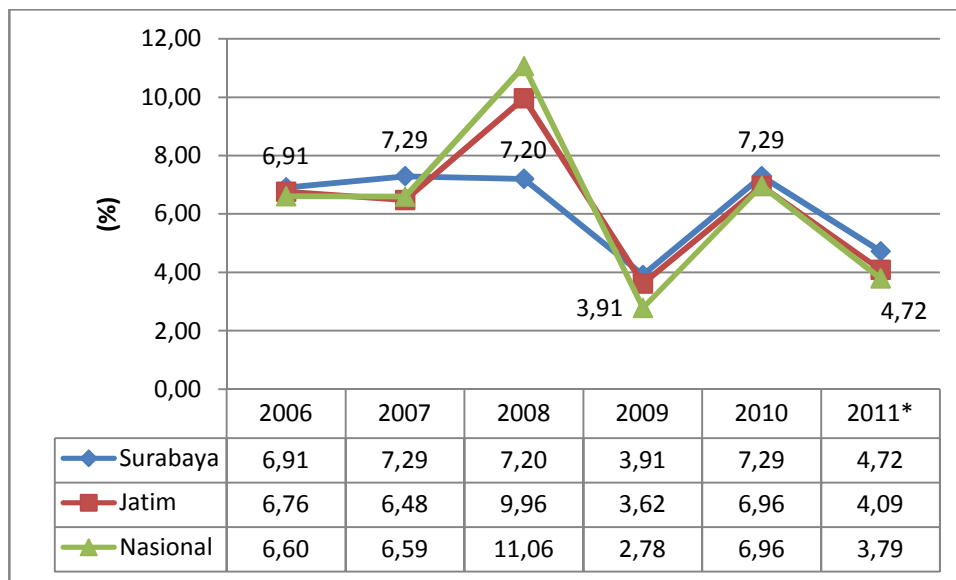
pertumbuhan masing-masing sebesar 7,71% dan 7,75%. Akan tetapi pada triwulan IV pertumbuhannya sedikit menurun menjadi 7,32% dikarenakan mulai terjadinya penurunan perdagangan ekspor ke luar negeri, khususnya dari kota Surabaya ke negara-negara Eropa dan Amerika yang sedang mengalami ketidakstabilan kondisi perekonomian dan keuangan. Namun secara umum, kinerja perekonomian kota Surabaya di tahun 2011 sedikit melebihi target pertumbuhan yang telah ditetapkan, yaitu dengan pencapaian sebesar 7,52%.

c. Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara relatif mengalami kenaikan harga dari tahun ke tahun. Bagi konsumen, inflasi menjadi hal yang memberatkan karena secara tidak langsung dapat mengurangi pendapatan riil atau daya beli mereka. Sedangkan dari sisi produsen, inflasi menjadi insentif untuk terus melakukan aktivitas ekonomi. Dalam perkembangannya inflasi Kota Surabaya cenderung lebih stabil dibandingkan dengan inflasi di tingkat provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Inflasi kota Surabaya tahun 2006 sebesar 6,71% menurun menjadi 6,27% (2007) kemudian meningkat di tahun 2008 menjadi 8,73% sebagai dampak dari perekonomian dunia yang memburuk akibat krisis keuangan global (*global financial crises*) yang melanda Amerika dan beberapa negara Eropa. Akan tetapi laju inflasi ini segera dikendalikan sehingga menurun menjadi 3,39% (2009). Namun, kondisi keuangan global kembali memburuk yang dipicu oleh krisis keuangan Yunani, dan kemudian menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di beberapa negara Eropa. Hal ini juga berdampak pada perekonomian nasional sehingga inflasi kota Surabaya kembali tinggi menjadi 7,33% di tahun 2010. Akan tetapi kondisi ini dapat dikendalikan pada 2011, di mana angka inflasinya hanya mencapai 4,72%.

Gambar 3. Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2006-2011*



Sumber data: BPS Provinsi Jatim, Bappeko, 2011, diolah.
Catatan : *) data sementara

2.2. Kebijakan Keuangan

a. Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan potensi permasalahan yang masih akan dihadapi pada Tahun 2011, maka sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya PAD dan penerimaan daerah lainnya, yang tercermin dari adanya peningkatan penerimaan PAD sebesar angka 101,87 % dari Rp.1.059.891.415.590,71 (2010). Secara keseluruhan Pendapatan Daerah untuk tahun anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp.4.009.233.952.845,07.

Terkait gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Belanja Daerah

- Pada sisi belanja daerah, Dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program RPJM Daerah sebesar Rp.5.195.102.211.727,00 dialokasikan untuk belanja non program sebesar Rp.2.045.601.849.433,00.
- Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar

bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan–komunikasi dan sektor jasa-jasa, serta sektor konstruksi.

- Di samping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD tahun 2011.

c. Pembiayaan

- Pada sisi pembiayaan daerah yang direncanakan Pemerintah Kota dalam penerimaan sebesar Rp.1.234.413.607.402,00 dan pengeluaran sebesar Rp.11.000.000.000,00.
- Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Selanjutnya dari sisi pengeluaran pembiayaan, harus dapat memenuhi kewajiban angsuran utang pokok serta penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2011 direncanakan sebesar Rp.5.195.102.211.727,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.021.569.335.413,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp3.173.532.876.314,00. Sedangkan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2010 direncanakan sebesar Rp 4.362.711.850.643,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.701.814.805.524,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.660.897.045.121,00.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2011 direncanakan sebesar Rp.3.971.688.604.325,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.139.625.575.460,00 Pendapatan transfer sebesar Rp.973.067.060.126,00, Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp.858.995.968.739,00. Sedangkan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2010 direncanakan sebesar Rp.3.271.421.232.776,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.059.891.415.591,00 Pendapatan transfer sebesar Rp.1.593.973.028.456,00, Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp.617.556.788.729,00.

Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2011 adalah sebesar Rp.3.759.034.427.310,72 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.886.514.301.580,723; Pendapatan transfer sebesar Rp.963.419.947.354,00, Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.908.375.178.376,00. Sedangkan Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp.3.044.124.791.757,37 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.908.647.775.730,37; Pendapatan transfer sebesar Rp.1.445.514.314.692,00, Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.689.962.701.335,00.

Berikut ini ringkasan rencana dan realisasi anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2011 dan 2010 :

Tahun 2011

KODE KEG.	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,677,609,539.00	3,429,059,091.00	60.40
1 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,750,144,716.00	2,449,983,636.00	65.33
1 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	9,205,655,013.00	6,093,326,734.00	66.19
1 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	466,945,935,836.00	314,931,064,285.00	67.02
1 01 17	Program Pendidikan Menengah	171,194,116,308.00	142,042,266,274.00	82.97
1 01 18	Program Pendidikan Non Formal	10,625,500,287.00	8,964,551,598.00	84.37
1 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	44,364,849,352.00	35,679,508,470.00	80.42
1 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,052,232,060.00	69,150,574,785.00	81.37
1 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	27,833,616,383.00	17,876,550,198.00	75.28
1 02 06	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	113,096,065,667.00	147,193,326,100.00	83.35

1 02 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu	58,023,153,596.00	40,665,934,207.00	71.27
1 02 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa	122,273,743,116.00	33,140,958,508.00	45.47
1 02 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Anak	39,298,079,405.00	37,383,227,072.00	95.13
1 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12,378,394,834.00	6,986,731,143.00	56.44
1 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,730,812,706.00	3,192,149,242.00	67.48
1 03 28	Program pengendalian banjir	241,763,252,366.00	94,370,742,454.00	39.03
1 03 31	Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkota	1,319,699,286.00	521,494,946.00	39.52
1 03 32	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	365,344,426,282.00	152,550,801,866.00	41.41
1 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,262,909,159.00	2,466,345,733.00	75.59
1 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19,512,367,699.00	2,754,687,282.00	14.12
1 04 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	26,652,007,456.00	16,759,833,027.00	62.88
1 04 22	Program Utilitas Perkotaan	92,831,550,075.00	82,161,081,765.00	88.51
1 04 23	Program Perumahan dan Permukiman	111,708,217,510.00	49,354,401,333.00	44.18
1 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,384,182,160.00	1,556,778,964.00	65.30
1 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68,897,438,465.00	32,712,919,091.00	47.48
1 05 18	Program Penataan Ruang	18,193,689,671.00	12,584,113,329.00	69.17
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,230,760,646.00	1,831,626,074.00	56.69
1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	784,774,190.00	477,139,350.00	60.80
1 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah	23,711,512,709.00	15,745,003,997.00	66.40
1 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,656,642,896.00	5,315,449,171.00	93.97
1 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,062,975,752.00	1,453,627,184.00	70.46
1 07 21	Program Pengembangan Sistem Transportasi	77,836,750,350.00	59,124,554,948.00	75.96
1 08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,819,437,677.00	4,769,176,764.00	81.95
1 08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	774,583,946.00	712,948,284.00	92.04
1 08 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	11,232,914,272.00	9,435,495,698.00	84.00
1 08 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	66,163,489,250.00	33,259,118,114.00	50.27
1 08 25	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	113,332,094,538.00	95,829,923,820.00	84.56
1 09 19	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	6,350,895,301.00	2,791,709,360.00	43.96
1 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,652,451,967.00	2,166,616,171.00	59.32

1 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,264,291,304.00	1,379,514,191.00	60.92
1 10 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	13,953,378,922.00	7,190,712,672.00	51.53
1 11 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	4,443,412,775.00	3,858,672,263.00	86.84
1 11 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1,533,052,219.00	1,149,513,950.00	74.98
1 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,456,933,251.00	2,152,244,331.00	87.60
1 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,222,751,480.00	1,097,423,400.00	89.75
1 12 15	Program Keluarga Berencana	3,646,963,152.00	2,850,433,463.00	78.16
1 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	905,425,962.00	793,889,418.00	87.68
1 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	925,439,713.00	835,618,815.00	90.29
1 13 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	16,821,695,528.00	15,660,391,283.00	85.47
1 13 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2,152,264,751.00	1,768,831,480.00	82.18
1 14 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,006,622,764.00	627,282,395.00	62.32
1 14 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	836,329,766.00	672,802,408.00	80.45
1 14 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	16,701,530,893.00	11,939,114,925.00	71.49
1 14 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2,562,518,854.00	2,165,730,480.00	84.52
1 15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	819,515,594.00	658,428,795.00	80.34
1 15 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	525,676,648.00	492,185,267.00	93.63
1 15 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil dan Menengah	30,853,627,159.00	17,764,050,866.00	57.58
1 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3,943,192,324.00	3,187,728,260.00	80.84
1 16 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,256,095,926.00	874,934,216.00	69.66
1 16 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	494,922,112.00	427,954,800.00	86.47
1 16 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Inves	4,684,084,960.00	3,486,512,150.00	74.43
1 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,680,347,510.00	3,927,012,083.00	83.90
1 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	421,127,177.00	386,626,579.00	91.81
1 17 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2,308,656,806.00	2,049,969,150.00	88.79
1 18 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,942,989,527.00	2,871,545,895.00	48.32
1 18 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,316,251,513.00	1,741,517,100.00	40.35
1 18 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	3,379,569,088.00	3,000,138,970.00	88.77

1 18 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	53,394,612,229.00	34,281,742,215.00	64.20
1 19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,895,893,089.00	2,310,580,181.00	79.79
1 19 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,937,123,759.00	1,737,907,940.00	89.72
1 19 16	Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan Kriminal	31,918,041,863.00	25,440,816,938.00	79.71
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	73,297,167,278.00	59,763,405,585.00	81.54
1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60,264,738,384.00	41,779,072,771.00	69.33
1 20 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	59,992,337,733.00	33,047,947,527.00	55.09
1 20 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan daerah	79,808,837,268.00	46,062,821,189.00	57.72
1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	6,821,450,141.00	5,706,505,170.00	83.66
1 20 24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1,511,979,829.00	1,086,889,230.00	71.89
1 20 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	4,237,538,645.00	3,047,033,425.00	71.91
1 20 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,017,581,692.00	3,075,528,409.00	61.30
1 20 29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	14,494,305,589.00	10,690,683,479.00	73.76
1 20 31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	21,303,731,234.00	11,358,002,331.00	53.31
1 20 32	Program Penataan Daerah Otonom	43,268,592,999.00	29,478,291,969.00	68.13
1 21 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	491,354,123.00	403,833,685.00	82.19
1 21 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	183,068,055.00	154,808,797.00	84.56
1 21 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	7,251,365,011.00	6,255,425,653.00	86.27
1 22 20	Program Penanggulangan Kemiskinan	16,863,556,551.00	10,898,580,350.00	64.63
1 24 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	2,394,685,731.00	2,007,098,665.00	83.81
1 25 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,530,234,754.00	967,235,834.00	63.21
1 25 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	712,941,970.00	605,444,480.00	84.92
1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7,703,393,254.00	6,606,964,479.00	85.77
1 25 19	Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	26,966,931,585.00	22,895,084,601.00	84.90
1 26 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,064,861,340.00	1,005,770,276.00	94.45
1 26 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	354,083,764.00	334,557,915.00	94.49

1 26 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	10,567,928,898.00	9,641,185,855.00	91.23
2 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,417,397,144.00	1,168,010,783.00	82.41
2 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	681,093,066.00	611,148,827.00	89.73
2 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	9,655,828,936.00	4,771,539,417.00	49.42
2 04 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	10,643,913,040.00	9,227,646,848.00	86.69
2 04 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1,001,326,522.00	827,267,123.00	82.62
2 05 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	10,944,322,249.00	4,474,407,480.00	40.88
2 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,698,680,905.00	1,253,546,038.00	73.80
2 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1,408,102,539.00	1,169,704,410.00	83.07
2 06 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	1,093,627,617.00	899,851,022.00	82.28
2 06 19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	13,752,647,409.00	6,100,374,747.00	44.36
JUMLAH TOTAL		3,173,532,876,314.00	2,046,042,295,317.00	64.2

Tahun 2010

Program RPJM Daerah		Sasaran Program Tahun 2010		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Keterkaitan dengan Penyelenggaraan
Kode Program	Uraian	3	4	5	6	7	8
1.	Program perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	1.1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan	25.299.211.185	19.018.301.342	75,00	Perencanaan Pembangunan
2.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	2.1.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah	11.073.879.234	9.306.009.573	84,00	- Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian. - Lingkungan Hidup
3.	Program Peningkatan Kinerja Legislatif	3.1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja legislatif	60.550.601.187	37.690.018.386	62,25	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian.
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	4.1	Meningkatnya pelayanan perijinan secara mudah, cepat, dekat dan berkapasitas baik dalam hal biaya maupun sistem dan prosedur	7.490.312.994	6.341.977.155	44,62	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian.
5.	Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.1.	Meningkatnya pelayanan perijinan secara mudah, cepat, dekat dan berkapasitas baik dalam hal biaya maupun sistem dan prosedur	13.716.741.241	9.134.871.488	66,60	Kependudukan dan Catatan Sipil Ketransmigrasian

6.	Program Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur	6.1.	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	14.284.070.944	12.148.737.606	85,05	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian.
							Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pemerintah/Gedung Negara	7.1.	Meningkatnya ketersediaan sarana penyelenggaraan pemerintahan	26.061.763.465	20.547.561.054	78,84	Pekerjaan Umum
							Perencanaan Pembangunan
8.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	8.1.	Meningkatnya sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik	9.353.713.585	7.624.833.584	81,52	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian.
							Komunikasi dan Informatika
9	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	9.1.	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan	136.077.961.052	115.937.684.747	85,20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian.
							Kearsipan
10.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	10.1.	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	33.539.037.505	28.979.383.356	86,40	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
							Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
11.	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	11.1.	Meningkatnya PAD dan penerimaan daerah lainnya	59.210.675.406	40.024.070.707	67,60	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
12.	Program Penataan Ruang	12.1.	Terususnya RTRK yang aplikatif dan berwawasan lingkungan serta terlaksananya pengendalian pembangunan secara terpadu dan intensif	13.077.844.386	9.327.546.753	71,32	Penataan Ruang
							Perumahan
13.	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	13.1.	Meningkatnya kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan	395.798.723.343	316.755.176.178	80,03	Pekerjaan Umum
14.	Program Pengelolaan Utilitas Perkotaan	14.1.	Perluasan jaringan dan pemasangan PJU	93.967.981.436	82.245.303.952	87,52	Pekerjaan Umum
15.	Program Pengembangan Transportasi	15.1.	Meningkatnya prasarana pendukung dan manajemen transportasi	60.883.252.367	43.759.924.676	71,88	Perhubungan
16.	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	16.1.	Tersedianya pusat data dan informasi dalam sistem jaringan berbasis TI yang terintegrasi	17.121.197.544	15.843.403.494	92,54	Koperasi dan Informatika
17.	Program Pengembangan Koperasi, UMKM, dan Investasi	17.1.	Meningkatnya investasi, kemandirian UMKM dan Koperasi	28.195.872.622	21.703.998.390	76,98	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
							Penanaman Modal
							Perdagangan

18.	Program Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan	18.1.	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	12.844.901.888	10.011.727.508	77,94	Ketenaga Kerjaan
19.	Program Pengembangan Kelautan, Perikanan dan Pertanian	19.1.	Meningkatnya produktivitas hasil perikanan, kelautan, peternakan, pertanian dan ketersediaan pangan	30.515.633.313	21.960.753.435	71,97	Ketahanan Pangan
							Pertanian
							Kelautan dan Perikanan
20	Program Penanggulangan Masalah Sosial	20.1.	Meningkatnya pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	19.868.481.361	16.590.884.524	83,50	Sosial
21	Program Penanggulangan Kemiskinan	21.1.	Meningkatnya penanganan keluarga miskin kota	100.010.048.864	90.911.522.921	90,90	Kesehatan
							Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
							Ketahanan Pangan
							Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.	Program Penataan dan atau Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	22.1.	Meningkatnya PKL yang dibina	5.156.503.861	4.337.652.384	84,12	Perdagangan
23.	Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup	23.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan kota	14.794.851.912	11.855.454.317	80,13	Lingkungan Hidup
24.	Program Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan Kota	24.1.	Meningkatnya ruang terbuka hijau kota	58.200.507.958	48.329.501.541	83,04	Lingkungan Hidup
							Kehutanan
25.	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	25.1.	Menurunnya ancaman bahaya banjir	273.817.714.558	233.416.836.259	85,25	Pekerjaan Umum
26.	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	26.1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah dan sumber sampah serta peningkatan kapasitas TPA	109.042.148.820	88.605.091.690	81,26	Lingkungan Hidup
27.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	27.1.	Penanganan Kebakaran	28.474.896.920	25.911.442.797	91,00	Perumahan
28.	Program Perumahan dan Permukiman	28.1.	Meningkatnya kualitas permukiman	23.884.016.894	12.277.120.782	51,40	Perumahan
							Penataan Ruang
29.	Program Penyelenggaraan Pendidikan	29.1.	Meningkatnya pencapaian SPM	612.093.107.861	484.172.236.421	79,10	Pendidikan dan Perpustakaan Perhubungan
							Perpustakaan
							Meningkatnya pemerataan pada semua jenjang
30.	Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga	30.1.	Meningkatnya peran generasi muda	148.547.290.270	114.789.338.018	77,27	Pemuda dan Olah Raga
		30.2.	Meningkatnya prestasi olah raga				
31.	Program Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	31.1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	197.845.045.255	174.514.513.107	88,21	Kesehatan.
							Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
32.	Program Peningkatan Kepariwisata dan Kebudayaan	32.2	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya lokal serta kunjungan wisata	13.994.359.946	12.819.258.475	91,60	Kebudayaan
							Pariwisata

33.	Program Fasilitasi Pemantapan Multikultur	33.1.	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan forum antar kelompok masyarakat	1.815.679.287	1.523.727.483	83,92	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
34.	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	34.1.	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	4.289.016.659	3.728.025.910	86,92	Pemberdayaan Perempuan
35.	Program Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	35.1	Meningkatnya peran perempuan	1.701.814.805.524	1.484.996.588.655	87,26	
J U M L A H				4.362.711.850.647	3.637.069.260.868	83,38	

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pada Tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya telah menganut anggaran defisit.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2011 sebesar Rp.3.971.688.604.325,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.139.625.575.460,07, Dana Perimbangan sebesar Rp.973.067.060.126,00, Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp.490.013.627.911,00, Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.356.905.561.800,00, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya Rp.15.397.200.000,00, Bagi Hasil Lainnya Propinsi sebesar sebesar Rp.2.679.579.028,00. Sedangkan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2010 sebesar Rp.3.271.421.232.775,71 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.059.891.415.590,71, Dana Perimbangan sebesar Rp.1.593.973.028.456,00, Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp.353.546.195.901,00, Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.207.386.261.800,00, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya Rp.33.862.600.000,00, Bagi Hasil Lainnya Propinsi sebesar Rp.2.679.579.028,00, Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.20.082.152.000,00.

Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2011 adalah sebesar Rp.3.759.034.427.310,72 (tercapai 94,65%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.886.514.301.580,72 (tercapai 88,17%), Dana Perimbangan sebesar Rp.963.419.947.354,00 (tercapai 99,01%), Pendapatan Hibah sebesar Rp.600.000.000,00, Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp.509.508.087.368,00 (tercapai 103,98%), Penyesuaian dan otonomi khusus

sebesar Rp.386.951.310.320,00 (tercapai 100%), Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.10.364.000.000,00 (tercapai 61,34%), dan Bagi Hasil Lainnya Propinsi sebesar Rp.1.551.780.688,00 (tercapai 57,91%), , Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.125.000.000,00. Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp.3.044.124.791.757,37 (tercapai 93,05%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.908.647.775.730,37 (tercapai 85,73%), Dana Perimbangan sebesar Rp.1.445.514.314.692,00 (tercapai 90,69%), Penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp.203.857.336.800,00 (tercapai 98,30%), Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp.441.429.059.739,00 (tercapai 124,86%), Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.22.073.350.000,00 dan Bagi Hasil Lainnya Propinsi sebesar Rp.2.520.802.796,00, Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.20.082.152.000,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2011 dan 2010 sebesar Rp.5.195.102.211.727,00 dan Rp.4.362.711.850.644,86. Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp.3.753.710.413.890,80 dan Rp.3.637.069.260.868,48 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.1.707.668.118.574,00 dan Rp.1.484.925.370.855,00, belanja langsung/program sebesar Rp.2.046.042.295.316,80 dan Rp.2.152.143.890.013,48.

Realisasi penerimaan pendapatan pada tahun 2011 sebesar Rp.3.759.034.427.310,72 bila dibandingkan dengan pengeluaran belanja sebesar Rp.3.753.710.413.890,80 maka terjadi surplus sebesar Rp.5.324.013.419,92. Sedangkan penerimaan pembiayaan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.508.635.998.157,35 dan pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebesar Rp.10.960.748.326,00. Sedangkan realisasi penerimaan pendapatan pada tahun 2010 sebesar Rp.3.044.124.791.757,37 bila dibandingkan dengan pengeluaran belanja sebesar Rp.3.637.069.260.868,48 maka terjadi defisit sebesar Rp.592.944.469.111,11. Sedangkan penerimaan pembiayaan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.1.119.777.838.062,39 dan pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebesar Rp.20.961.324.731,00 dan secara rinci realisasi APBD kota Surabaya Tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2010

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	908.647.775.730,37	
b. Dana Perimbangan	1.445.514.314.692,00	
c. Hibah	0,00	
d. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	441.429.059.739,00	
e. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	203.857.336.800,00	
f. Bantuan Keuangan dari Propinsi	22.073.350.000,00	
g. Bagi Hasil Lainnya Propinsi	2.520.802.796,00	
h. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.082.152.000,00	
Jumlah Pendapatan		3.044.124.791.757,37
2. Belanja Daerah		
Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai	1.164.775.473.851,00	
b. Belanja Bunga	3.620.536.118,00	
c. Belanja Hibah	314.281.597.886,00	
d. Belanja Bantuan Sosial	701.000.000,00	
e. Belanja Bagi Hasil & Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
f. Belanja Bantuan Keuangan	1.044.213.000,00	
f. Belanja Tidak Terduga	502.550.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		1.484.925.370.855,00
Belanja Langsung/Program		
a. Belanja Pegawai	268.247.257.429,00	
b. Belanja Barang dan Jasa	848.903.215.231,67	
c. Belanja Modal	1.034.993.417.352,81	
Jumlah Belanja Langsung/Program		2.152.143.890.013,48
Jumlah Belanja Daerah		3.637.069.260.868,48
Surplus/Defisit		(592.944.469.111,11)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	1.119.777.838.062,39	
b. Pengeluaran	20.961.324.731,00	
Jumlah Pembiayaan		1.098.816.513.331,39
SILPA Tahun 2010		505.872.044.220,28

Tabel 3.1.2
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2011

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	1.886.514.301.580,72	
b. Dana Perimbangan	963.419.947.354,00	
c. Hibah	600.000.000,00	
d. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	509.508.087.368,00	
e. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	386.951.310.320,00	
f. Bantuan Keuangan dari Propinsi	10.364.000.000,00	
g. Bagi Hasil Lainnya Propinsi	1.551.780.688,00	
h. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	125.000.000,00	
Jumlah Pendapatan		3.759.034.427.310,72
2. Belanja Daerah		
Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai	1.377.173.082.114,00	
b. Belanja Bunga	2.903.307.374,00	
c. Belanja Hibah	325.744.017.586,00	
d. Belanja Bantuan Sosial	1.046.730.000,00	
e. Belanja Bagi Hasil & Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	644.213.000,00	
f. Belanja Tidak Terduga	156.768.500,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		1.707.668.118.574,00
Belanja Langsung/Program		
a. Belanja Pegawai	337.939.443.824,00	
b. Belanja Barang dan Jasa	1.164.991.205.503,80	
c. Belanja Modal	543.111.645.989,00	
Jumlah Belanja Langsung/Program		2.046.042.295.316,80
Jumlah Belanja Daerah		3.753.710.413.890,80
Surplus/Defisit		5.324.013.419,92
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	508.635.998.157,35	
b. Pengeluaran	10.960.748.326,00	
Jumlah Pembiayaan		497.675.249.831,35
SILPA Tahun 2011		502.999.263.251,27

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 2011, diolah

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah dipengaruhi masalah internal maupun eksternal.

Permasalahan internal antara lain : kurangnya SDM, sarana prasarana, kurangnya pengawasan, serta sanksi yang kurang tegas terhadap wajib pajak atau retribusi yang tidak membayar ataupun terlambat membayar. Sedangkan masalah eksternal antara lain adanya pembebasan retribusi, class action, kecenderungan masyarakat menunda pembayaran.

Berikut ini permasalahan-permasalahan secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Retribusi atas Pemakaian Tanah (penggunaan brandgang) mulai tahun 2011 tidak dipungut retribusi sesuai Perda no 13 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sedangkan Alat berat yang dimiliki Dinas PU Bina Marga dan Pematuan hanya digunakan untuk kepentingan dinas dan tidak disewakan kepada pihak ketiga karena kondisi alat yang sudah relatif tua.
2. Kurangnya kesadaran wajib retribusi terhadap pentingnya pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh petugas Dinas Kebakaran dan minimnya kesadaran untuk membayar retribusinya.
3. Kurangnya SDM, sehingga mempengaruhi capaian pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran. Hal ini berpengaruh pada pencapaian target retribusi.
4. Terdapat perusahaan yang alih fungsi, pindah ke daerah lain dan ada juga yang tutup.
5. Kawasan terbangun kota telah mencapai lebih dari 70% dari luas wilayah kota sehingga sangat mempengaruhi jumlah perolehan retribusi cetak peta.
6. Semakin terbatasnya lahan kosong yang dapat direncanakan untuk pemanfaatan pembangunan.
7. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar IMB sesuai luas bangunan yang sebenarnya.

8. Bangunan yang luasnya lebih dari 2500 m² terdapat pengawasan/supervisi konstruksi untuk mendapatkan ijin IMB. Setelah dinyatakan layak baru IMB diterbitkan. Hal ini memperlambat pembayaran IMB oleh wajib retribusi
9. Adanya kebijakan pengembalian fungsi jalan, terdapat beberapa titik yang tidak diperbolehkan untuk parkir sehingga potensi parkir tepi jalan umum berkurang.
10. Belum semua potensi tempat khusus parkir tergali secara optimal
11. Taksi banyak yang bangkrut, berhenti beroperasi dan berganti plat hitam.
12. Banyak kegiatan usaha yang sudah operasional namun fungsi bangunan dalam IMB tidak sesuai dengan pemanfaatan, sehingga Ijin Gangguan tidak dapat diproses.
13. Masih banyak tempat usaha yang tidak memenuhi persyaratan untuk diproses ijinnya.
14. Terdapat pemohon yang menunda pembayaran retribusi ijin gangguan.
15. Penetapan tarif yang digunakan oleh PDAM mengacu pada lebar jalan, sedangkan dalam penetapan tarif retribusi kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan selain mengacu pada lebar jalan juga mempertimbangkan kondisi ekonomi. Hal ini mengakibatkan perolehan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan lebih kecil dari potensi yang ada.
16. Kurang optimalnya penarikan retribusi non pelanggan PDAM oleh kelurahan.
17. Banyak badan usaha penyedotan kakus dari luar kota Surabaya yang beroperasi di Surabaya
18. Adanya Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil mulai berlaku tanggal 23 Maret 2011 banyak menghapus retribusi kependudukan sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat yang optimal, yang semula terdiri 23 komponen retribusi menjadi 10 komponen. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya capaian PAD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

19. Gedung kesenian (gedung baru) ex gedung mitra belum dapat dioperasikan
20. Kegiatan renovasi di gedung Balai Pemuda yang meliputi perbaikan plafon, pengecatan, pemolesan lantai dan pembuatan gorong-gorong yang berdampak pada jumlah penyewa gedung/lahan
21. Terjadinya musibah kebakaran di gedung Balai Pemuda Barat pada tgl 20 September 2011.
22. Gedung THR kurang strategis untuk penyelenggaraan acara sehingga sepi penyewa
23. Pendapatan sewa Gelora 10 Nopember diterima Pemkot setelah pemakaian gelora. Hal ini dikarenakan pemakai gelora membayar uang sewa setelah event selesai dilaksanakan.
24. Tarif pemasangan iklan pada saat berlangsung event olahraga masih perlu ditinjau kembali karena tarifnya relatif murah.
25. Sarana dan prasarana berupa ruas jalan akses menuju stadion Bung Tomo perlu diperlebar dan diperbaiki.
26. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, adanya perubahan sistim dari taksasi menjadi MPS yang mengakibatkan pembayaran pajak mundur satu bulan (pembayaran dilakukan tanggal 7 bulan berikutnya).
27. Minimnya pemeriksa pajak dibanding dengan jumlah wajib pajak MPS.
28. Masih adanya Wajib Pajak yang menunda pembayaran
29. Kurang terbukanya Wajib Pajak dalam memberikan data riil untuk pemeriksaan pajak
30. Kurang optimalnya pengawasan dilapangan
31. Banyaknya tempat hiburan yang ditutup/ditertibkan karena tidak sesuai/tidak memiliki izin
32. Masih adanya penyelenggaraan parkir yang menjual karcis tanpa porporasi

33. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak
34. Banyak Wajib Pajak yang meminta pembebasan denda atau pengurangan atas pembayaran tunggakan
35. Masih banyaknya jual beli yang dilakukan dibawah tangan
36. Permasalahan pada BPHTB dan PBB :
 - a. Banyaknya NOP yang double (pecahan-induk-pecahan)
 - b. Banyaknya Tanah Pemkot / Fasum diterbitkan NOP
 - c. Banyak Pemilik yang tidak berada di objek pajak dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.
 - d. Banyak Tanah sengketa (ahli waris, pemkot dengan pihak ke tiga, pengembang, tanah yang dimanfaatkan oleh orang lain/pendatang dll).
 - e. SPPT PBB yang diterbitkan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan (Nama/Alamat/Luasan/Tingginya NJOP)
 - f. Banyaknya yang mengajukan pengurangan dan penghapusan denda pada tahun berjalan (Veteran, Pensiunan, Masyarakat Ekonomi Rendah).
 - g. Banyaknya mutasi nama atas nama tanah PJKa dan mutasi tanah petok D, leter C tanah Negara.
 - h. Tanah Aset Pemkot yang belum terdaftar di IPT (Dinas Tanah).
 - i. Banyak tambak dari petani yang dibeli oleh Pengembang/Pengusahaan tambak yang SPPT tidak dirubah nama wajib pajaknya.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Penggalan potensi baru PAD dilakukan lebih agresif untuk meningkatkan capaian pendapatan di masa yang akan datang. Karena terdapat beberapa peraturan yang menghapus pemungutan retribusi, sehingga mengurangi potensi retribusi yang selama ini dipungut.

2. Penerapan pelayanan prima untuk meningkatkan interest masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah
3. Pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi perlu ditingkatkan untuk pencapaian yang lebih optimal.
4. Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar peraturan, meliputi pengenaan denda pada wajib pajak atau retribusi yang tidak dan atau terlambat membayar kewajibannya.
5. Perlu adanya transparansi ke masyarakat dalam pemungutan pajak dan retribusi untuk mempermudah proses perijinan sehingga dapat dihindari birokrasi yang panjang atau pungli yang dilakukan oleh oknum petugas.
6. Pemberian sanksi yang tegas kepada petugas yang terlibat secara teknis dalam pemungutan pajak maupun retribusi jika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Adapun permasalahan umum Belanja Daerah yang dihadapi pada Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat rencana PAK yang tidak jadi dilaksanakan
2. Terdapat sisa mati lelang
3. Pengadaan pengadaan sarana pembelajaran pendidikan dasar (multimedia) SD hanya terealisasi untuk 75 SD dari rencana 118 SD
4. Untuk transport guru tidak tetap yang mengajar di sekolah negeri tidak lagi berhak menerima uang transport dari sekolah swasta.
5. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang dibiayai DAK alokasi tahun 2011 masih belum dapat dilaksanakan. Sedangkan alokasi Dana Alokasi Khusus tahun 2010 saat ini sebagian telah dilaksanakan.
6. Gagal lelang untuk pengadaan alat medis (yang direncanakan untuk kamar operasi, ICU)

7. Pengadaan alat low temperature sterilizer tidak dapat direalisasikan karena tidak dapat mencantumkan register depkes yang masih berlaku dan penyedia tidak dapat menyampaikan dukungan dari distributor resmi dan tidak terdapat jaminan purna jual.
8. Masih banyak jenis pelayanan di rumah sakit Bhakti Dharma Husada yang belum beroperasi sehingga kunjungan pasien tidak optimal. Pelayanan yang belum beroperasi antara lain : ICU, IBS, Kamar operasi, Rawat inap VIP.
9. Terdapat perubahan tarif untuk pelayanan kesehatan keluarga miskin menjadi INAZBG.
10. Terdapat peralihan pasien SKTM menjadi pasien JAMPERSAL
11. Terdapat pekerjaan yang batal dilakukan karena terdapat permasalahan dengan warga
12. Pekerjaan yang didanai dari DPPID tidak dapat dilaksanakan semua karena berkaitan dengan persediaan aspal yang terbatas.
13. Terdapat pekerjaan yang batal karena berkaitan dengan persyaratan administratif kegiatan multiyears.
14. Kegiatan DAK tidak dapat dilaksanakan, karena tidak sesuai dengan kondisi di Surabaya
15. Terdapat permasalahan dengan warga untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan dasar sembilan tahun.
16. Pembangunan gedung Mitra dan RSUD Soewandhie tidak bisa dilaksanakan karena ada masalah prosedur administratif.
17. Resiko manajemen PDAM belum bisa dilaporkan terkait UU No. 28/2009 tentang Pajak/Retribusi Daerah
18. Terdapat sentra PKL yang batal dilaksanakan dikarenakan lokasi dan penolakan warga

19. Pada kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak air bawah tanah, saat ini masih dalam tahap pengembangan dan penggalian potensi serta pendataan masih terus dilaksanakan.
20. Terdapat pengurangan anggaran pada saat PAK tetapi pelaksanaan PAK tidak terlaksana sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap secara optimal
21. Pengadaan Bintek dan implementasi peraturan menyesuaikan dengan peraturan yang terbit.
22. Dilakukan efisiensi penggunaan anggaran disesuaikan dengan skala prioritas.
23. Terdapat pekerjaan yang gagal lelang (pengadaan printer dan firewall)

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Di Pemerintah Kota Surabaya entitas pelaporan dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Surabaya menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk Neraca yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

❖ Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

❖ Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa Uang Persediaan, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/Nihil.

❖ Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

❖ **Transaksi dalam mata uang asing**

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

❖ **Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.

Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang.

Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

Kas terdiri atas Kas di Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan. Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

❖ **Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah

- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)

❖ **Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang antara lain terdiri dari :

- a. Piutang Pajak
- b. Piutang Retribusi
- c. Piutang Dana Bagi Hasil
- d. Piutang Dana Alokasi Umum
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

❖ **Piutang Lain-Lain**

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.

Piutang Lain-Lain terdiri dari :

- a. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran
- b. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah
- c. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
- d. Piutang Dividen
- e. Piutang Bagi Hasil Laba usaha Perusahaan Daerah
- f. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

❖ **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname).

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri
- Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Persediaan antara lain terdiri dari :

- a. persediaan alat tulis kantor
- b. persediaan alat listrik
- c. persediaan material/bahan
- d. persediaan benda pos
- e. persediaan bahan bakar
- f. persediaan bahan makanan pokok

❖ **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
- nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

a. metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20%.

b. metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah , misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%.

c. metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Investasi Jangka panjang terdiri dari:

a. Investasi Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Terdiri dari : penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara serta investasi permanen lainnya.

b. Investasi Non Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Terdiri dari : pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, investasi non permanen lainnya.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.

❖ **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Selain itu juga mempunyai nilai yang material sesuai nilai minimum kapitalisasi sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk penilaian aset sesuai nilai minimum kapitalisasi akan dilakukan secara bertahap oleh Bagian Perlengkapan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

1. biaya impor
2. biaya persiapan tempat
3. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost)
4. biaya pemasangan (installation cost)
5. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
6. biaya konstruksi
7. biaya kepanitiaan

Aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan sampai dengan 31 Desember 2011 belum dilaksanakan dan bertahap akan diterapkan setelah penataan aset tetap di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya selesai dilaksanakan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

❖ **Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk beberapa tahun anggaran menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga

❖ **Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah daerah/ Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa :

a) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

b) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

c) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya.

Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

4. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh : hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

- a. software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
- b. lisensi dan franchise
- c. hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya
- d. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

5. Aset Lain-Lain

Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan

Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

❖ **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi terdiri dari :

❖ **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Terdiri dari : utang Taspen, utang askes, utang PPh Pusat, utang PPN Pusat, utang Taperum, utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

❖ **Utang Bunga**

Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang.

Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah.

Utang bunga terdiri dari : Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.

❖ **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang.

Terdiri dari : Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

❖ **Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periode yang bersangkutan.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.

Terdiri dari : setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak III, uang muka lelang penjualan aset daerah.

❖ **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

❖ **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

1. Utang Dalam Negeri : Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Utang Luar Negeri : Utang Luar Negeri Sektor Perbankan.

❖ **Ekuitas Dana**

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Terdiri dari : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Terdiri dari : diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, diinvestasikan dalam Aset Tetap, diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan), dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Terdiri atas : diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

❖ **Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa**

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

1. Kesalahan yang tidak berulang

Adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun akuitas dana yang terkait.
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

2. Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. tidak merupakan kegiatan normal dari entitas
- b. tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang
- c. berada diluar kendali atau pengaruh entitas
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 serta Perwali No. 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perwali nomer 58 tahun 2011.

❖ Penyajian Laporan Keuangan

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Neraca, Realisasi Anggaran dan Arus Kas.

5.1. PENJELASAN LAPORAN NERACA

Neraca merupakan Lampiran II dari Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 dan disusun berdasarkan peraturan yang ada dan disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk Posisi Keuangan per 31 Desember 2011 Pemerintah Kota Surabaya secara umum sebagai berikut :

Posisi Keuangan terkait dengan Aset sebesar	Rp. 33.441.086.637.722,43
Kewajiban sebesar	Rp. 91.330.068.751,76
Ekuitas Dana sebesar	Rp. 33.349.756.568.970,67

Jumlah **Aset** sebesar Rp. 33.441.086.637.722,43; terdiri dari Aset lancar sebesar Rp 875.102.668.530,13; Investasi Jangka panjang sebesar Rp 906.946.038.066,74; Aset Tetap sebesar Rp 31.484.362.969.879,60 serta Aset lainnya sebesar Rp 174.674.961.245,96.

Jumlah **Kewajiban** sebesar Rp91.330.068.751,76; terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp69.408.572.102,76; dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp21.921.496.649,00.

Total **Ekuitas Dana** sebesar Rp33.349.756.568.970,67; terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp805.694.096.427,37; Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp32.544.062.472.543,30.

1. ASET	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 33.441.086.637.722,43	Rp 32.621.984.273.970,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki aset sebesar Rp33.441.086.637.722,43 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
- Aset lancar	875.102.668.530,13	649.033.814.501,99
- Investasi jangka panjang	906.946.038.066,74	854.879.669.217,91
- Aset tetap	31.484.362.969.879,60	30.945.508.393.148,60
- Aset lainnya	174.674.961.245,96	172.562.397.101,43
Jumlah	33.441.086.637.722,43	32.621.984.273.970,00

2. ASET LANCAR	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 875.102.668.530,13	Rp 649.033.814.501,99

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain, Persediaan.

3. Kas di Kas Daerah	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 506.259.735.245,66	Rp 536.727.104.651,97

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan bank per 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut :

▪ Bank Jatim No. Rek 0011007000	Rp	206.259.735.245,66	Rp	126.948.235.068,97
▪ Deposito berjangka satu bulan	Rp	300.000.000.000,00	Rp	400.000.000.000,00

▪ Utang pajak BUD	Rp	0,00	9.778.869.583,00
Jumlah	Rp	506.259.735.245,66Rp	536.727.104.651,97

4. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 300.738.179,00	Rp 12.470.867.367,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 sebesar Rp300.738.179,00 terdiri dari :

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
Uang Persediaan		
1.	RSUD Bhakti Dharma Husada	5.997.667,00
2.	Kec. Sambikerep	75.000,00
Jumlah 1		6.072.667,00
Utang pajak (PFK)		
1.	Dinas Pendidikan	3.170.250,00
2.	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK)	291.495.262,00
Jumlah 2		294.665.512,00
Jumlah 1 + 2		300.738.179,00

Sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp6.072.667,00 telah disetor kembali oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kas Daerah pada Tahun 2012.

Uang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp294.665.512,00 telah disetor/dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke KPPN pada Tahun 2012.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp300.738.179,00 tersebut, tidak termasuk di dalamnya kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan sebesar Rp1.492.355.079,89 dan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Simokerto sebesar 120.568.600,00, yang merupakan uang makan/minum pegawai dan tunjangan guru (belanja LS TA 2011) yang baru dibayarkan kepada pegawai/guru pada awal bulan Januari 2012 karena baru diterima di rekening bendahara pengeluaran SKPD pada akhir Desember 2011.

5. Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 125.737.773,28	Rp 28.289.800,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp125.737.773,28 yang baru dapat disetor oleh bendahara penerimaan ke Kas Daerah pada tahun 2012

Kas di Bendahara Penerimaan SKPD sebesar Rp.125.737.773,28 terdapat pada SKPD :

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	13.615.000,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35.025.000,00
3	Dinas Perhubungan	69.698.500,00
4	RSUD Bhakti Dharma Husada	7.399.273,28
	JUMLAH	125.737.773,28

6. Kas di BLUD RSUD dr.M.Soewandhie	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 21.743.429.586,61	Rp 2.043.704.439,84

Saldo kas BLU RSUD dr. SOEWANDHIE per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 21.743.429.586,61 terdiri dari :

▪ Bank Jatim No. Rek .0011.233.074	Rp	21.743.382.737,47
▪ Kas tunai	Rp	46.849,14
Jumlah	Rp	21.743.429.586,61

7. Piutang Pajak	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 609.739.454.344,00	Rp 31.726.905.521,00

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar Rp609.853.445.277,00 dan Rp31.726.905.521,00 dengan rincian sebagai berikut :

▪ Piutang Pajak Hotel	Rp	8.744.788.768,00	Rp	8.117.167.155,00
▪ Piutang Pajak Restoran	Rp	12.700.308.028,00	Rp	12.515.042.149,00
▪ Piutang Pajak Hiburan	Rp	1.465.260.779,00	Rp	1.433.582.495,00
▪ Piutang Pajak Reklame	Rp	8.373.080.325,00	Rp	8.929.228.725,00
▪ Piutang Pajak Penerangan	Rp	94.817.921,00	Rp	92.855.357,00

Jalan Non PLN				
▪ Pajak Parkir	Rp	625.218.278,00	Rp	639.029.640,00
▪ BPHTB	Rp	2.383.931.434,00	Rp	0,00
▪ Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	575.352.048.811,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	609.739.454.344,00	Rp	31.726.905.521,00

Mutasi Piutang Pajak tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp	31.726.905.521,00
Penambahan Tahun 2011	Rp	675.158.439.076,00
Pengurangan Tahun 2011	Rp	97.145.890.253,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2011	Rp	609.739.454.344,00

Mutasi Piutang Pajak Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 1-1-2011	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2011
1	Pajak Hotel	8.117.167.155,00	1.839.284.260,00	1.211.662.647,00	8.744.788.768,00
2	Pajak Restoran	12.515.042.149,00	1.871.466.162,00	1.686.200.283,00	12.700.308.028,00
3	Pajak Hiburan	1.433.582.495,00	209.830.000,00	178.151.716,00	1.465.260.779,00
4	Pajak Reklame	8.929.228.725,00	1.572.792.800,00	2.128.941.200,00	8.373.080.325,00
5	PPJ Non PLN	92.855.357,00	3.676.829,00	1.714.265,00	94.817.921,00
6	Pajak Parkir	639.029.640,00	225.787.350,00	239.598.712,00	625.218.278,00
7	BPHTB	0	3.102.451.564,00	718.520.130,00	2.383.931.434,00
8	PBB	0	685.177.375.172,00	109.825.326.361,00	575.352.048.811,00
Jumlah		31.726.905.521,00	694.002.664.137,00	115.990.115.314,00	609.739.454.344,00

Penambahan piutang pajak Tahun 2011 sebesar Rp694.002.664.137,00 berasal dari koreksi dan penerbitan SKP yang belum terlunasi sampai dengan 31 Desember 2011. Penambahan piutang pajak Tahun 2011 sangat besar karena pada Tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya menerima limpahan piutang PBB dan BPHTB dari Pemerintah Pusat.

Pengurangan piutang pajak Tahun 2011 sebesar Rp115.990.115.314,00 berasal dari koreksi dan pelunasan selama Tahun 2011.

8. Piutang Retribusi

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Rp 11.670.364.704,51

Rp 5.100.255.621,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar Rp11.670.364.704,51 dan Rp5.100.255.621,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN		2011		2010
▪ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	88.653.875,00	Rp	88.653.875,00
▪ Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi)	Rp	748.866.105,00	Rp	672.198.410,00
▪ Retribusi Kebersihan pada PDAM	Rp	1.928.383.002,60	Rp	2.253.029.950,00
▪ Retribusi Kakus	Rp	15.948.337,50	Rp	0,00
▪ Retribusi Pemakaman	Rp	4.100.000,00	Rp	0,00
▪ Retribusi THR	Rp	216.121.689,00	Rp	138.646.164,00
▪ Retribusi Balai Pemuda	Rp	181.776.000,00	Rp	181.776.000,00
▪ Retribusi Ampel	Rp	0,00	Rp	1.565.000,00
▪ Retribusi THP Kenjeran	Rp	0,00	Rp	12.688.000,00
▪ Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan)	Rp	1.404.849.238,00	Rp	1.751.698.222,00
▪ Retribusi IMB - Ciptakarya	Rp	4.112.250.240,00	Rp	0,00
▪ Retribusi SKRK-Ciptakarya	Rp	2.267.107.296,00	Rp	0,00
▪ Retribusi sewa stand Terminal	Rp	135.360.400,00	Rp	0,00
▪ Retribusi Pelayanan-BDH	Rp	285.459.946,41	Rp	0,00
▪ Retribusi Ijin Gangguan (HO)	Rp	281.488.575,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	11.670.364.704,51	Rp	5.100.255.621,00

Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 1-1-2011	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2011
1.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	88.653.875,00	0	0	88.653.875,00
2.	Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi)	672.198.410,00	76.667.695,00	0	748.866.105,00
3.	Retribusi Kebersihan pada PDAM	2.253.029.950,00	0	324.646.947,40	1.928.383.002,60
4.	Retribusi Kakus	0	15.948.337,50	0	15.948.337,50
5.	Retribusi Pemakaman	0	4.100.000,00	0	4.100.000,00
4.	Retribusi THR	138.646.164,00	77.475.525,00	0	216.121.689,00
6.	Retribusi Balai Pemuda	181.776.000,00	0	0	181.776.000,00
7.	Retribusi Ampel	1.565.000,00	0	1.565.000,00	0,00

8.	Retribusi THP Kenjeran	12.688.000,00	0	12.688.000,00	0,00
9.	Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan)	1.751.698.222,00	0	346.848.984,00	1.404.849.238,00
10.	Retribusi IMB - Ciptakarya	0	4.112.250.240,00	0	4.112.250.240,00
11.	Retribusi SKRK-Ciptakarya	0	2.267.107.296,00	0	2.267.107.296,00
12.	Retribusi sewa stand Terminal	0	135.360.400,00	0	135.360.400,00
13.	Retribusi Pelayanan Kesehatan -BDH	0	285.459.946,41	0	285.459.946,41
14.	Retribusi Ijin Gangguan (HO) BLH	0	281.488.575,00		281.488.575,00
	Jumlah	5.100.255.621,00	7.255.858.014,91	685.748.931,40	11.670.364.704,51

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
9. Piutang lain-lain	Rp 70.470.342.258,56	Rp 27.342.354.579,18

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar Rp70.470.342.258,56 dan Rp27.342.354.579,18, dengan rincian saldo sebagai berikut :

URAIAN		2011		2010
▪ Piutang jamkesmas RSUD dr. Soewandhie	Rp	1.478.772.578,06	Rp	2.833.404.942,00
▪ Piutang askes sosial RSUD dr. Soewandhie	Rp	102.325.500,00	Rp	0,00
▪ Piutang obat askes RSUD dr. Soewandhie	Rp	130.583.493,00	Rp	0,00
▪ Piutang obat In Health RSUD dr. Soewandhie	Rp	909.205,00	Rp	0,00
▪ Piutang In Health RSUD dr. Soewandhie	Rp	6.206.875,00	Rp	0,00
▪ Piutang PT. KAI RSUD dr. Soewandhie	Rp	62.899.725,00	Rp	0,00
▪ Piutang Lain-lain eks DPRD	Rp	185.274.343,50	Rp	185.274.343,50
▪ Piutang Lain-lain eks PFK	Rp	7.865.192,00	Rp	13.485.419,00

▪ Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya	Rp	2.696.404.190,00	Rp	2.696.404.190,00
▪ Piutang Gedung Tunjungan Center Lt I,II,III	Rp	1.740.960.000,00	Rp	0,00
▪ Piutang JPO dan Pertokoan diatas Jl. Tunjungan dan Jl Tanjung Anom	Rp	244.400.000,00	Rp	0,00
▪ Piutang biaya pemungutan PBB periode Desember 2009 dari KPP Pratama Surabaya	Rp	111.023.082,00	Rp	111.023.082,00
▪ Koreksi atas sanksi administrasi penyedia barang jasa berdasarkan perhitungan bersama PPK SKPD	Rp	384.498.301,00	Rp	551.897.919,00
▪ Koreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan	Rp	871.922.880,00	Rp	1.199.885.600,00
▪ Piutang DBH Provinsi – Pajak	Rp	54.681.102.386,00	Rp	18.957.195.270,00
▪ Piutang DBH Provinsi – Sumbangan Pihak Ketiga	Rp	9.617.990,00	Rp	19.710.650,00
▪ Denda keterlambatan pekerjaan – Cipta Karya	Rp	0,00	Rp	28.797.409,48
▪ Denda keterlambatan pekerjaan – Bina Marga	Rp	0,00	Rp	37.903.298,20
▪ Piutang sewa Gelora 10 Nopember – Dispora	Rp	57.000.000,00	Rp	0,00
▪ Denda keterlambatan pekerjaan - Perlengkapan	Rp	0,00	Rp	35.908.100,00
▪ Piutang dividen PD Pasar Surya	Rp	800.000.000,00	Rp	0,00
▪ Piutang dividen BPR SAU Tahun 2010	Rp	828.661.878,00	Rp	0,00
▪ Piutang kontribusi Bangun Guna/Kelola Serah Pasar Turi beserta sanksi denda 1% per bulan	Rp	4.185.818.970,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	70.470.342.258,56	Rp	27.342.354.579,18

Mutasi Piutang Lain-lain Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 1-1-2011	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2011
1.	Piutang RSUD dr.Soewandhie				
	• Piutang Jamkesmas	2.833.404.942,00	1.478.772.578,06	2.833.404.942,00	1.478.772.578,06
	• Piutang askes sosial	0	102.325.500,00	0	102.325.500,00
	• Piutang Obat Askes	0	130.583.493,00	0	130.583.493,00
	• Piutang Obat In Health	0	909.205,00	0	909.205,00
	• Piutang In Health	0	6.206.875,00	0	6.206.875,00
	• Piutang kepada PT KAI	0	62.899.725,00	0	62.899.725,00
2.	Piutang Lain-lain eks DPRD	185.274.343,50	0	0	185.274.343,50
3.	Piutang kelebihan penyeteroran PFK	13.485.419,00	7.865.192,00	13.485.419,00	7.865.192,00
4.	Piutang bantuan Parpol Bakesbanglinmas	162.500.000,00	0	0	162.500.000,00
5.	Piutang sewa gedung Siola				0,00
	• Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan PT Siola serta denda	388.964.356,00	0	0	388.964.356,00
	• Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan PT. Tunjungan City Hopefull	0	1.212.631.314,00	0	1.212.631.314,00
	• Piutang Gedung Tunjungan Center Lt I,II,III	0	1.740.960.000,00	0	1.740.960.000,00
	• Piutang JPO dan Pertokoan diatas Jl. Tunjungan dan Jl Tanjung Anom	0	244.400.000,00	0	244.400.000,00
6.	Piutang pelepasan tanah bekas ganjaran Kel. Karah oleh Yayasan UNMER	120.000.000,00	0	0	120.000.000,00
7.	Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya	2.696.404.190,00	0	0	2.696.404.190,00
8.	Piutang biaya pemungutan PBB periode Desember 2009 dari KPP Pratama Surabaya	111.023.082,00	0	0	111.023.082,00
9.	Piutang kepada Rekanan penyedia barang jasa				0,00
	• Koreksi atas sanksi administrasi penyedia barang jasa berdasarkan perhitungan bersama PPK SKPD	551.897.919,00	0	167.399.618,00	384.498.301,00
	• Koreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan	1.199.885.600,00	0	327.962.720,00	871.922.880,00
10.	Piutang dana bagi hasil dari Pemprov				0,00
	• Bagi Hasil Pajak	18.957.195.270,00	54.681.102.386,00	18.957.195.270,00	54.681.102.386,00
	• Sumbangan Pihak Ketiga	19.710.650,00	9.617.990,00	19.710.650,00	9.617.990,00
11.	Piutang sewa Gelora 10 Nopember – Dispora	0	57.000.000,00		57.000.000,00
12.	Denda keterlambatan pekerjaan				0,00
	• Cipta Karya	28.797.409,48	0	28.797.409,48	0,00
	• Bina Marga	37.903.298,20	0	37.903.298,20	0,00

	• Perlengkapan	35.908.100,00	0	35.908.100,00	0,00
13.	Piutang dividen PD Pasar Surya	0	800.000.000,00	0	800.000.000,00
14.	Piutang kontribusi Bangun Guna/Kelola Serah Pasar Turi beserta sanksi denda 1% per bulan	0	4.185.818.970,00	0	4.185.818.970,00
15	Piutang deviden pada PD BPR SAU	0	828.661.878,00	0	828.661.878,00
Jumlah		27.342.354.579,18	65.549.755.106,06	22.421.767.426,68	70.470.342.258,56

- Piutang jamkesmas RSUD dr.Mochamad Soewandhie sebesar Rp1.478.772.578,06 merupakan klaim atas pelayanan kesehatan pasien Jankesmas Tahun 2011, sedangkan piutang Tahun 2010 sebesar Rp2.833.404.942,00 telah dilunasi Tahun 2011.
- Piutang askes RSUD dr. Mochamad Soewandhie sebesar Rp102.325.500,00 merupakan klaim pelayanan kesehatan pasien askes bulan Nopember dan Desember Tahun 2011 ke PT. Askes Surabaya.
- Piutang obat askes RSUD dr. Mochamad Soewandhie sebesar Rp130.583.493,00 merupakan klaim pemakaian obat selama Tahun 2011 ke PT. Askes Surabaya.
- Piutang obat In Health dr. Mochamad Soewandhie merupakan klaim pemakaian obat In Health selama Desember 2011 sebesar Rp909.205,00.
- Piutang In Health dr. Mochamad Soewandhie sebesar Rp6.206.875,00 merupakan klaim pelayanan In Health bulan Nopember dan Desember Tahun 2011.
- Piutang PT.KAI dr.Mochamad Soewandhie sebesar Rp62.899.725,00 merupakan klaim pelayanan kesehatan kepada PT. KAI bulan Oktober s/d Desember 2011.
- Piutang kelebihan penyeteroran PFK sebesar Rp7.865.192,00 merupakan kelebihan pembayaran IWP, Taperum, dan Askes Tahun 2011 ke KPPN, yang diperhitungkan dengan kewajiban IWP bulan Januari 2012.
- Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan oleh PT Siola serta denda sebesar Rp388.964.356,00 dan belum ada pelunasan atas saldo tersebut selama Tahun 2011. Ditambah pada Tahun 2011 PT. Tunjungan City Hopefull mempunyai tunggakan sewa tanah dan bangunan sebesar Rp1.212.631.314,00.
- Piutang sewa Gedung Tunjungan Center Lt I, II, III Jl. Tunjungan No. 3 sebesar Rp1.740.960.000,00 oleh PT. Tunjungan City Hopefull.
- Piutang sewa selama Tahun 2011 atas JPO dan pertokoan diatas Jl. Tunjungan dan Jl. Tanjung Anom sebesar Rp244.400.000,00 oleh PT. Tunjungan City Hopefull.

- Piutang kepada rekanan penyedia barang/jasa atas sanksi administrasi penyedia barang jasa sebesar Rp384.498.301,00 berdasarkan perhitungan bersama PPK SKPD. Tahun 2010 sampai Tahun 2011 belum ada pelunasan. Sedangkan piutang atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan sebesar Rp871.922.880,00 berasal dari Nilai Jaminan yang semula berada di aset lain-lain, tapi jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan karena telah melewati batas waktu sehingga di konversi menjadi Piutang Lain-lain. Rincian saldo per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

No.	Rekanan	Piutang sanksi administrasi	Piutang Jaminan Pelaksanaan
1.	PT Rukun Jaya Madura Group	137.412.792,00	402.409.920,00
2.	PT Rukun Jaya Madura Group	121.435.375,00	210.180.000,00
3.	PT Daya Guna Permata	82.100.069,00	198.306.720,00
4.	CV Endah Elok Energi	43.550.065,00	61.026.240,00
	Jumlah	384.498.301,00	871.922.880,00

- Piutang sewa Gelora 10 Nopember sebesar Rp57.000.000,00 merupakan penambahan atas sewa Tahun 2011.
- Piutang Bagi Hasil Pajak sebesar Rp54.681.102.386,00 dan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp9.617.990,00 dari Propinsi Jatim merupakan bagi hasil Tahun Anggaran 2011 yang belum diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya.
- Piutang denda keterlambatan penyelesaian empat belas pekerjaan sebesar Rp102.608.807,68 telah terbayar pada Januari 2011, dan itu terinci atasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp28.797.409,48, Dinas Bina Marga sebesar Rp37.903.298,20, Bagian Perlengkapan sebesar Rp 35.908.100,00.
- Piutang dividen PD Pasar Surya sebesar Rp800.000.000,00 sesuai surat 001/BAWAS-PDPS/I/2012 bulan Januari 2011.
- Piutang kontribusi Bangun Guna/Kelola Serah Pasar Turi beserta sanksi denda 1% per bulan sebesar Rp4.185.818.970,00 berdasar perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan GMI (yang diwakili oleh PT Gala Bumi Perkasa) nomor 180/1096/436.1.2/2010. Terkait pembayaran kontribusi tersebut, GMI mengajukan permohonan Addendum Perjanjian Kerjasama melalui Surat Nomor 169/GMI/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 kepada Walikota Surabaya dengan alasan Pemerintah Kota Surabaya terlambat menyerahkan

obyek/lahan Bangun Guna/Kelola Serah Pasar Turi kepada GMI. Sampai dengan 6 Mei 2012 Pemerintah Kota Surabaya belum memberikan jawaban atas permohonan addendum tersebut.

- Piutang deviden pada PD BPR SAU merupakan piutang atas deviden laba PD BPR SAU Tahun 2010, yang telah diputuskan dalam RUPS Tahun 2011, namun sampai dengan 31 Desember 2011 belum dibayar ke Kasda.

10. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.	31 Desember 2011		31 Desember 2010	
	Rp		Rp	
	271.360.000,00		0,00	

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp271.360.000,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnya. Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang bahwa piutang ganti rugi yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketetapan penyelesaian yang telah ditetapkan disajikan sebagai aset lancar. Dari saldo awal sebesar Rp.281.566.000,00 terdapat pelunasan sebesar Rp.10.206.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp.271.360.000,00.

11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	31 Desember 2011		31 Desember 2010	
	(Rp)		Rp	
	391.173.156.533,50		0,00	

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Perwali no 58 tahun 2011 tentang perubahan atas Perwali no 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih berdasar atas umur piutang dan jenis piutang sebagai berikut :

▪ Penyisihan Piutang Pajak (Lampiran 1)	Rp	(385.387.872.285,00)	Rp	0,00
▪ Penyisihan Piutang Retribusi (Lampiran 2)	Rp	(1.522.795.718,00)	Rp	0,00
▪ Penyisihan Piutang Lain-lain (Lampiran 3)	Rp	(3.991.128.530,50)	Rp	0,00
▪ Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp	(271.360.000,00)	Rp	0,00
TOTAL	Rp	(391.173.156.533,50)	Rp	0,00

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2011 sebesar Rp(385.387.872.285,00) terdiri dari :

▪ Piutang Pajak Hotel	Rp	(3.284.768.303,00)	Rp	0,00
▪ Piutang Pajak Restoran	Rp	(6.192.039.454,00)	Rp	0,00
▪ Piutang Pajak Hiburan	Rp	(885.072.145,00)	Rp	0,00
▪ Piutang Pajak Reklame	Rp	(4.145.562.087,00)	Rp	0,00
▪ Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Rp	(73.758.288,00)	Rp	0,00
▪ Pajak Parkir	Rp	(334.989.682,00)	Rp	0,00
▪ BPHTB	Rp	(705.095.949,00)	Rp	0,00
▪ Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	(369.766.586.377,00)	Rp	0,00
Jumlah	Rp	(385.387.872.285,00)	Rp	0,00

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2011 sebesar (Rp1.522.795.718,00) terdiri dari :

▪ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	(88.653.875,00)	Rp	0,00
▪ Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi)	Rp	(548.899.196,25)	Rp	0,00
▪ Retribusi THR	Rp	(54.021.920,25)	Rp	0,00
▪ Retribusi Balai Pemuda	Rp	(141.519.000,00)	Rp	0,00
▪ Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan)	Rp	(678.472.751,50)	Rp	0,00
▪ Retribusi sewa stand Terminal	Rp	(11.228.975,00)	Rp	0,00
Jumlah	Rp	(1.522.795.718,00)	Rp	0,00

Penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2011 sebesar Rp(3.991.128.530,50) terdiri dari :

▪ Piutang Lain-lain eks DPRD	Rp	(185.274.343,50)	Rp	0,00
▪ Piutang biaya pemungutan PBB periode Desember 2009 dari KPP Pratama Surabaya	Rp	(27.755.770,50)	Rp	0,00
▪ Piutang bantuan Parpol Bakesbanglinmas	Rp	(162.500.000,00)	Rp	0,00
▪ Piutang pelepasan tanah bekas ganjaran Kel. Karah oleh Yayasan UNMER	Rp	(120.000.000,00)	Rp	0,00
▪ Koreksi atas sanksi administrasi penyedia barang jasa berdasarkan perhitungan bersama PPK SKPD	Rp	(192.249.150,50)	Rp	0,00
▪ Koreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari rekanan	Rp	(217.980.720,00)	Rp	0,00
▪ Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan PT Siola serta denda	Rp	(388.964.356,00)	Rp	0,00

▪ Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya	Rp	(2.696.404.190,00)	Rp	0,00
Jumlah	Rp	(3.991.128.530,50)	Rp	0,00

12. Piutang Bersih	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 300.978.364.773,57	Rp 0,00

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Perwali no 58 tahun 2011 tentang perubahan atas Perwali no 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka piutang disajikan berdasar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Tahun 2010 nilai piutang bersih belum disajikan karena belum ada kebijakan tentang penyisihan piutang tak tertagih. Penyajian piutang secara nilai bersih yang dapat direalisasikan tersebut adalah sebagai berikut :

▪ Piutang bersih Pajak (Lampiran 4)	Rp	224.351.582.059,00	Rp	0,00
▪ Piutang bersih Retribusi (Lampiran 5)	Rp	10.147.568.986,51	Rp	0,00
▪ Piutang bersih Lain-lain (Lampiran 6)	Rp	66.479.213.728,06	Rp	0,00
TOTAL	Rp	300.978.364.773,57	Rp	0,00

13. Persediaan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 45.694.662.971,01	Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Habis Pakai/ Material per 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2011		2010	
Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	1.544.277.908,69	Rp	632.802.624,00
Persediaan Obat-obatan				
• Dinas Kesehatan	Rp	13.584.561.255,00	Rp	12.786.278.233,00
• RS Dr Soewandhie	Rp	4.892.957.591,00	Rp	2.466.689.565,00
• Dinas Pertanian	Rp	22.566.400,00	Rp	10.031.011,00
• RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp	3.636.519.994,10	Rp	936.245.974,00
Persediaan Bahan Makanan				
• RSUD. Dr. Soewandhie	Rp	126.006.200,00	Rp	0,00

• RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp 75.108.410,00	Rp 0,00
Persediaan Bahan Material		
• Aspal dan Material Lainnya Dinas Bina Marga	Rp 1.593.164.038,20	Rp 60.768.610,00
• Aspal dan Material Lainnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp 1.619.138.447,00	Rp 2.021.753.239,00
• Bahan baku bangunan - Dinas Kebakaran	Rp 1.134.000,00	Rp 0,00
Persediaan Bahan Kimia		
• Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp 284.564.443,00	Rp 633.797.390,00
• Badan Lingkungan Hidup	Rp 267.185.820,00	Rp 5.412.000,00
Persediaan Bahan Habis Pakai Kedokteran		
• RSUD. Dr. Soewandhie	Rp 2.772.612.069,00	Rp 3.470.661.981,00
• RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp 260.828.535,00	Rp 0,00
Persediaan bongkaran gedung di Bagian Perlengkapan	Rp 43.681.000,00	Rp 80.155.015,00
Persediaan Bibit Tanaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp 126.719.250,00	Rp 74.228.500,00
Persediaan Ternak Dinas Pertanian	Rp 99.457.545,00	Rp 45.356.066,00
Persediaan Alat Kontrasepsi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Rp 19.107.000,00	Rp 576.963.750,00
Persediaan alat listrik RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp 108.914.245,00	Rp 0,00
Persediaan Habis Pakai Lainnya	Rp 14.616.158.821,22	Rp 9.793.188.564,00
Jumlah	Rp 45.694.662.972,01	Rp 33.594.332.522,00

14. Jumlah Aset Lancar	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 875.102.668.529,13	Rp 649.033.814.501,99

15. Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 906.946.038.066,74	Rp 854.879.669.217,19

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Jangka Panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya Per 31 Desember 2011 sebesar Rp 906.946.038.066,74 yang terdiri dari Investasi Non Permanen sebesar Rp 69.808.313,25 dan Investasi Permanen sebesar Rp906.876.229.753,49.

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
16. Investasi Non Permanen	Rp4.230.491.400,00	Rp7.096.322.792,10

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berupa dana yang disisihkan oleh Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
17. Investasi Non Permanen Lainnya	Rp4.230.491.400,00	Rp7.096.322.792,10

- Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp**4.230.491.400,10** merupakan dana Pemerintah Kota Surabaya yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat/koperasi di bawah pengawasan Tim Pokja. Dana tersebut terdiri dari :

URAIAN	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1. Dana Pembangunan Kota/ Kabupaten Surabaya (DPKK) Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp 133.703.742,00	Rp 133.703.742,00
2. Dana Talangan RASKIN – Badan Pemberdayaan Ma-syarakat dan Keluarga Berencana	Rp 0,00	Rp 597.998.059,00
3. Bantuan Kepada Peternak Sapi Kere-man Dinas Pertanian	Rp 18.300.000,00	Rp 18.300.000,00
4. Bantuan Modal Bergulir untuk Pengembangan Usaha Koperasi dan Pengu-saha Kecil dan Pedagang Kaki Lima – Dinas Koperasi dan UMKM	Rp 4.078.487.658,00	Rp 6.346.320.991,10
Jumlah	Rp 4.230.491.400,00	Rp 7.096.322.792,10

(1) Dana Pembangunan Kota/Kabupaten Surabaya (DPKK) di Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp 133.703.742,00.

Saldo awal dana bergulir sebesar Rp 240.000.000,00 antara lain telah dilakukan penutupan rekening dana bergulir dengan sisa saldo sebesar Rp 83.998.807,59 yang telah disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 08 Nopember 2010, selain itu juga terdapat honorarium dan biaya operasional yang diberikan berkaitan dengan penyampaian dana bergulir sesuai SK Walikota No 188.45/114/402.01.04/2001 dan No 188.45/115/402.01.04/2001 sebesar Rp 22.297.450,00.

Sehingga terdapat tunggakan sebesar Rp 133.703.742,00 yang merupakan pinjaman Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Perdagangan yang digulirkan untuk :

* 22 UKM pada Tahap I dengan sisa tunggakan sebesar Rp 91.355.083,00

* 9 UKM pada Tahap II dengan sisa tunggakan sebesar Rp 42.348.659,00

Sejak Tahun 2003 sampai dengan saat ini tidak terjadi pengangsuran dari para UKM tersebut.

Pada bulan Nopember dan Desember 2009, telah dilakukan konfirmasi penagihan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan dan ditanda tangani langsung oleh pihak UKM atas pengakuan hutang dan kesanggupan membayar, namun sampai dengan saat ini belum ada UKM yang melakukan pengangsuran, meskipun sudah dilakukan penagihan / konfirmasi ulang.

Pada bulan September dan Nopember 2010 dilakukan upaya penagihan kembali dan proses pengembalian pinjaman terhambat dikarenakan beberapa hal antara lain :

- * Peminjam telah meninggal dunia, ahli waris tidak mengetahui pinjaman tersebut sehingga tidak bersedia untuk bertanggung jawab
- * Usaha peminjam pindah alamat keluar kota dan alamat tidak terdeteksi
- * Usaha peminjam tutup dan tidak sanggup untuk melakukan pengembalian
- * Peminjam mengakui telah melunasi, namun tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan (kwitansi), sementara data yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya tidak terdapat pembayaran sesuai rekening koran bank.

(2) Dana Talangan RASKIN di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebesar Rp 0,00.

Saldo Dana Talangan Raskin per 31 Desember 2010 sebesar Rp597.998.059,00. Saldo ini berdasar Laporan Hasil Klarifikasi atas Pemeriksaan saldo talangan Raskin pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya No 700/3629/436.7.9/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang dilakukan oleh Inspektorat dan dana tersebut telah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada tanggal 05 Januari 2011.

(3) Bantuan kepada Peternak Sapi Kereman di Dinas Pertanian sebesar Rp18.300.000,00.

Saldo bantuan sebesar Rp18.300.000,00 merupakan tunggakan seluruh masyarakat kepada Dinas Pertanian. Dan sampai akhir Desember 2011 belum ada pelunasan.

(5) Bantuan Modal Bergulir untuk Pengembangan Usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima di Dinas Koperasi dan Sektor Informal sebesar Rp 4.078.487.658,00.

Mutasi tahun 2011 adalah :

Saldo awal per 1 Januari 2011	Rp. 6.346.320.991,00
Penambahan tahun 2011	Rp. 0,00
Pengurangan tahun 2011	<u>Rp. (2.267.833.333,00)</u>
Saldo akhir per 31 Desember 2011	Rp. 4.078.487.658,00

Pengurangan Investasi sebesar Rp. 2.267.833.333,00 merupakan pengembalian Pokok Dana Bergulir ke Kas Umum Pemerintah Kota Surabaya, sehingga pokok

dana bergulir berkurang menjadi sebesar Rp. 4.078.487.658,00.

18. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		Rp4.160.683.086,75

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Perwali no 58 tahun 2011 tentang perubahan atas Perwali no 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka dilakukan penyisihan investasi non permanen dana bergulir tidak tertagih berdasar atas investasi non permanen dana bergulir sebagai berikut :

URAIAN		2011		2010
▪ Penyisihan Dana Pembangunan Kota/Kabupaten (DPKK)	Rp	(133.703.742,00)	Rp	0,00
▪ Penyisihan Dana Bantuan Sapi Kereman	Rp	(4.575.000,00)	Rp	0,00
▪ Penyisihan Dana Pengembangan Koperasi Pengusaha Kecil dan Kaki Lima	Rp	(4.022.404.344,75)	Rp	0,00
T O T A L (lampiran 7)	Rp	(4.160.683.086,75)	Rp	0,00

19. Investasi Non Permanen Bersih	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		Rp69.808.313,25

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Perwali no 58 tahun 2011 tentang perubahan atas Perwali no 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka dana bergulir disajikan berdasar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian dana bergulir secara nilai bersih yang dapat direalisasikan tersebut adalah sebagai berikut :

▪ Dana Pembangunan Kota/Kabupaten (DPKK) bersih	Rp	0,00	Rp	0,00
▪ Dana Bantuan Sapi Kereman bersih	Rp	13.725.000,00	Rp	0,00
▪ Dana Pengembangan Koperasi Pengusaha Kecil dan Kaki Lima bersih	Rp	56.083.313,25	Rp	0,00
T O T A L (lampiran 8)	Rp	69.808.313,25	Rp	0,00

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
20. Investasi Permanen	Rp906.876.229.753,49	Rp847.783.346.425,81

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
21. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp906.876.229.753,49	Rp847.783.346.425,81

Penilaian Investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan Metode Ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai 100%, sedangkan untuk kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan Metode Biaya. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar Rp906.876.229.753,49 dan Rp847.783.346.425,81 adalah sebagai berikut :

No.	Perusahaan Milik Daerah	31 Desember 2011	31 Desember 2010
1. Perusahaan Milik Daerah			
a.	Investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum	Rp 772.945.110.562,00	Rp 721.462.775.848,00
b.	Investasi pada PD Pasar Surya	Rp 26.938.907.825,00	Rp 28.994.426.732,00
c.	Investasi pada PD Rumah Potong Hewan	Rp 10.759.045.659,00	Rp 10.325.928.830,00
d.	Investasi Pada PT Surya Karsa Utama	Rp 1.407.717.071,33	Rp 1.377.421.414,11
e.	Investasi Pada PT BPR Surya artha Utama (SAU)	Rp 4.609.070.136,16	Rp 0,00
Jumlah 1		Rp 816.659.851.253,49	Rp 762.160.552.824,11
2. Lembaga Keuangan Bank			
a.	Investasi pada PT Bank Jatim	Rp 32.230.000.000,00	Rp 32.230.000.000,00
b.	Investasi pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim	Rp 198.059.000,00	Rp 198.059.000,00
Jumlah 2		Rp 32.428.059.000,00	Rp 32.428.059.000,00
3. Pihak Ketiga			
a.	Investasi pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Rp 57.219.567.500,00	Rp 54.022.718.400,50
b.	Investasi pada PT Abbatoir Surya Jaya	Rp 0,00	Rp (1.540.372.886,40)
c.	Investasi PT Sasana Taruna Aneka Ria (STAR)	Rp 568.752.000,00	Rp 712.389.087,90
Jumlah 3		Rp 57.788.319.500,00	Rp 53.194.734.602,00
Jumlah 1+2+3		Rp 906.876.229.753,49	Rp 936.961.577.698,49

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PDAM adalah 100%. Nilai Investasi pada PDAM yang tersaji sebesar Rp772.945.110.562,00 tersebut, terdapat selisih

sebesar Rp30.085.347.945,00 dengan nilai ekuitas yang disajikan dalam Neraca PDAM. Hal itu karena aset saluran pipa milik Pemkot Surabaya yang digunakan oleh PDAM senilai Rp30.085.347.945,00, pada Neraca PDAM telah dicatat sebagai penyertaan Pemkot Surabaya. Namun, penyertaan tersebut belum ditetapkan dengan Perda, dan aset dimaksud masih tercatat sebagai Aset Lainnya dalam Neraca Pemkot Surabaya.

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PD Pasar Surya dan PD Rumah Potong Hewan adalah sebesar 100%. Sedangkan untuk kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT.Surya Karsa Utama (SKU) adalah sebesar 98,67%. Pada Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Surya Artha Utama(SAU), sesuai akta notaries Kukuh Muljo Rahardjo, SH nomor 108 tanggal 15 Mei 2010, para pemegang sahama PT SKU menyepakati untuk mengalihkan kepemilikan PT SKU pada PT BPR SAU kepada Pemerintah Kota Surabaya senilai Rp2.597.000.000,00 atau 98%. Dengan demikian, pencatatan penilaian investasi Pemerintah kota Surabaya pada PDAM, PD Pasar surya, PD Rumah Potong Hewan, PT SKU dan PT BPR SAU menggunakan Metode Ekuitas karena kepemilikan modalnya diatas 20%

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT Bank Jatim adalah sebesar 3,99%. Sedangkan untuk kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT. BPR Jatim adalah sebesar 0,29%. Sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan modalnya dibawah 20%.

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. SIER sebesar 25%. Sedangkan kepemilikan modal PT Abbatoir Surya Jaya dan PT. STAR masing-masing sebesar 30%. Sehingga investasinya dinilai dengan Metode Ekuitas karena kepemilikannya diatas 20%. Penyertaan pada PT Abbatoir dinilai Rp0,00 karena Ekuitas PT Abbotoir per 31 Desember 2011 bernilai minus, yaitu - Rp5.197.196.822,47.

Jumlah Kepemilikan Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Perusahaan Milik Daerah	31 Desember 2011	31 Desember 2010
i. Perusahaan Milik Daerah			
a.	Investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum	Rp 81.403.538.341,00	Rp 81.403.538.341,00
b.	Investasi pada PD Pasar Surya	Rp 15.993.122.665,00	Rp 15.993.122.665,00
c.	Investasi pada PD Rumah Potong Hewan	Rp 7.045.511.405,00	Rp 7.045.511.405,00
d.	Investasi Pada PT Surya Karsa Utama	Rp 1.250.000.000,00	Rp 3.700.000.000,00

e.	Investasi Pada PT BPR Surya artha Utama (SAU)	Rp	2.597.000.000,00	Rp	0,00
Jumlah 1		Rp	108.289.172.411,00	Rp	108.142.172.411,00
i. Lembaga Keuangan Bank					
a.	Investasi pada PT Bank Jatim	Rp	32.230.000.000,00	Rp	32.230.000.000,00
b.	Investasi pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim	Rp	198.059.000,00	Rp	198.059.000,00
Jumlah 2		Rp	32.428.059.000,00	Rp	32.428.059.000,00
ii. Pihak Ketiga					
a.	Investasi pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Rp	7.500.000.000,00	Rp	7.500.000.000,00
b.	Investasi pada PT Abbatoir Surya Jaya	Rp	900.000.000,00	Rp	900.000.000,00
c.	Investasi PT Sasana Taruna Aneka Ria (STAR)	Rp	249.000.000,00	Rp	249.000.000,00
Jumlah 3		Rp	8.649.000.000,00	Rp	8.649.000.000,00
Jumlah 1+2+3		Rp	149.366.231.411,00	Rp	149.219.231.411,00

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PDAM, PD Pasar Surya dan PD Rumah Potong Hewan sebesar 100% dan kepemilikannya bukan berupa saham. Kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT.Surya Karsa Utama (SKU) sebesar Rp1.250.000.000,00 berupa saham sebanyak 1.250 lembar dengan harga persahamnya sebesar Rp1.000.000,00 dan penyertaan pada PT BPR SAU sebesar Rp2.597.000.000,00 berupa saham sebanyak 2.597 lembar dengan harga Rp1.000.000,00 per lembar sahamnya. Pada awalnya, Pemerintah Kota Surabaya menyetor modal ke PT SKU sebesar Rp3.700.000.000,00 atau 3.700 lembar saham. Pada Tahun 2004, PT SKU menyetor modal kepada PT BPR SAU sebesar Rp2.450.000.000,00 atau 2.450 lembar saham. Pada Tahun 2010, PT SKU mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya di PT BPR SAU (yang semula/Tahun 2004 senilai Rp2.450.000.000,00 atau 2.450 lembar saham dan pada Tahun 2010 telah menjadi 2.597.000.000,00 atau 2.597 lembar saham) kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Lembaga Keuangan Bank adalah dengan Investasi pada PT Bank Jatim dengan total investasi sebesar Rp 32.230.000.000,00 yang berupa kepemilikan saham sebanyak 32.230 lembar harga per sahamnya sebesar Rp1.000.000,00. Sedangkan investasi pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim sebesar Rp198.059.000,00 adalah berupa kepemilikan saham sebanyak 198 lembar yang harga persahamnya sebesar Rp1.000.000,00.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga adalah dengan melakukan Investasi pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT.SIER) sebesar Rp7.500.000.000,00, yang merupakan kepemilikan saham sebanyak 7.500 lembar yang harga per-lembaranya adalah sebesar Rp1.000.000,00.

Sedangkan Investasi kepada PT.Abbatoir Surya Jaya sebesar Rp900.000.000,00 merupakan kepemilikan saham sebanyak 9.000 lembar yang harga persahamnya sebesar Rp100.000,00, sedangkan investasi ke PT.Sasana Taruna Aneka Ria (STAR) sebesar Rp249.000.000,00 merupakan kepemilikan saham sebanyak 1.200 lembar yang harga persahamnya sebesar Rp207.500,00

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
22. Jumlah Investasi Permanen	Rp 906.876.229.753,49	Rp 847.783.346.425,81

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
23. Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp 906.946.038.066,74	Rp 854.879.669.217,91

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
24. ASET TETAP	Rp 31.484.362.969.879,60	Rp30.945.508.393.148,60

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
25. Tanah	Rp 26.362.731.077.482,70	Rp 26.264.228.960.768,70
26. Peralatan dan Mesin	Rp 1.084.161.627.492,50	Rp 903.701.689.744,56
27. Gedung dan Bangunan	Rp 1.794.339.244.299,93	Rp 1.191.343.952.303,81
28. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp 2.194.003.803.452,38	Rp 2.023.749.524.958,52
29. Aset Tetap Lainnya	Rp 34.458.820.629,05	Rp 34.299.615.160,05
30. Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 14.668.396.523,00	Rp 528.184.650.213,00
31. JUMLAH	Rp 31.484.362.969.879,60	Rp 30.945.508.393.148,60

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Tanah	Rp26.362.731.077.482,70	Rp26.264.228.960.768,70

Tanah senilai Rp. 26.362.731.077.482,70 dan Rp.26.264.228.960.768,70 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2011		31 Desember 2010	
- Tanah Kampung	Rp	1.163.390.526.408,37	Rp	1.163.390.526.408,37
- Tanah Kuburan	Rp	89.766.113.841,00	Rp	89.766.113.841,00
- Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	Rp	28.325.250.328,00	Rp	28.325.250.328,00
- Tanah Kebun Campuran Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	Rp	49.709.000,00	Rp	49.709.000,00
- Tanah Hutan Untuk Penggunaan Khusus	Rp	1.853.712.217.710,00	Rp	1.853.712.217.710,00
- Tanah Tambak	Rp	62.910.421.897,00	Rp	62.910.421.897,00
- Tanah Danau	Rp	7.983.704.000,00	Rp	7.983.704.000,00
- Tanah Penggalan	Rp	589.315.441,00	Rp	589.315.441,00
- Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal	Rp	9.585.933.241.145,00	Rp	9.590.902.433.645,00
- Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	Rp	14.353.295.991,50	Rp	14.353.295.991,50
- Tanah Untuk Bangunan Industri	Rp	12.630.000,00	Rp	12.630.000,00
- Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	Rp	1.645.035.468.273,33	Rp	1.640.686.578.059,33
- Tanah Kosong	Rp	59.470.491.708,00	Rp	59.479.491.708,00
- Tanah Bangunan Pengairan	Rp	46.829.180.776,00	Rp	46.829.180.776,00
- Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	Rp	609.962.754.981,50	Rp	609.962.754.981,50
- Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Stren	Rp	2.451.020.595,00	Rp	2.451.020.595,00

dll				
- Tanah Lapangan Olah raga	Rp	246.744.913.949,00	Rp	246.744.913.949,00
- Tanah Lapangan Parkir	Rp	2.162.530.600,00	Rp	2.162.530.600,00
- Tanah Lapangan Penimbun Barang	Rp	376.537.766,00	Rp	376.537.766,00
- Tanah Untuk Bangunan Jalan	Rp	10.621.435.528.142,60	Rp	10.525.313.202.142,60
- Tanah Untuk Bangunan Air	Rp	247.258.166.104,00	Rp	244.249.073.104,00
- Tanah Untuk Bangunan Instalasi	Rp	49.995.942.025,41	Rp	49.995.942.025,41
- Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	Rp	0,00	Rp	0,00
- Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	Rp	23.982.116.800,00	Rp	23.982.116.800,00
JUMLAH	Rp	26.362.731.077.482,70	Rp	26.264.228.960.768,70

Mutasi Tanah tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp	26.264.228.960.768,70
Penambahan Tahun 2011	Rp	103.796.509.214,00
Pengurangan Tahun 2011	Rp	5.294.392.500,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2011	Rp	26.362.731.077.482,70

Penambahan Tanah tahun 2011 sebesar Rp103.796.509.214,00 berasal dari:

- Pengadaan/pembelian selama tahun 2011 sebesar Rp100.486.009.000,00
(Lampiran 9)
- Penambahan selama tahun 2011 sebesar Rp3.310.500.214,00 merupakan koreksi BPK atas pekerjaan pengurukan tanah untuk bangunan kerja dari Dinas Pertanian.

Pengurangan Aset Tanah selama tahun 2011 sebesar Rp 5.294.392.500,00 berasal dari :

- Koreksi penghapusan atas kesalahan pencatatan tanah karena terdapat pencatatan ganda atas tanah yang ditempati kantor inspektorat sebesar Rp.316.200.000,00

- Koreksi penghapusan atas kesalahan pencatatan tanah karena terdapat pencatatan ganda atas tanah yang ditempati kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp.9.000.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Kemitraan) atas tanah senilai Rp4.969.192.500,00 yang digunakan/dikerjasamakan dengan PT Perumnas untuk pembangunan Rumah Susun Warugunung

Dalam tahun 2011 telah selesai disertifikatkan sebanyak 2 bidang tanah yang terletak di Jalan Babatan Pratama dan Jalan Raya Wiyung seluas 43.922 m² terdiri dari 159 sertifikat hak pakai yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengamankan asset dan memperkuat bukti kepemilikan sebagai dasar pencatatan dalam neraca. Upaya sertifikasi ini akan terus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan prioritas pembangunan di lingkungan kota Surabaya.

Daftar permasalahan hukum terkait sengketa tanah yang masih berada dalam proses peradilan sampai dengan 31 Desember 2011 sesuai **lampiran 10**.

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Peralatan dan Mesin	Rp1.084.161.627.492,50	Rp903.701.689.744,56

Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.084.161.627.492,50 dan Rp903.701.689.744,56 merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2011		31 Desember 2010	
- Alat Besar/Berat Darat	Rp	55.307.796.755,35	Rp	50.041.712.078,35
- Alat Besar/Berat Apung	Rp	8.089.200,00	Rp	8.089.200,00
- Alat-alat Bantu	Rp	59.294.891.960,26	Rp	56.818.183.093,26
- Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp	184.672.256.157,47	Rp	161.206.754.560,67
- Alat Angkutan darat Tak Bermotor	Rp	5.110.156.101,75	Rp	3.868.985.501,91
- Alat Angkut Apung Bermotor	Rp	1.384.210.727,20	Rp	881.995.727,20
- Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Rp	1.414.630.270,00	Rp	676.524.014,00

- Alat Bengkel Bermesin	Rp	9.821.830.736,31	Rp	8.689.223.798,18
- Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp	2.408.461.745,77	Rp	2.043.772.936,77
- Alat Ukur	Rp	9.870.189.980,20	Rp	8.730.005.319,20
- Alat Pengolahan	Rp	3.828.025.000,38	Rp	3.459.836.936,40
- Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	Rp	731.834.765,93	Rp	528.692.443,93
- Alat Kantor	Rp	76.961.764.022,12	Rp	43.951.623.808,69
- Alat Rumah Tangga	Rp	161.624.177.641,01	Rp	138.984.231.265,42
- Komputer dan Printer	Rp	196.297.122.218,32	Rp	170.309.642.831,94
- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp	9.288.407.242,47	Rp	8.221.350.651,48
- Alat Studio	Rp	33.318.528.992,88	Rp	27.162.704.791,28
- Alat Komunikasi	Rp	10.852.334.077,27	Rp	9.075.225.983,27
- Peralatan Pemancar	Rp	5.895.574.774,90	Rp	5.142.895.913,90
- Alat kedokteran	Rp	131.219.977.463,50	Rp	96.411.251.065,31
- Alat Kesehatan	Rp	6.246.997.557,09	Rp	5.392.230.008,09
- Alat Unit-unit Laboratorium	Rp	71.965.989.893,12	Rp	65.828.406.976,38
- Alat Peraga/Praktik Sekolah	Rp	28.211.039.160,08	Rp	21.339.338.790,71
- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp	552.690.186,60	Rp	474.914.529,60
- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp	2.224.450.402,35	Rp	2.217.605.403,45
- Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp	3.929.099.964,00	Rp	3.923.150.232,00
- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Rp	2.493.780.024,49	Rp	1.109.975.025,49
- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	7.584.383.000,99	Rp	5.719.362.664,99
- Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Rp	1.570.163.420,69	Rp	1.411.200.142,69
- Senjata Api	Rp	4.250.000,00	Rp	4.250.000,00
- Persenjataan Non Senjata Api	Rp	68.554.050,00	Rp	68.554.050,00
JUMLAH	Rp	1.084.161.627.492,50	Rp	903.701.689.744,56

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp	903.701.689.744,56
Penambahan tahun 2011	Rp	193.229.550.447,81
Pengurangan tahun 2011	Rp	12.769.612.699,87
Saldo Akhir per 31 Desember 2011	Rp	1.084.161.627.492,50

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2011 sebesar Rp193.229.550.447,81 berasal dari:

- Pengadaan/pembelian selama tahun 2011 sebesar Rp189.437.069.086,82 **(lampiran 11)**. Terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sendiri selama tahun 2011 sebesar Rp179.104.771.991,00 **(lampiran 11a)** dan belanja diluar belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp10.332.297.095,82 setelah melalui proses verifikasi dari Bendahara barang SKPD dan Bagian Perlengkapan.
- Penerimaan hibah dari pihak ketiga selama tahun 2011 sebesar Rp.896.482.000,00 **(lampiran 12)**
- Penambahan lainnya tahun 2011 sebesar Rp 2.895.998.863,00 antara lain
 - Adanya koreksi nilai tambah asset tetap peralatan mesin atas pencatatan Rp.1,00 sebesar Rp 1.120.865.267,00 **(lampiran 13)**
 - kegiatan inventarisasi internal SKPD atas barang inventaris yang belum tercatat sebesar Rp.1.769.933.596,00 **(lampiran 14)**
 - Pencatatan penggantian kehilangan barang daerah berupa kendaraan bermotor sebesar Rp.5.200.000,00
- Koreksi penyesuaian nilai saldo awal karena pembulatan sebesar Rp.497,99

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2011 sebesar Rp12.293.912.425,85 berasal dari:

- Hibah kepada pihak ketiga selama tahun 2011 sebesar Rp1.222.123.979,69. **(lampiran 15)**
- Penghapusan barang inventaris berupa kendaraan bermotor roda dua (No. 188.45/583/436.1.2/2011 tanggal 9 Nopember 2011) sebesar Rp2.782.379.946,00 **(lampiran 16)**
- Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin menjadi aset lainnya dalam rangka pinjam pakai kendaraan bermotor sebesar Rp.7.559.203.846,16
- Pengurangan lainnya selama tahun 2011 sebesar Rp730.204.654,00 antara lain

- Koreksi hapus (terdapat pencatatan ganda) sebesar Rp704.251.654,00 (**lampiran 17**)
- Koreksi hapus (hilang) berupa sepeda motor dengan nilai sebesar sebesar Rp25.953.000,00
- Koreksi asset tetap pada Dinas Pendidikan yang dicatat terlalu tinggi pada saat penilaian asset senilai Rp9.630.274,00 yang sebelumnya bernilai Rp 1,00
- Koreksi asset tetap pada Disperindag yang dihapus sesuai SK no 188.45/22/436.1.2/2011 senilai Rp466.730.000,00 atas pemberian hibah namun belum dihapus dari simbada.

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp1.794.339.244.299,93	Rp1.191.343.952.303,81

Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.794.339.244.299,93 dan Rp1.191.343.952.303,81 merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2011		31 Desember 2010	
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp	1.696.154.387.012,71	Rp	1.108.599.878.618,84
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp	30.238.712.512,10	Rp	26.938.312.679,00
- Bangunan Menara	Rp	797.138.873,02	Rp	708,377.677,02
- Bangunan bersejarah	Rp	670.447.477,00	Rp	638.592.122,00
- Tugu peringatan /Prasasti	Rp	8.671.597.151,00	Rp	8.671.597.151,00
- Tugu peringatan	Rp	316.282.522,40	Rp	227.540.799,00
- Tugu Titik Kontrol/Pasti/Tanda Batas	Rp	17.879.212.108,62	Rp	16.460.974.983,62
- Rambu-rambu	Rp	21.617.013.724,50	Rp	18.662.482.706,50
- Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Rp	1.218.524.306,75	Rp	104.806.500,00
- Sarana Prasarana Taman	Rp	15.811.964.344,29	Rp	10.227.588.452,29
- Sarana Prasarana Pemakaman	Rp	963.964.267,54	Rp	103.800.614,54
JUMLAH	Rp	1.794.339.244.299,93	Rp	1.191.343.952.303,81

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp 1.191.343.952.303,81
Penambahan tahun 2011	Rp 613.985.067.493,27
Pengurangan tahun 2011	Rp 10.989.775.497,15
Saldo Akhir per 31 Desember 2011	<u>Rp 1.794.339.244.299,93</u>

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2011 sebesar Rp 613.985.067.493,27 berasal dari:

- Pengadaan tahun 2011 sebesar Rp147.900.596.441.02 (**lampiran 18**)
Belanja modal gedung dan bangunan selama tahun 2011 sebesar Rp157.938.496.455,00 (**lampiran 18a**) namun setelah melalui proses verifikasi dari Bendahara barang SKPD dan Bagian Perlengkapan maka yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp147.900.596.441.02 sesuai terlampir.
- Penerimaan mutasi/pelunasan BDP asset tetap tahun 2010, sebesar Rp458.225.965.938,00 yaitu Stadion di Wilayah Surabaya Barat sebesar Rp. 450.927.097.274,00 dan Pembangunan gedung SDN, SMPN dan SMAN sebesar Rp. 7.298.868.664,00
- Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga berupa ruang layanan public berbasis teknologi informasi, sebesar Rp171.182.832,00
- Penambahan lainnya selama tahun 2011 sebesar Rp3.136.726.054,25 terdiri dari :
 - Koreksi nilai tambah asset tetap tercatat Rp1,00 sebesar Rp283.472.184,25 (**lampiran 19**)
 - Inventarisasi internal SKPD, sebesar Rp2.853.253.870,00 (**lampiran 20**)
 - Koreksi atas KDP yang direklasifikasi menjadi asset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang senilai Rp16.910.343.005,00

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2011 sebesar Rp13.703.894.135,15 berasal dari :

- Penghapusan asset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.200.537.900,00, berdasar Keputusan Walikota Surabaya No 188.45/81/436.1.2/2011 tanggal 31 Maret 2011 (**lampiran 21**)

- Pengurangan lainnya selama tahun 2011, Rp2.891.400.000,00 disebabkan adanya koreksi hapus (**lampiran 22**)
- Koreksi penyesuaian nilai saldo awal karena pembulatan sebesar Rp167.15
- Koreksi atas reklasifikasi bangunan gedung tempat kerja yang belum selesai dicatat sebagai aset tetap Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang senilai Rp5.022.768.384,00
- Koreksi atas aset tetap pada Dinas Bina Marga dan Pematuan yang dihapus sesuai SK no.188.45/377/436.1.2/2011 namun belum dihapus dari simbada senilai Rp.156.351.000,00
- Koreksi atas aset tetap pada Dinas Pendidikan yang dihapus sesuai SK no.188.45/374/436.1.2/2011 senilai Rp.5.241.024.584,00 namun yang dihapus dari simbada senilai Rp.4.808.187.900,00

Jalan, Jaringan, dan Instalasi sebesar Rp. 2.194.003.803.452,38 dan Rp.2.023.749.524.958,52 merupakan nilai jalan, jaringan dan instalasi per 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut:

U R A I A N	31 Desember 2011		31 Desember 2010	
- Jalan	Rp	1.050.675.159.439,26	Rp	1.003.429.507.608,20
- Jembatan	Rp	171.669.281.712,29	Rp	170.832.483.133,19
- Bangunan Air Irigasi	Rp	88.423.063.447,00	Rp	88.423.063.447,00
- Bangunan Air Pasang Surut	Rp	44.520.624.205,00	Rp	44.159.222.157,00
- Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	Rp	12.304.544.061,10	Rp	12.255.827.599,10
- Bangunan Air Pengaman Sungai dan Penanggulangan bencana alam	Rp	527.589.477.095,80	Rp	475.758.393.197,00
- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Rp	4.755.144.459,10	Rp	3.709.202.525,80
- Bangunan Air Bersih /Air Baku	Rp	4.259.989.552,56	Rp	4.044.635.165,96
- Bangunan Air Kotor	Rp	41.442.039.219,70	Rp	39.058.006.354,70
- Bangunan Air	Rp	588.807.139,00	Rp	588.807.139,00
- Instalasi Air Minum /Air Bersih	Rp	10.906.529.245,00	Rp	9.193.058.092,00
- Instalasi Air Kotor	Rp	8.526.770.424,20	Rp	8.526.770.424,20

- Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Rp	14.726.060.208,00	Rp	16.493.496.234,00
- Instalasi Pembangkit Listrik	Rp	343.579.250,00	Rp	276.768.000,00
- Instalasi Gardu Listrik	Rp	3.429.941.961,60	Rp	3.423.766.500,60
- Instalasi Gas	Rp	1.446.576.186,50	Rp	1.446.576.186,50
- Instalasi Pengaman	Rp	31.380.000,00	Rp	31.380.000,00
- Jaringan Air Minum	Rp	4.858.369.883,00		4.677.960.130,00
- Jaringan Listrik	Rp	202.120.635.481,87	Rp	186.035.530.577,87
- Jaringan Telepon	Rp	61.789.001,00	Rp	61.029.003,00
- Jaringan Gas	Rp	1.324.041.480,40	Rp	1.324.041.480,40
JUMLAH	Rp	2.194.003.803.452,38	Rp	2.023.749.524.958,52

Mutasi Jalan, Jaringan, dan Instalasi tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp	2.023.749.524.958,52
Penambahan tahun 2011	Rp	172.071.918.505,34
Pengurangan tahun 2011	Rp	1.817.640.011,48
Saldo Akhir per 31 Desember 2011	Rp	<u>2.194.003.803.452,38</u>

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Instalasi sebesar Rp. 172.071.918.505,34 berasal dari:

- Pengadaan tahun 2011 sebesar Rp102.103.528.895,34 **(lampiran 23)**
- Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi selama tahun 2011 sebesar Rp102.454.759.850,00 **(lampiran 23a)** namun setelah melalui proses verifikasi dari Bendahara barang SKPD dan Bagian Perlengkapan maka yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap Jalan, Jaringan, dan Instalasi sebesar Rp102.103.528.895,34 sesuai terlampir
- Penerimaan mutasi/pelunasan BDP asset tetap tahun 2010, sebesar Rp69.958.684.275,00
- Penambahan lainnya selama tahun 2011, sebesar Rp9.705.335,00 dikarenakan adanya koreksi nilai tambah asset tetap tercatat Rp1,00. **(lampiran 24)**

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi sebesar Rp.1.817.640.011,48 berasal dari :

- Penghapusan nilai incinerator sebesar Rp.1.817.640.000,00 (Kep. Walikota No. 188.45/45/436.1.2/2010) tanggal 13 April 2011.
- Koreksi penyesuaian nilai saldo awal karena pembulatan sebesar Rp11,48

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 34.458.820.629,05 dan Rp.34.299.615.160,05 merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
- Buku	Rp 28.755.063.089,76	Rp 28.695.750.239,76
- Terbitan Berkala	Rp 232.095.658,00	Rp 232.095.658,00
- Barang-barang Perpustakaan	Rp 734.463.473,00	Rp 730.479.568,00
- Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 3.262.144.905,83	Rp 3.152.582.018,83
- Alat Olahraga Lainnya	Rp 372.968.476,96	Rp 273.831.758,96
- Hewan dan Ternak	Rp 35.305.760,70	Rp 71.675.295,70
- Tanaman	Rp 1.066.779.264,80	Rp 1.143.200.620,80
JUMLAH	Rp 34.458.820.629,05	Rp 34.299.615.160,05

Mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp	34.299.615.160,05
Penambahan tahun 2011	Rp	285.590.090,00
Pengurangan tahun 2011	Rp	126.384.621,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2011	Rp	34.458.820.629,05

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.285.590.090,00 merupakan :

- Pengadaan tahun 2011 sebesar Rp233.758.315,00 (**lampiran 25**)
Belanja modal Aset Tetap Lainnya selama tahun 2011 sebesar Rp1.602.454.313,00 (**lampiran 25a**) namun setelah melalui proses verifikasi dari Bendahara barang SKPD dan Bagian Perlengkapan maka yang bisa diklasifikasikan menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp233.758.315,00 sesuai terlampir

- Penambahan lainnya selama tahun 2011 dikarenakan terdapat koreksi nilai tambah atas pencatatan aset tetap Rp1,00 sebesar Rp51.831.775,00 **(lampiran 26)**

Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 116.165.621,00 **(lampiran 27)** berasal dari :

- Penghapusan barang inventaris berupa pohon/tanaman (Kep. Walikota No 188.45/378/436.1.2/2011) sebesar Rp113.502.356,00
- Penghapusan barang inventaris berupa peralatan olahraga (Kep. Walikota No 188.45/415/436.1.2/2010), sebesar Rp2.663.265,00
- Koreksi atas aset tetap pada Dinas Pertanian yang dihapus sesuai SK no.188.45/378/436.1.2/2011 senilai Rp.123.721.356,00 namun yang dihapus dari simbada senilai Rp.113.502.356,00

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp14.668.396.523,00 dan Rp528.184.650.213,00 merupakan pelaksanaan pekerjaan yang pengerjaannya per 31 Desember 2011 dan 2010 belum selesai dan belum siap dipakai. Rincian menurut jenis kegiatan adalah sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2011		31 Desember 2010	
- Pembangunan Stadion di Wilayah Surabaya Barat (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	Rp	0,00	Rp	450.927.097.274,00
- Pekerjaan Pembangunan gedung SDN, SMPN dan SMAN (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang) (Lampiran 28)	Rp	14.668.396.523,00	Rp	7.298.868.664,00
- Pekerjaan box culvert dan rumah pompa (Dinas Bina Marga)	Rp	0,00	Rp	69.958.684.275,00
JUMLAH	Rp	14.668.396.523,00	Rp	528.184.650.213,00

32. ASET LAINNYA	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 174.674.961.245,96	Rp172.562.397.101,43

Berikut adalah saldo aset lain-lain per 31 Desember 2011 dan 2010 yang terdiri dari :

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
33. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR)	Rp 0,00	Rp 281.566.000,00
34. Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp 140.005.452.346,16	Rp 137.821.956.000,00
35. Aset Tak Berwujud	Rp 3.795.515.975,80	2.307.010.239,78
36. Aset Lain-lain	Rp 30.873.992.924,00	Rp 32.151.864.861,65
37. Jumlah Aset Lainnya	Rp 174.674.961.245,96	Rp 172.562.397.101,43

Mutasi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp 281.566.000,00
Penambahan tahun 2011	Rp 0,00
Pengurangan tahun 2011	Rp 281.566.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2011	Rp 0,00

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang bahwa piutang ganti rugi yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketetapan penyelesaian yang telah ditetapkan disajikan sebagai aset lancar. Dari saldo awal Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) sebesar Rp.281.566.000,00 dikoreksi masuk sebagai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.

Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar Rp. 140.005.452.346,16 dan Rp 137.821.956.000,00 terdiri dari :

▪ Bangun, Kelola, Serah (BKS)	Rp 89.965.301.000,00	Rp 89.965.301.000,00
▪ Bangun, Serah, Kelola	Rp 4.969.192.500,00	Rp 9.900.000.000,00

(BSK)				
▪ Kerjasama Operasi (KSO)	Rp	33.363.395.000,00	Rp	33.363.395.000,00
▪ Pinjam Pakai	Rp	11.707.563.846,16	Rp	4.593.260.000,00
Jumlah	Rp	140.005.452.346,16	Rp	137.821.956.000,00

Bangun, Kelola, Serah (BKS) per 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar Rp89.965.301.000,00 dan Rp89.965.301.000,00 dapat dirinci sebagai berikut :

• Tempat Usaha Jl. Kusuma bangsa No. 116 Surabaya Perjanjian No. 511.3/953/402.1.02/1989 tanggal 7 April 1989 dengan PT Sasana Boga Berlaku 30 tahun sejak pembangunan selesai Seluruh BKS didanai dari pihak ketiga	Rp	13.490.000.000,00	Rp	13.490.000.000,00
• Pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi (Jl. Pasar Turi 21). Sesuai perjanjian kerjasama tgl 9-3-2010 No 180/1096/436.1.2/2010 dengan PT. Gala Bumi Perkasa. Berlaku 25 tahun sejak penyerahan obyek berupa tanah. Seluruh BKS didanai dari pihak ketiga. Dari aset tanah seluas 43.800 m2 senilai Rp 121.720.200.000, yang merupakan milik Pemerintah Kota Surabaya adalah 27.519 m2 bila dinilai secara proporsional sebesar Rp 76.475.301.000,00.	Rp	76.475.301.000,00	Rp	76.475.301.000,00
Jumlah	Rp	89.965.301.000,00	Rp	89.965.301.000,00

Bangun, Serah, Kelola (BSK) per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.969.192.500,00 merupakan tanah Pemkot Surabaya yang disertakan dalam kerjasama pembangunan Rumah Susun di Lokasi Warugunung Kecamatan Karangpilang, sesuai perjanjian dengan Perum Perumnas No. 648.21.1412.1/402.601/97 dan No. Dirut/507/22/V/97 tanggal 9 Mei 1997 dan berakhir sampai dengan Pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan pengembalian investasi tersebut. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Bangunan merupakan milik Perum Perumnas sampai dengan Pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan pengembalian investasi tersebut.

Kerjasama Operasi (KSO) per 31 Desember 2011 sebesar Rp33.363.395.000,00 merupakan Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah (Incenerator), perjanjian dengan PT Unicomindo Perdana No. 658.1/11/402.1.02/1989 tanggal 26 Juli 1989 yang berlaku selama 9 tahun, sebagaimana telah diadendum dengan kontrak no 658.1/11/402.1.01/1989 tanggal 16 Nopember 1989 yang berlaku selama 8 tahun. Saat ini Incenerator tersebut dalam kondisi rusak dan sudah tidak difungsikan serta belum ada penyelesaian pembayaran selisih kurs, angsuran pokok serta beban biaya operasional dan pemeliharaan antara PT. Unicomindo dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Pinjam Pakai per 31 Desember 2011 sebesar Rp11.707.563.846,16 merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya yang dipergunakan oleh Pihak Ketiga. **(Lampiran 29)**. Dari jumlah tersebut yang merupakan penambahan dari hasil reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin menjadi aset lainnya dalam rangka pinjam pakai kendaraan bermotor sebesar Rp.7.559.203.846,16 dan pengurangan sebesar Rp Rp444.900.000,00 **(lampiran 30)** yang merupakan koreksi hapus.

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Aset Tak Berwujud	Rp3.795.515.975,80	Rp2.307.010.239,78

Aset Tak Berwujud senilai Rp3.795.515.975,80 dan Rp2.307.010.239,78 merupakan nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut:

▪ Perangkat Lunak/software	Rp 3.795.515.975,80	Rp 2.307.010.239,78
Jumlah	Rp 3.795.515.975,80	Rp 2.307.010.239,78

Mutasi Aset Tak Berwujud tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp 2.307.010.239,78
Penambahan Tahun 2011	Rp 1.488.505.736,02
Pengurangan Tahun 2011	Rp 0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2011	Rp 3.795.515.975,80

Penambahan Aset Tak Berwujud tahun 2011 sebesar Rp1.488.505.736,02 berasal dari:

- Pengadaan/pembelian selama tahun 2010 sebesar Rp1.488.505.736,02 **(Lampiran 31)**

- Belanja modal asset tak berwujud sendiri selama tahun 2011 sebesar Rp.1.525.154.380,00 (**Lampiran 31a**) namun setelah melalui proses verifikasi dari bendahara barang SKPD dan Bagian Perlengkapan yang bisa dimasukkan menjadi asset tak berwujud sebesar Rp.1.488.505.736,02 sesuai terlampir.

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Aset Lain-lain	Rp30.873.992.924,00	Rp p32.151.864.861,65

Aset lain – lain per 31 Desember 2011 dan 2010 mempunyai saldo sebesar Rp30.873.992.924,00 dan Rp.32.151.864.861,65 dengan perincian sebagai berikut:

		31 Desember 2011		31 Desember 2010
▪ Piutang Banpol Bakesbang Linmas	Rp	645.000.000,00	Rp	645.000.000,00
▪ Inventaris yang akan dihapus – Bagian Perlengkapan	Rp	139.644.979,00	Rp	1.379.516.916,65
▪ Pembayaran dana bergulir – Dinas Koperasi	Rp	4.000.000,00	Rp	42.000.000,00
▪ Penyertaan Modal PDAM	Rp	30.085.347.945,00	Rp	30.085.347.945,00
Jumlah	Rp	30.873.992.924,00	Rp	32.151.864.861,65

Aset lain-lain berupa piutang Banpol dari Bakesbang Linmas sebesar Rp 645.000.000,00 yang disita dan menjadi barang bukti di Kejaksaan Negeri Surabaya sesuai surat No.24/O.5.10.4/Fd.1/05/2007 tanggal 9 Mei 2007 sebesar Rp445.000.000,00 dan dua penyetoran tanggal 10 Juli 2007 dengan total sebesar Rp200.000.000,00.

Realisasi penghapusan atas inventaris tahun 2010 yang akan dihapus sebesar Rp.1.379.516.916,65 (**Lampiran 32**). Sedang untuk penambahan sebesar Rp139.644.979,00 merupakan Koreksi BPK atas aset tetap pada Dinas Pertanian yang dihapus sesuai SK no.188.45/373/436.1.2/2011 senilai Rp.1.010.869.786,00 namun yang dihapus dari simbada senilai Rp.1.124.460.916,59 dan Koreksi BPK atas aset tetap pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah dihapus senilai Rp46.325.115,00 namun belum ada SK penghapusan.

Aset lain-lain berkurang sebesar Rp.38.000.000,00 karena sudah ditransfer ke rekening kas umum daerah sehingga masih ada saldo sebesar Rp 4.000.000,00 dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan

pembayaran bantuan modal dana bergulir yang salah masuk rekening Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur.

Aset lain-lain sebesar Rp30.085.347.945,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Pemerintah Kota Surabaya untuk penyertaan modal kepada PDAM, tetapi karena Perda untuk penyertaan modal masih dalam proses penyusunan maka dicatat dalam Aset Lainnya.

38. Jumlah Aset **Rp 33.441.086.637.721,40 Rp 32.621.984.273.970,00**

39. Kewajiban	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp91.330.068.751,76	Rp135.315.756.898,63

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek (Kewajiban lancar) dan Kewajiban jangka panjang .

Pemerintah Kota Surabaya Per 31 Desember 2011 mempunyai kewajiban sebesar Rp.91.330.068.751,76 yang terdiri dari:

- a) Kewajiban jangka pendek sebesar Rp.69.408.572.102,76;
- b) Kewajiban jangka panjang sebesar Rp.21.921.496.649,00.

40. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp69.408.572.102,76	Rp102.433.511.923,63

Kewajiban jangka pendek secara komparatif rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp 25.312.504.952,00	Rp 43.658.902.738,61
(2) Utang Bunga	Rp 507.208.628,76	Rp 856.144.051,71
(3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp 10.960.748.326,00	Rp 10.960.748.326,00
(4) Utang Jangka Pendek lainnya	Rp 32.628.110.196,00	Rp 46.957.716.807,31
Jumlah	Rp 69.408.572.102,76	Rp 102.433.511.923,63

41. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 25.312.504.952,00	Rp 43.658.902.738,61

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tersebut di atas dirinci sebagai berikut :

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
▪ Titipan Pihak Ketiga	Rp 25.017.839.440,00	Rp 32.724.659.603,61
▪ Utang pajak di Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp 294.665.512,00	Rp 1.155.373.552,00
▪ Utang Pajak BUD	Rp 0,00	Rp 9.778.869.583,00
Jumlah	Rp 25.312.504.952,00	Rp 43.658.902.738,61

Titipan Pihak Ketiga di BUD sebesar **Rp 25.017.839.440,00** terdiri dari :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2011 (Rp)
1	Bongkar reklame	20.622.548.656,00
2	Rusun Waru Gunung	3.972.784,00
3	Partisipasi pengelolaan kebun bibit	160.000.000,00
4	Pelepasan tanah Jalan Kenari	4.231.318.000,00
	Jumlah	25.017.839.440,00

Utang pajak di Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pajak yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sampai dengan 31 Desember 2011 yaitu sebesar Rp 294.665.512,00, dan pajak tersebut telah disetor di tahun 2012, dengan rincian SKPD :

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	3.170.250,00
2	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	291.495.262,00
	JUMLAH	294.665.512,00

42. Utang Bunga	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 507.208.628,76	Rp 856.144.051,71

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Bunga per 31 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut :

Dasar perhitungan Utang Bunga	Jangka Waktu Perhitungan	Jumlah
Berita Acara Rekonsiliasi No 226/PB.4.1// 0310 tgl 4 Maret 2010 atas Utang Pemerintah Pusat PPP SLA-764/DP3/1994 Loan IBRD 3726-IND Tanggal 9 September 1994	15 Sep – 31 Des 2011	Rp 507.208.628,76
J u m l a h		Rp 507.208.628,76

Mutasi Utang Bunga Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp	856.144.051,71
Penambahan Tahun 2011	Rp	507.208.628,76
Pengurangan Tahun 2011	Rp	856.144.051,71
Saldo Akhir per 31 Desember 2011	Rp	507.208.628,76

Penambahan Utang Bunga selama tahun 2011 sebesar Rp507.208.628,76 terdiri dari :

- Perhitungan bunga terutang periode 15 September 2011 – 31 Desember 2011	Rp	507.208.628,76
Jumlah	Rp	507.208.628,76

43. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 10.960.748.326,00	Rp 10.960.748.326,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut :

Nomor dan Tgl. Pinjaman	Jatuh tempo	Jumlah
Utang Pemerintah Pusat PPP SLA-764/DP3/1994 Loan IBRD 3726-IND Tanggal 9 Setember 1994	15-03-2012	Rp 5.480.374.163,00
	15-09-2012	Rp 5.480.374.163,00
J u m l a h		Rp 10.960.748.326,00

Mutasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp	10.960.748.326,00
Penambahan Tahun 2011	Rp	10.960.748.326,00
Pengurangan Tahun 2011	Rp	10.960.748.326,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2011	Rp	10.960.748.326,00

Penambahan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang selama tahun 2011 sebesar Rp10.960.748.326,00 terdiri dari :

- Reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp	10.960.748.326,00
Jumlah	Rp	10.960.748.326,00

Pengurangan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang selama tahun 2011 sebesar Rp 10.960.748.326,00 terdiri atas:

- Pembayaran pokok pinjaman Utang Pemerintah Pusat Loan IBRD 3726-IND PPP SLA-764/DP3/1994	Rp	10.960.748.326,00
Jumlah	Rp	10.960.748.326,00

44. Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 32.628.110.196,00	Rp 46.957.716.807,31

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar Rp. 32.628.110.196,00 dan Rp 46.957.716.807,31 terdiri dari :

▪ Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp	8.838.568.039,00	Rp	22.824.975.751,39
▪ Utang Pemerintah Pusat Inpres No 15/ 1979	Rp	10.238.900,00	Rp	10.238.900,00
▪ Kewajiban utang pokok termijn 15 dan 16 yang belum dibayar sesuai Surat dari PT Unicomindo Nomor : 641/UP/I/2004 tanggal 5 Januari 2004	Rp	3.336.339.500,00	Rp	3.336.339.500,00
▪ Kewajiban akibat beda kurs atas pembayaran termijn 13, 14, 15 dan 16	Rp	15.769.789.528,00	Rp	15.769.789.528,00
▪ Bagi hasil retribusi terminal Purabaya bag Kab Sidoarjo	Rp	4.673.174.229,00	Rp	3.190.280.754,00
▪ Kewajiban BLU RSUD dr. Soewandi	Rp	0,00	Rp	1.826.092.373,92
Jumlah	Rp	32.628.110.196,00	Rp	46.957.716.807,31

Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 8.838.568.039,00 merupakan utang yang timbul sebagai akibat adanya belanja dengan pihak ketiga yang sampai dengan 31 Desember 2011 belum dibayar oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Mutasi Utang Kepada Pihak Ketiga selama tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp	22.824.975.751,39
Penambahan tahun 2011	Rp	8.043.630.344,00
Pengurangan tahun 2011	Rp	22.030.038.056,39
Saldo Akhir per 31 Desember 2011	Rp	8.838.568.039,00

Utang kepada Pihak Ketiga tersebut terdiri dari :

		31 Desember 2011		31 Desember 2010
▪ Utang Belanja atas tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru (Dinas Pendidikan)	Rp	3.008.019.002,00	Rp	156.768.500,00
▪ Utang Belanja atas pekerjaan yang belum diselesaikan pembayarannya (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	Rp	960.540.102,00	Rp	1.094.876.822,00
▪ Utang jasa bank Bulan Januari-Desember 2011 (Dinas Koperasi dan UMKM)	Rp	46.845.055,00	Rp	0,00
▪ Utang pembelian obat dan alat kesehatan (RSUD dr Soewandhie)	Rp	0,00	Rp	536.752.830,00
▪ Utang pelayanan jamkesmas dan askes (RSUD dr Soewandhie)	Rp	1.205.675.080,00		2.833.404.942,00
▪ Utang klaim jamkesmas non kuota (Dinas Kesehatan)	Rp	3.617.488.800,00	Rp	18.180.672.657,39
▪ Utang uang makan karyawan (RSUD Bhakti Dharma Husada)	Rp	0,00	Rp	22.500.000,00
Jumlah	Rp	8.838.568.039,00	Rp	22.824.975.751,39

Penambahan utang kepada Pihak Ketiga tahun 2011 sebesar Rp 8.061.566.017,00 antara lain berasal dari :

- Utang belanja atas tambahan penghasilan guru PNSD Tahun Anggaran 2011 yang belum terbayar sebesar Rp.1.891.212.882,00. Disamping itu juga terdapat utang belanja atas tunjangan profesi guru PNSD Tahun Anggaran 2011 yang juga belum terbayar sebesar Rp.1.116.806.120,00. Total utang belanja sebesar Rp.3.008.019.002,00.
- Terdapat penambahan Utang belanja atas pekerjaan yang belum diselesaikan tahun 2011 sebesar Rp.183.538.080 dan pengurangan atas dasar koreksi BPK untuk utang kepada PT Royan Jaya yang sebelumnya Rp195.498.826,00

menjadi Rp177.563.153,00 sehingga total utang belanja sebesar Rp 960.540.102,00 (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang) terdiri atas :

1.	PT. Daya Guna Permata	Rp	143.386.035,00
2.	PT. Rukun Jaya Madura Group	Rp	147.980.587,00
3.	PT. Rukun Jaya Madura Group	Rp	187.473.089,00
4.	CV. Endah Elok Energi	Rp	78.667.680,00
5.	PT. Royan Jaya	Rp	177.563.153,00
6.	PT. Surya Unggul Nusa Cons	Rp	25.261.827,00
7.	PT. Surya Unggul Nusa Cons	Rp	16.669.651,00
8.	CV. Tirta Buana	Rp	49.670.775,00
9.	CV. Dinamika Raya	Rp	49.644.705,00
10.	CV. Dinamika Raya	Rp	34.589.500,00
11.	PT. Delta Buana	Rp	<u>49.633.100,00</u>
	Jumlah	Rp	960.540.102,00

- Utang jasa bank Dinas Koperasi bulan Januari sampai dengan Desember 2011 yang harus dibayar kepada BPD Jatim sebesar Rp.46.845.055,00
- Utang RSUD dr Soewandhie berupa utang pelayanan jamkesmas selama bulan November dan Desember tahun 2011 sebesar Rp.1.205.675.080,00.
- Utang klaim jamkesmas non kuota Dinas Kesehatan dengan perincian sebagai berikut :

-	RSUD dr. Soetomo	Rp	2.718.299.000,00
-	RSJ Lawang	Rp	28.514.600,00
-	BKMM	Rp	53.959.200,00
-	RSI A Yani	Rp	26.958.000,00
-	Al Irsyad	Rp	111.389.400,00
-	Darus Syifa	Rp	26.331.200,00
-	RSI Jemursari	Rp	82.585.500,00
-	RS Mata Undaan	Rp	72.166.700,00
-	RS Brawijaya	Rp	23.379.200,00
-	Karang Tembok / BP 4	Rp	115.343.500,00
-	Bhakti Rahayu	Rp	3.363.200,00

-	RS Jiwa Menur	Rp	67.223.700,00
-	RSU Haji Surabaya	Rp	<u>287.975.600,00</u>
	Jumlah	Rp	3.617.488.800,00

Pengurangan utang kepada Pihak Ketiga tahun 2011 sebesar Rp 22.030.038.056,39 antara lain berasal dari :

- Pelunasan utang belanja atas tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru PNSD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.156.768.500,00.
- Pelunasan Utang belanja atas pekerjaan yang belum diselesaikan tahun 2010 sebesar Rp.299.939.127,00 yang terdiri atas :

-	CV. Artha Lestari	Rp	49.419.905,00
-	CV. Ardhi Graha	Rp	33.681.322,00
-	CV. Prima Cipta Consultant	Rp	42.337.900,00
-	PT. Isoplan	Rp	<u>174.500.000,00</u>
	Jumlah	Rp	299.939.127,00

- Pelunasan utang RSUD dr Soewandhie berupa utang pembelian obat dan alat kesehatan RSUD dr Soewandhie sebesar Rp536.752.830,00 selama tahun 2010 serta utang pelayanan askes dan jamkesmas selama tahun 2010 sebesar Rp 2.833.404.942,00.
- Pelunasan utang klaim jamkesmas non kuota Dinas Kesehatan sebesar Rp. 18.180.672.657,39
- Pelunasan utang atas uang makan karyawan/wati RSUD Bhakti Dharma Husada yang sebesar Rp. 22.500.000,00.

Utang Pemerintah Pusat sesuai Inpres No.15/1979 sebesar Rp 10.238.900,00 merupakan utang yang digunakan untuk membangun Pasar Blauran.

Utang Belanja Kepada PT Unicomindo Perdana sebesar Rp3.336.339.500,00 merupakan kewajiban utang pokok termijn 15 dan 16 yang belum dibayar sesuai Surat dari PT Unicomindo Nomor : 641/UP/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 perihal Laporan Posisi Kewajiban Pemerintah Kota Surabaya dan Perkembangan Keadaan Pabrik Pembakaran Sampah di Sukolilo Surabaya.

Hutang ini timbul sebagai akibat adanya Perjanjian/Kontrak antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. UNICOMINDO PERDANA Nomor 658.1/11/402.1.02/1989 tanggal 26 Juli 1989 tentang Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen

dalam rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah dan telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Surat Keputusan Nomor 658.1-676 tanggal 2 September 1989. Terhadap Kontrak diatas telah diadakan Addendum Nomor 658.1/34/402.01.02/1989 tanggal 16 Nopember 1989 jo 658.1/14/402.1.02/94 tanggal 7 Maret 1994.

Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 81/Pdt.6/2011 PN. Sby tanggal 13 September 2011 mewajibkan Pemerintah Kota Surabaya untuk membayar kerugian yang diminta oleh PT. UNICOMINDO PERDANA atas kerugian materiil sebesar Rp4.137.060.980,00, dengan rincian Pembayaran termijn 15 dan 16 sebesar Rp3.336.339.500,00 dan beban bunga (moratorium) sebesar 6% per tahun atas keterlambatan pemenuhan setoran hasil usaha ke 15 dan 16 sebesar Rp800.721.480,00. Atas putusan PN Surabaya tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan banding, dan sampai dengan. 6 Mei 2012 belum ada keputusan hukum yang berlaku tetap (inkrah) atas hal tersebut.

Kewajiban akibat beda Kurs sebesar Rp 15.769.789.528,00 dihitung berdasarkan kurs Rp 6.250 / US\$ sesuai Surat Mendagri Nomor : 658.1/183/PUMDA tanggal 18 April 2000 tentang kesepakatan mengenai nilai kurs yang digunakan untuk menghitung kewajiban beda kurs atas sisa pembayaran (termijn 13, 14, 15 dan 16) dan Surat dari PT. Unicomindo kepada Pemerintah Kota Surabaya Nomor SP.10.05.01.2000 tanggal 10 Mei 2000, tentang Permohonan Pembayaran Biaya Beda Kurs termijn 13,14, 15 dan 16 Pabrik Pembakaran Sampah di Sukolilo Surabaya.

Pada tanggal 01 November 2011, PT Unicomindo mengajukan gugatan sebesar Rp133.075.549.248,00 (terdiri dari piutang Rp137.212.610.228,00 dikurangi Rp4.137.060.980,00 yang diajukan gugatan dengan No. 81/Pdt.G/2011/PN.SBY) kepada Ketua PN Surabaya atas kewajiban yang belum terpenuhi sekaligus dampak kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota Surabaya, terdiri dari Setoran Hasil Usaha (SHU) ke 15 dan 16, serta beda kurs termin SHU ke 13, 14, 15 dan 16. Atas gugatan PT Unicomindo tersebut, sudah ada putusan sela tanggal 10 April 2012, yang isinya antara lain "pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan atas perkara tersebut, karena berdasarkan pertimbangan mejelis hakim penyelesaian melalui panitia arbitrase sebagaimana dalam perjanjian. Sampai dengan 6 Mei 2012 belum ada kesepakatan dalam bentuk perjanjian lebih lanjut antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Unicomindo untuk pembayaran beda kurs termin 13, 14, 15, 16.

Bagi hasil retribusi Terminal Purabaya bagian Kabupaten Sidoarjo untuk Bulan Oktober, November, Desember 2008 sampai dengan tahun 2011 sebesar

Rp4.673.174.229,00 belum dibayarkan karena mulai tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2009 pengelolaan Terminal Purabaya mengalami kerugian. Hal tersebut berdasarkan kajian Tim Appraisal (Independen) PT. Daksana Intra Swadaya. Total kerugian sampai dengan 30 Juni 2009 mencapai sebesar Rp.15.507.579.303,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tahun 2006 merugi sebesar Rp.2.790.246.997,00
2. Pada tahun 2007 merugi sebesar Rp.4.131.287.925,00
3. Pada tahun 2008 merugi sebesar Rp.5.561.460.052,00
4. Per juni 2009 merugi sebesar Rp.3.024.584.329,00.

Kewajiban dari BLU RSUD dr Soewandhie tahun 2010 sebesar Rp1.826.092.373,92 yang sudah diakui sebagai belanja tahun 2010 namun baru bisa dibayarkan tahun 2011.

45. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 69.408.572.102,76	Rp 102.433.511.923,63

46. Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp21.921.496.649,00	Rp32.882.244.975,00

Utang Jangka Panjang merupakan kewajiban yang jatuh temponya atau diharapkan akan diselesaikan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

47. Utang Kepada Pemerintah Pusat	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp21.921.496.649,00	Rp32.882.244.975,00

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2011 sebesar Rp21.921.496.649,00 tersebut merupakan Utang Jangka Panjang Pemerintah Pusat PPP SLA-764/DP3/1994 Loan IBRD 3726-IND Tanggal 9 September 1994.

Mutasi Utang Jangka Panjang selama tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp 32.882.244.975,00
Penambahan tahun 2011	Rp 0,00
Pengurangan tahun 2011	Rp (10.960.748.326,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2011	<u>Rp 21.921.496.649,00</u>

Pengurangan utang jangka panjang sebesar Rp 10.960.748.326,00 merupakan reklasifikasi utang jangka panjang ke bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2011.

48. Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp21.921.496.649,00	Rp32.882.244.975,00
49. JUMLAH KEWAJIBAN	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp91.330.068.751,76	Rp135.315.756.898,63
50. EKUITAS DANA	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp33.349.756.568.970,67	Rp32.486.668.517.071,30
51. Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp805.694.096.427,37	Rp546.600.302.578,36

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2011 dan 2010. Ekuitas dana lancar terdiri dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

52. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp502.999.263.251,27	Rp505.872.044.220,28

Jumlah tersebut merupakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2011 dan 2010. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2011 sebesar Rp.502.999.263.251,27 yang berasal dari realisasi Pendapatan sebesar Rp.3.759.034.427.310,72 dikurangi dengan jumlah realisasi Belanja sebesar Rp.3.753.710.413.890,80 ditambah dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp. 497.675.249.831,35.

SiLPA sebesar Rp502.999.263.251,27, dengan rincian :

1. SiLPA milik Pemkot Surabaya sebesar Rp481.255.833.664,66, terdiri dari :

- Kas di Kasda sebesar Rp481.241.895.805,66
- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.072.667,00
- Piutang KPPN sebesar Rp7.865.192,00 (utang PFK minus), yang merupakan kelebihan pembayaran Iuran Wajib Pegawai (IWP) Tahun 2011 dan telah diperhitungkan pada pembayaran IWP Tahun 2012.

2. BLUD RSUD dr.M. Soewandhie sebesar Rp21.743.429.586,61.

53. Pendapatan Yang Ditangguhkan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp125.737.773,28	Rp28.289.800,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2011 dan 2010. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan lawan Akun dari Kas di Bendahara Penerimaan.

54. Cadangan Piutang	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp300.970.499.581,57	Rp64.054.152.847,18

Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2011 sebesar Rp300.970.499.581,57 merupakan lawan Akun Piutang bersih sebesar Rp300.978.364.773,57. Terdapat selisih sebesar Rp7.865.192,00, yaitu atas saldo piutang (kelebihan pembayaran) IWP, yang merupakan komponen SiLPA Tahun 2011.

55. Cadangan Persediaan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp45.694.662.972,01	Rp33.594.332.522,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2011 dan 2010. Jumlah ini merupakan lawan akun Persediaan Habis Pakai/Material.

56. Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	<hr/>	<hr/>
	Rp(44.096.067.150,76)	Rp(56.948.516.811,10)

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2011 dan 2010. Jumlah ini merupakan lawan dari kewajiban jangka pendek kecuali Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

57. Jumlah Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	<hr/>	<hr/>
	Rp805.694.096.427,37	Rp546.600.302.578,36

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2011 dan 2010. Ekuitas Dana Lancar terdiri atas SILPA, Pendapatan yang ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

58. Ekuitas Dana Investasi	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	<hr/>	<hr/>
	Rp32.544.062.472.543,30	Rp31.940.068.214.493,00

59. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	<hr/>	<hr/>
	Rp906.946.038.066,74	Rp854.879.669.217,91

Jumlah tersebut merupakan saldo Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 2010. Jumlah ini merupakan lawan Akun dari Investasi Jangka panjang Non Permanen bersih sebesar Rp 69.808.313,25 dan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp. 906.876.229.753,49.

60. Diinvestasikan dalam Aset Tetap	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	<hr/>	<hr/>
	Rp31.484.362.969.879,60	Rp30.945.508.393.148,60

Jumlah tersebut merupakan saldo Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 2010. Jumlah ini merupakan lawan Akun Aset Tetap yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Instalasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

61. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp174.674.961.245,96	Rp172.562.397.101,43

Jumlah tersebut merupakan saldo Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010. Jumlah ini merupakan lawan Akun Aset Lainnya terdiri atas Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Negara, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset tak Berwujud dan Aset lain-lain.

62. Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	(Rp21.921.496.649,00)	(Rp32.882.244.975)

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 2010. Jumlah ini merupakan lawan Akun dari Kewajiban Jangka Panjang berupa Utang Kepada Pemerintah Pusat.

63. Jumlah Ekuitas Dana Investasi	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 32.544.062.472.543,30	Rp 31.940.068.214.493,00

Dengan demikian per 31 Desember 2011 Pemerintah Kota Surabaya mempunyai Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 32.544.062.472.543,30. Jumlah ini merupakan lawan Akun dari Diinvestasikan dari Hutang Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset lainnya dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

64. Jumlah Ekuitas Dana	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp 33.349.756.568.970,67	Rp 32.486.668.517.071,30

Dengan demikian per 31 Desember 2011 Pemerintah Kota Surabaya mempunyai Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp 33.349.756.568.970,67. Jumlah ini terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 805.694.096.427,37 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 32.544.062.472.543,30.

65. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	31 Desember 2011		31 Desember 2010	
	Rp	33.441.086.637.722,43	Rp	32.621.984.273.970,00

Dengan demikian per 31 Desember 2011 Pemerintah Kota Surabaya mempunyai Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp 33.441.086.637.722,43. Jumlah ini merupakan jumlah dari Kewajiban total Rp 91.330.068.751,76 dan Ekuitas Dana sebesar Rp 33.349.756.568.970,67.

5.2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

5.2.1. Pendapatan

Guna memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2011, baik yang menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, dan beberapa kegiatan seperti :

1. Membangun system pendataan, penetapan, penerimaan pajak daerah dengan semua kantor UPTD.
2. Melaksanakan penataan pengelolaan maupun potensi komponen pendapatan.
3. Penilaian kembali pada tempat-tempat usaha Wajib Pajak Daerah untuk mengjitung omzet penjualan yang digunakan sebagai dasar pembuatan ketetapan pajak untuk wajib pajak sistem taksasi.
4. Meningkatkan pengawasan objek pajak khususnya penyelenggaraan kegiatan insidentil (pegelaran musik, pertandingan olah raga dan lain-lain) dan meningkatkan pengawasan reguler.

5. Pembinaan wajib pajak yang meliputi :
 - Cara pengisian SPTPD yang baik dan benar
 - Kewajiban membayar pajak secara periodik
 - Perhitungan omzet yang kena pajak.
6. Pemeriksaan wajib pajak, pada wajib pajak yang menghitung pajak sendiri (MPS).
7. Peningkatan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis bagi petugas pajak.
8. Meningkatkan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara langsung dilapangan antara lain melalui polling PBB dan mobil keliling.
9. Melakukan review Peraturan Walikota Pajak Reklame tentang Nilai Sewa Reklame.
10. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah disusun Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, adanya perubahan sistim dari taksasi menjadi MPS yang mengakibatkan pembayaran pajak mundur satu bulan (pembayaran dilakukan tanggal 7 bulan berikutnya).
11. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun propinsi dalam rangka perolehan dana alokasi khusus maupun dana alokasi umum.
12. Secara rutin melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar kegiatan operasional dapat berlangsung dengan efektif.
13. Pembinaan terhadap kinerja perusahaan daerah.
14. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2010 bahwa sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya PAD dan penerimaan daerah lainnya. Realisasi Pendapatan pada Tahun anggaran 2010 sebesar Rp.3.044.124.791.757,37 dari target pendapatan sebesar Rp.3.271.421.232.775,71,00 atau terealisasi sebesar 93,05%. Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2011 bahwa sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya PAD dan penerimaan daerah lainnya. Realisasi Pendapatan pada Tahun anggaran 2011 sebesar Rp.3.759.034.427.310,72, dari target pendapatan sebesar Rp.3.971.688.604.325,00 atau terealisasi sebesar 94,64%. Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan

Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana ikhtisar sebagai berikut :

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Anggaran	Realisasi 2011	Realisasi 2010	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = (4-3)	7
1	PENDAPATAN	3,971,688,604,325.07	3,759,034,427,310.72	3,044,124,791,757.37	(212,654,177,014.35)	94.65
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,139,625,575,460.07	1,886,514,301,580.72	908,647,775,730.37	(253,111,273,879.35)	88.17
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1,691,550,000,000.00	1,488,358,147,753.27	525,403,484,538.00	(203,191,852,246.73)	87.99
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	265,797,243,579.00	209,834,317,887.85	183,312,246,927.48	(55,962,925,691.15)	78.95
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	77,019,175,680.00	75,962,115,305.92	63,304,547,605.63	(1,057,060,374.08)	98.63
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105,259,156,201.07	112,359,720,633.68	136,627,496,659.26	7,100,564,432.61	106.75
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,832,063,028,865.00	1,871,795,125,730.00	2,115,394,864,027.00	39,732,096,865.00	102.17
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	973,067,060,126.00	963,419,947,354.00	1,445,514,314,692.00	(9,647,112,772.00)	99.01
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	221,518,180,068.00	225,590,330,815.00	726,559,911,282.00	4,072,150,747.00	101.84
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5,599,253,058.00	8,692,232,539.00	6,536,131,410.00	3,092,979,481.00	155.24
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	679,450,127,000.00	679,262,759,000.00	652,532,472,000.00	(187,368,000.00)	99.97
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	66,499,500,000.00	49,874,625,000.00	59,885,800,000.00	(16,624,875,000.00)	75.00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lain	356,905,561,800.00	386,951,310,320.00	203,857,336,800.00	30,045,748,520.00	108.42
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	# DIV/0!
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	356,905,561,800.00	386,951,310,320.00	203,857,336,800.00	30,045,748,520.00	108.42
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	502,090,406,939.00	521,423,868,056.00	466,023,212,535.00	19,333,461,117.00	103.85
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	484,013,627,911.00	509,508,087,368.00	441,429,059,739.00	25,494,459,457.00	105.27
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	15,397,200,000.00	10,364,000,000.00	22,073,350,000.00	(5,033,200,000.00)	67.31
1.2.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	2,679,579,028.00	1,551,780,688.00	2,520,802,796.00	(1,127,798,340.00)	57.91
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0.00	725,000,000.00	20,082,152,000.00	725,000,000.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	125,000,000.00	20,082,152,000.00	125,000,000.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN		3,971,688,604,325.07	3,759,034,427,310.72		(212,654,177,014.35)	94.65

Rekapitulasi Pendapatan daerah berdasarkan SKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2010 dan Tahun 2011 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Anggaran	Realisasi 2011	Realisasi 2010
1	Dinas Kesehatan	16,145,068,857.00	19,573,037,298.00	16,145,068,857.00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie	24,021,464,054.00	35,750,681,134.69	15,456,094,736.92
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	9,000,000,000.00	5,025,953,188.91	219,934,703.86
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	-	438,888,379.00	2,443,944,863.00
5	Dinas Kebakaran	2,000,000,000.00	1,755,553,278.00	1,343,861,820.00
6	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	86,300,000,000.00	31,251,706,544.80	46,373,092,741.28
7	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	65,000,000,000.00	91,248,915,645.00	56,376,603,076.00
8	Dinas Perhubungan	39,131,682,839.00	31,612,362,780.00	25,266,390,630.00
9	Badan Lingkungan Hidup	8,500,000,000.00	7,479,458,535.00	8,095,641,800.00
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	37,435,733,097.00	23,544,764,965.72	30,163,788,599.20
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8,330,073,500.00	2,446,107,500.00	8,356,978,500.00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	187,290,000.00	229,558,333.00	310,038,166.00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3,700,000,000.00	2,617,618,348.00	2,487,894,580.00
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	2,650,000,000.00	624,460,000.00	0.00
15	Bagian Perlengkapan	450,000,000.00	701,706,900.00	4,792,673,548.00
16	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	3,668,397,012,078.00	3,504,861,691,514.67	2,825,127,106,736.11
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	440,279,900.00	454,856,825.00	1,165,678,400.00
18	Badan Perpustakaan dan Arsip	-	15,104,200.00	0.00
J U M L A H		3,971,688,604,325.00	3,759,632,425,369.79	3,044,124,791,757.37

a. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dengan target pada tahun 2011 sebesar Rp.2.139.625.575.460,07 dan tahun 2010 sebesar Rp.1.059.891.415.590,71 terealisasi sebesar Rp.1.887.112.473.639,79 atau 88,20% pada tahun 2011 dan terealisasi sebesar Rp. 908.647.775.730,37 atau 85,73% pada tahun 2010, terdiri dari :

a) Pajak Daerah

Pada tahun 2011 dan tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp.1.691.550.000.000,00 dan Rp. 581.581.810.000,00, terealisasi sebesar Rp.1.488.358.147.753,27 dan Rp. 525.403.484.538,00 atau sebesar 87,99% dari target tahun 2011 dan sebesar 90,34% dari target tahun 2010. Secara terinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun 2011 dan 2010 bersumber dari :

Kelompok Pajak Daerah	2011	2010
Pajak Hotel	Rp 108,205,704,969.00	Rp 100,508,232,155.00
Pajak Restoran	Rp 131,138,493,688.00	Rp 115,459,616,842.00
Pajak Hiburan	Rp 29,896,451,597.00	Rp 26,612,846,480.00
Pajak Reklame	Rp 90,232,362,728.38	Rp 98,705,063,186.00
Pajak Penerangan Jalan	Rp 192,089,354,040.00	Rp 165,055,792,194.00
Pajak Parkir	Rp 21,841,038,427.00	Rp 19,061,933,681.00
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 498,640,108,489.44	Rp -
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp 416,314,633,814.45	Rp -
Jumlah	Rp 1,488,358,147,753.27	Rp 525,403,484,538.00

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

	Kelompok Pajak Daerah	2011	2010
	Pajak Hotel		
1	Hotel Bintang Lima	48,498,946,295.00	48,701,140,386.00
2	Hotel Bintang Empat	33,161,633,048.00	29,609,915,771.00
3	Hotel Bintang Tiga	13,250,126,618.00	11,493,953,641.00
4	Hotel Bintang Dua	854,956,285.00	124,496,007.00
5	Hotel Bintang Satu	866,991,402.00	862,371,955.00
6	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	124,625,292.00	0.00
7	Hotel Non Bintang	11,448,426,029.00	9,716,354,395.00
	Jumlah	108,205,704,969.00	100,508,232,155.00
	Pajak Restoran		
1	Restoran	128,035,607,367.00	115,459,616,842.00
2	Katering	3,102,886,321.00	0.00
	Jumlah	131,138,493,688.00	115,459,616,842.00
	Pajak Hiburan		
1	Tontonan Film / Bioskop	10,258,102,550.00	11,006,711,000.00
2	Hiburan Non Bioskop	16,938,614,096.00	14,100,635,567.00
3	Hiburan Insidentil	2,699,734,951.00	1,505,499,913.00
	Jumlah	29,896,451,597.00	26,612,846,480.00
	Pajak Reklame		
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	73,759,389,678.38	83,535,062,686.00
2	Reklame Insidentil	16,472,973,050.00	15,170,000,500.00
	Jumlah Pajak Reklame	90,232,362,728.38	98,705,063,186.00
	Pajak Penerangan Jalan		
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	191,561,854,077.00	164,260,666,249.00
2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	527,499,963.00	795,125,945.00
	Jumlah	192,089,354,040.00	165,055,792,194.00
	Pajak Parkir		
1	Pajak Parkir	21,841,038,427.00	19,061,933,681.00
	Jumlah	21,841,038,427.00	19,061,933,681.00
	Pajak Bumi Bangunan		
1	Pajak bumi Bangunan	498,640,108,489.44	0.00
	Jumlah	498,640,108,489.44	0.00
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	416,314,633,814.45	0.00
	Jumlah	416,314,633,814.45	0.00
	Total	1,488,358,147,753.27	525,403,484,538.00

b) Retribusi Daerah

Pada tahun 2011 dan tahun 2010 Ditargetkan sebesar Rp.265.797.243.579,00 dan Rp. 288.713.893.269,00, terealisasi sebesar Rp.209.834.317.887,85 dan Rp. 183.312.246.927,48 atau terealisasi sebesar 78,94% dari target tahun 2011 dan sebesar 63,49% dari target tahun 2010. Untuk Pendapatan Retribusi tersebut dapat dirinci secara kelompok sebagai berikut :

Kelompok Retribusi	2011	2010
Reribusi Jasa Umum	Rp 108,689,088,799.05	Rp 93,791,169,036.20
Retribusi Jasa Usaha	Rp 39,709,531,900.80	Rp 52,710,878,825.28
Retribusi Perijinan Tertentu	Rp 61,435,697,188.00	Rp 36,810,199,066.00
Jumlah	Rp 209,834,317,887.85	Rp 183,312,246,927.48

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

	Kelompok Retribusi Daerah	2011	2010
	Retribusi Jasa Umum		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15,307,167,500.00	8,050,908,857.00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	22,800,700,465.72	28,395,284,949.00
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	2,446,107,500.00	8,356,978,500.00
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	607,595,000.00	668,320,000.00
5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11,153,519,500.00	10,291,809,500.00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	12,286,136,900.00	7,253,706,500.00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1,755,553,278.00	1,343,861,820.00
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	37,966,032,982.00	29,430,298,910.00
9	Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	4,235,326,173.33	0.00
10	Retribusi Penyedotan Kakus	130,949,500.00	0.00
	Jumlah	108,689,088,799.05	93,791,169,036.00
	Retribusi Jasa Usaha		
1	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	454,856,825.00	440,279,900.00
2	Retribusi Terminal	6,336,819,000.00	5,907,532,030.00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,178,881,500.00	1,166,488,000.00
4	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	0.00	152,589,500.00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2,317,068,098.00	2,179,294,580.00
5	Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya	27,556,081,533.61	38,740,649,772.00
6	Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya	499,938,815.19	310,543,530.00
7	Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI	300,550,250.00	308,600,000.00
8	Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya	37,670,000.00	43,420,000.00
9	Pemakaian Gedung Serba Guna	583,257,500.00	460,022,500.00

10	Uang atas Pemakaian Tanah	438,888,379.00	2,430,602,863.00
	Pemakaian Alat-Alat Berat	0.00	13,342,000.00
11	Penggunaan Ruang Terbuka Hijau	5,520,000.00	551,594,150.00
	Sewa Bus / Truck	0.00	5,920,000.00
Jumlah		39,709,531,900.80	52,710,878,825.00
Retribusi Perizinan Tertentu			
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	53,281,732,773.00	53,266,724,173.00
2	Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	7,479,458,535.00	7,479,458,535.00
3	Retribusi Izin Trayek	657,005,880.00	657,005,880.00
4	Retribusi Ijin Jasa Konstruksi	17,500,000.00	17,500,000.00
Jumlah		61,435,697,188.00	61,420,688,588.00
Total		209,834,317,887.85	61,420,688,588.00

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pada tahun 2011 dan tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp.77.019.175.680,00 dan Rp. 63.581.595.594,70, terealisasi sebesar Rp.75.962.115.305,92 dan Rp. 63.304.547.605,63 atau sebesar 98,63% dari target tahun 2011 dan sebesar 99,56% dari target tahun 2010. Rincian pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	2011	2010
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	Rp 71,785,523,872.92	Rp 61,162,413,656.63
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)	Rp 3,926,591,433.00	Rp 1,842,133,950.00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	Rp 250,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Jumlah	Rp 75,962,115,305.92	Rp 63,304,547,606.63

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	2011	2010
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD		
1 Bagian Laba PDAM	50,002,870,000.00	49,458,638,900.00
2 Bagian laba PD Pasar Surya	447,933,805.00	1,587,975,084.00
3 Bagian Laba PD Rumah Potong Hew an	320,055,291.00	54,028,191.00
4 Bagian Laba PT.Bank Jatim	20,995,680,776.92	10,042,787,481.00
5 Bagian Laba PT. BPR Jatim	18,984,000.00	18,984,000.00
6 Bagian laba PT. Surya Karsa Utama	0.00	0.00
Jumlah	71,785,523,872.92	61,162,413,656.00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah / BUMN		
1 Bagian laba PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	3,926,591,433.00	1,842,133,950.00
Jumlah	3,926,591,433.00	1,842,133,950.00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta		
1 Bagian Laba PT. STAR / Taman Remaja Surabaya	250,000,000.00	300,000,000.00
Jumlah	250,000,000.00	300,000,000.00
Total	75,962,115,305.92	63,304,547,606.00

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pada tahun 2011 dan tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp.105.259.156.201,07 dan Rp. 126.014.116.727,01, terealisasi sebesar Rp.112.359.720.633,68 dan Rp. 136.627.496.659,26 atau sebesar 106,74% dari target tahun 2011 dan sebesar 108,42% dari target tahun 2010, dapat dirinci lebih lanjut atas penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagai berikut :

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2011	2010
Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	Rp 636,500,900.00	Rp 6,001,753,548.00
Penerimaan Jasa Giro (Bank Jatim)	Rp 7,304,298,879.85	Rp 3,170,651,018.72
Bunga Deposito (Bank Jatim)	Rp 32,043,150,684.57	Rp 58,253,219,177.50
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Bag.Perengkapan)	Rp 65,206,000.00	Rp 18,000,000.00
Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan)	Rp 1,961,572,562.00	Rp 2,426,473,346.00
Hasil Eksekusi Atas Jaminan	Rp 821,811,346.00	Rp 412,468,400.00
Pendapatan dari Pengembalian (Lampiran 33)	Rp 635,537,870.00	Rp 836,389,052.00
Penerimaan lain-lain (Lampiran 34)	Rp 33,140,961,256.57	Rp 50,052,447,380.12
Pendapatan BLUD-RSUD Dr. Soewandhie	Rp 35,750,681,134.69	Rp 15,456,094,736.92
Jumlah	Rp 112,359,720,633.68	Rp 136,627,496,659.26

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		2011	2010
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan			
1	Pelepasan Hak atas Tanah	0.00	1,233,000,000.00
2	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	636,500,900.00	4,768,753,548.00
3	Penjualan lampu Hias Bekas	0.00	0.00
Jumlah		636,500,900.00	6,001,753,548.00
Penerimaan jasa Giro			
1	Jasa Giro Kas Daerah	4,667,172,976.64	232,766,297.00
2	Jasa Giro Pemegang kas	2,427,868,011.23	2,937,884,722.00
3	Jasa Giro BOPDA	209,257,891.98	0.00
Jumlah		7,304,298,879.85	3,170,651,019.00
Pendapatan Bunga Deposito			
1	Rekening Deposito pada Bank Jatim	32,043,150,684.57	58,253,219,178.00
Jumlah		32,043,150,684.57	58,253,219,178.00
Tuntutan ganti Kerugian Daerah			
1	Kerugian Barang Daerah	65,206,000.00	18,000,000.00
Jumlah		65,206,000.00	18,000,000.00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			
1	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pendidikan	77,900,807.00	310,302,437.00
2	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kesehatan	307,389,778.00	200,232,980.00
3	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	614,348,855.00	575,253,573.00
4	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat	23,018,247.00	27,999,796.00
5	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Penataan Ruang	611,834,153.00	1,004,054,934.00
6	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan	984,800.00	0.00
7	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perhubungan	15,625,955.00	75,027,803.00
8	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup	52,483,524.00	539,924.00
9	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	20,427,757.00	0.00
10	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Sosial	1,649,835.00	0.00
11	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2,395,852.00	21,048,148.00
12	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Penanaman Modal	524,262.00	
13	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pemuda dan Olah Raga	9,438,663.00	
14	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pemerintahan Umum	93,072,202.00	130,415,038.00
15	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Komunikasi dan Informatika	83,188,335.00	0.00
16	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kelautan dan Perikanan	0.00	10,035,060.00
17	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pertanian	47,289,537.00	
18	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kebersihan dan Pertamanan	0.00	71,563,653.00
Jumlah		1,961,572,562.00	2,426,473,346.00
Pendapatan Hasil eksekusi atas Jaminan			
1	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	821,811,346.00	412,468,400.00
Jumlah		821,811,346.00	412,468,400.00
Pendapatan dari Pengembalian			
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	635,537,870.00	836,389,052.00
Jumlah		635,537,870.00	836,389,052.00
Penerimaan Lain-Lain			
1	Penerimaan Gedung Wanita Chandra Kencana	105,565,000.00	155,405,000.00
2	Penerimaan Lain-Lain	20,994,286,177.62	28,901,090,425.00
3	Penerimaan dari JPKMM	0.00	5,503,464,000.00
4	Pengembalian Gaji Tunjangan	8,217,100.00	0.00
5	Kolam Renang Brantas	0.00	0.00
6	Rumah Peristirahatan	2,075,000.00	0.00
7	Klaim Asuransi Parkir	0.00	0.00
8	Penyetoran atas Temuan Hasil Pemeriksaan	3,203,207,253.14	0.00
9	Sewa Gedung Jalan Walikota Mustajab nomor 84	160,236,000.00	0.00
10	Penerimaan Bunga dana Bergulir dari Koperasi dan Sektor Informal	229,558,333.00	310,038,166.00
11	Penerimaan Sewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Halte Bis	1,912,132,300.00	2,163,090,540.00

12	Sewa Bangunan dan Tanah Gedung Siola	0.00	643,062,060.00
13	Sewa Bangunan Tunjungan Center	0.00	2,407,020,000.00
14	Penerimaan dari PT. ASKES	5,056,496,813.58	2,590,696,000.00
15	Pendapatan dari Gelora 10 Nopember	576,335,000.00	0.00
	Pendapatan dari Hasil Kontribusi Bangunan Guna Serah (BOT) Pasar Turi	0.00	3,000,000,000.00
	Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada	0.00	219,934,704.00
19	Sewa Lapangan Hocky/Softball/Baseball	10,455,000.00	0.00
20	Sewa stadion Bung Tomo	0.00	0.00
21	Penerimaan Pemakaian Sewa Rumah susun	360,346,300.00	139,819,155.00
22	Penerimaan dari Bangunan Gedung Kantin Milik/di kuasai Pemkot	58,084,115.00	77,060,184.00
23	sewa BTS Mobile	16,064,981.00	0.00
24	Penerimaan Sanksi Administrasi Bahan Pustaka	15,104,200.00	0.00
Jumlah		33,140,961,256.57	50,052,447,380.00
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			
	Pendapatan BLUD - RSUD Dr. Soewandhie	35,750,681,134.69	15,456,094,737.00
Jumlah		35,750,681,134.69	15,456,094,737.00
Total		112,359,720,633.68	136,627,496,660.00

Penerimaan Lain-lain (**Lampiran 34**) sebesar Rp.33.140.961.256,57 yang sudah diketahui jenis dan klasifikasinya sebesar Rp.32.708.163.573,34 dan sisanya belum diketahui jenis dan klasifikasinya sebesar Rp.432.797.683,23. Penerimaan Lain-lain Tahun 2011 dan 2010 sebesar Rp33,140,961,256.57 dan Rp50.052.447.380,00 terdiri dari :

No.	Uraian	2011	2010
1	Penerimaan Gedung Wanita Chandra Kencana	105.565.000,00	155.405.000,00
2	Penerimaan Lain-Lain	20.994.286.177,62	28.901.090.425,00
	Penerimaan dari JPKMM	0,00	5.503.464.000,00
3	Pengembalian Gaji Tunjangan	8.217.100,00	0,00
4	Kolam Renang Brantas	0,00	0,00
5	Rumah Peristirahatan	2.075.000,00	0,00
6	Klaim Asuransi Parkir	0,00	0,00
7	Penyetoran atas Temuan Hasil Pemeriksaan	3.203.207.253,14	0,00
8	Sewa Gedung Jalan Walikota Mustajab nomor 84	160.236.000,00	0,00
9	Penerimaan Bunga dana Bergulir dari Koperasi dan Sektor Informal	229.558.333,00	310.038.166,00
10	Penerimaan Sewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Halte Bis	1.912.132.300,00	2.163.090.540,00
11	Sewa Bangunan dan Tanah Gedung Siola	0,00	643.062.060,00
12	Sewa Bangunan Tunjungan Center	0,00	2.407.020.000,00
13	Penerimaan dari PT. ASKES	5.056.496.813,58	2.590.696.000,00
14	Pendapatan dari Gelora 10 Nopember	576.335.000,00	0,00
15	Pendapatan dari Hasil Kontribusi Bangunan Guna Serah (BOT) Pasar Turi	0,00	3.000.000.000,00

	Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada	0,00	219.934.704,00
	Sewa Lapangan Hocky/Softball/Baseball	10.455.000,00	0,00
16	Sewa stadion Bung Tomo	0,00	0,00
17	Penerimaan Pemakaian Sewa Rumah susun	360.346.300,00	139.819.155,00
18	Penerimaan dari Bangunan Gedung Kantin Milik/di kuasai Pemkot	58.084.115,00	77.060.184,00
19	sewa BTS Mobile	16.064.981,00	0,00
20	Penerimaan Sanksi Administrasi Bahan Pustaka	15.104.200,00	0,00
21	Penerimaan Lain yang belum diketahui informasi jenis pendapatannya	432.797.683,23	3.941.767.146,00
Jumlah		33.140.961.256,57	50.052.447.380,00

b. Pendapatan Transfer

Sumber Pendapatan ini berasal dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi. Pada tahun 2011 dan tahun 2010 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.1.869.608.377.385,00 dan Rp. 2.191.447.665.185,00, terealisasi sebesar Rp.1.871.795.125.730,00 dan Rp. 2.115.394.864.027,00 atau terealisasi sebesar 100,11% dari target tahun 2011 dan sebesar 96,52% dari target tahun 2010.

1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Untuk lebih jelasnya Pendapatan dari Dana Perimbangan dapat uraikan sebagai berikut :

a) Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat

Pada tahun 2011 dan tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp.221.518.180.068,00 dan Rp. 876.222.134.496,00, terealisasi sebesar Rp.225.590.330.815,00 dan Rp.726.559.911.282,00 atau sebesar 101,84% dari target tahun 2011 dan sebesar 17,08% dari target tahun 2010. yang dapat dirinci lebih lanjut atas pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut :

Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat	2011	2010
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 41,788,454,750.00	Rp 341,759,567,832.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp -	Rp 235,436,405,710.00
Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25, 29, 21	Rp 163,995,617,981.00	Rp 133,826,567,326.00
Cukai Hasil Tembakau	Rp 19,806,258,084.00	Rp 15,537,370,414.00
Jumlah	Rp 225,590,330,815.00	Rp 726,559,911,282.00

b) Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Pada tahun 2011 dan tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp.5.599.253.058,00 dan Rp. 5.332.621.960,00, terealisasi sebesar Rp.8.692.232.539,00 dan Rp. 6.536.131.410,00 atau sebesar 155,24% dari target tahun 2011 dan 122,57% dari target tahun 2010 yang ditetapkan yang bersumber dari :

Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2011	2010
Provisi Sumber Daya Hutan	Rp 315,914,627.00	Rp 239,235,469.00
Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	Rp 13,954,798.00	Rp 5,939,338.00
Pungutan Hasil Perikanan	Rp 261,048,242.00	Rp 133,334,511.00
Pertambangan Minyak Bumi	Rp 7,830,508,597.00	Rp 6,064,062,267.00
Pertambangan Gas Bumi /Gas Alam	Rp 270,806,275.00	Rp 93,559,825.00
Iuran hak Kuasa Pertambangan	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 8,692,232,539.00	Rp 6,536,131,410.00

c) Dana Alokasi Umum

Pada tahun 2011 dan tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.679.450.127.000,00 dan Rp. 652.532.472.000,00, terealisasi sebesar Rp.679.262.759.000,00 dan Rp. 652.532.472.000,00 atau sebesar 99,97% dari target tahun 2011 dan sebesar 100% dari target tahun 2010

d) Dana Alokasi Khusus

Pada tahun 2011 dan tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.66.499.500.000,00 dan Rp. 59.885.800.000,00, terealisasi sebesar Rp.49.874.625.000,00 dan Rp. 59.885.800.000,00 atau sebesar 75% dari target tahun 2011 dan 100% dari target tahun 2010.

4. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

a) Dana Penyesuaian

Pada tahun 2011 dan tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.356.905.561.800,00 dan Rp. 207.386.261.800,00, terealisasi sebesar Rp.386.951.310.320,00 dan Rp. 203.857.336.800,00 atau sebesar 100% dari target tahun 2011 dan 98,29% dari target tahun 2010. yang merupakan Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Dana Penyesuaian	2011	2010
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2011	Rp 10,083,000,000.00	Rp 12,771,000,000.00
Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2011	Rp 213,022,713,320.00	Rp 182,755,136,800.00
Dana Penyesuaian DPPIP	Rp -	Rp 3,481,200,000.00
Dana Penyesuaian DPIP	Rp -	Rp 4,850,000,000.00
Dana Penyesuaian untuk Dana BOSNAS SD dan SMP Negeri/Swasta	Rp 158,237,700,000.00	Rp -
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	Rp 5,607,897,000.00	Rp -
Jumlah Dana Penyesuaian	Rp 386,951,310,320.00	Rp 203,857,336,800.00

5. Transfer Pemerintah Provinsi

a) Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi

Pada tahun 2011 dan tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.490.013.627.911,00 dan Rp. 353.546.195.901,00, terealisasi sebesar Rp.509.508.087.368,00 dan Rp. 441.429.059.739,00 atau sebesar 103,98% dari target tahun 2011 dan 124,86% dari target tahun 2010.

Secara terinci pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dapat diuraikan sebagai berikut :

Bagi Hasil Pajak Pemerintah Propinsi	2011	2010
Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 175,873,740,308.00	Rp 157,852,320,761.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp 224,423,979,609.00	Rp 173,344,179,621.00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp 107,780,987,601.00	Rp 108,126,398,851.00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Rp 93,091,037.00	Rp 359,280,034.00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Rp 1,289,775,531.00	Rp 1,720,559,861.00
Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)	Rp 46,513,282.00	Rp 26,320,611.00
Jumlah	Rp 509,508,087,368.00	Rp 441,429,059,739.00

b) Bantuan Keuangan dari Provinsi

Untuk pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.16.897.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.364.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.33.862.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.073.350.000,00 atau sebesar 61,34% dari target tahun 2011 dan sebesar 65,19% dari target tahun 2010.

Bantuan Keuangan dari Provinsi	2011	2010
Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp 10,314,000,000.00	Rp 19,746,550,000.00
Kegiatan HUT 65 Provinsi	Rp 50,000,000.00	Rp 30,000,000.00
Program Kopwan 2011	Rp -	Rp 2,296,800,000.00
Jumlah	Rp 10,364,000,000.00	Rp 22,073,350,000.00

c) Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi

Untuk pendapatan dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi pada tahun 2011 dan tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.2.679.579.028,00 dan Rp. 2.679.579.028,00, terealisasi sebesar Rp.1.551.780.688,00 dan Rp. Rp.2.520.802.796,00 atau sebesar 57,91 % dari target tahun 2011 dan 94,07 % dari target tahun 2010, yang terdiri dari pendapatan:

Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi	2011	2010
Ijin Memperpanjang Tenaga Asing	Rp -	Rp 1,362,839,186.00
RP3HH	Rp 1,330,032,938.00	Rp 858,142,840.00
TERA	Rp 221,747,750.00	Rp 299,820,770.00
Jumlah	Rp 1,551,780,688.00	Rp 2,520,802,796.00

d. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2011 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dianggarkan. Namun terdapat realisasi yang bersumber dari pendapatan hibah sebesar Rp.600.000.000,00 dari PT Grande Family View dan PT Dian Permana masing-masing sebesar Rp.300.000.000,00 untuk partisipasi dana pembangunan saluran Kali Kendal Kecamatan Wiyung dan pendapatan hadiah pemenang lomba PPA terbaik kategori Kabupaten/Kota sebesar Rp.125.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2010, sumber pendapatan ini berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) yang dianggarkan sebesar Rp.20.082.152.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.20.082.152.000,00 atau sebesar 100%.

5.2.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.3.753.710.587.890,80 dan Rp. 3.637.069.260.868,48,00 apabila dibandingkan dengan target belanja sebesar Rp.5.195.102.211.727,00 dan Rp.4.362.711.850.643,00 terdapat pos – pos belanja yang belum terealisasi sebesar Rp.1.441.391.623.836,20 dan Rp. 725.642.589.774,52 atau dari keseluruhan anggaran belanja terealisasi sebesar 72,25 % pada tahun 2011 dan sebesar 83,37 % pada tahun 2010. Laporan ikhtisar atas realisasi belanja sebagai berikut :

Tahun 2011 :

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Reallisasi 2010
		Anggaran	Realisasi 2011	(Rp)	%	
1	2	3	4	6 = (4-3)	7	5
2	BELANJA DAERAH	5,195,102,211,727.00	3,753,710,413,890.80	(1,441,391,797,836.20)	72.25	3,637,069,260,868.48
2.1	Belanja Operasi	3,901,683,406,643.00	3,210,441,999,401.80	(691,241,407,241.20)	82.28	2,601,573,293,515.67
2.1.1	Belanja Pegawai	1,965,502,958,749.00	1,715,12,525,938.00	(250,390,432,811.00)	87.26	1,433,022,731,280.00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,485,269,598,540.00	1,164,991,205,503.80	(320,278,393,036.20)	78.44	848,903,215,231.67
2.1.3	Belanja Bunga	7,102,500,000.00	2,903,307,374.00	(4,199,192,626.00)	40.88	3,620,536,118.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	437,308,349,354.00	325,744,017,586.00	(111,564,331,768.00)	74.49	314,281,597,886.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4,600,000,000.00	1,046,730,000.00	(3,553,270,000.00)	22.76	701,000,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan keuangan	1,900,000,000.00	644,213,000.00	(1,255,787,000.00)	33.91	1,044,213,000.00
2.2	Belanja Modal	1,280,228,524,330.00	543,111,645,989.00	(737,116,878,341.00)	42.42	1,034,993,417,352.81
2.2.1	Belanja Tanah	203,820,211,512.00	100,486,009,000.00	(103,334,202,512.00)	49.30	8,586,734,209.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	285,639,571,828.00	179,104,771,991.00	(106,534,799,837.00)	62.70	194,053,579,115.00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	384,073,604,300.00	157,938,496,455.00	(226,135,107,845.00)	41.12	347,576,283,838.81
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	389,506,730,552.00	102,454,759,850.00	(287,051,970,702.00)	26.30	482,365,036,576.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap lainnya	14,841,975,060.00	1,602,454,313.00	(13,239,520,747.00)	10.80	1,194,491,914.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya/Aset Tak	2,346,431,078.00	1,525,154,380.00	(821,276,698.00)	65.00	1,217,291,700.00
2.3	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00	156,768,500.00	(9,843,231,500.00)	1.57	502,550,000.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00	156,768,500.00	(9,843,231,500.00)	1.57	502,550,000.00
2.4	Transfer	3,190,280,754.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2.4.1	Transfer bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	3,190,280,754.00	0.00	(3,190,280,754.00)	0.00	0.00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan La	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat / Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2011 dan tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp. 3.901.683.406.643,00 dan Rp. 3.029.022.712.104,00 direalisasikan sebesar Rp. 3.210.441.999.401,90 atau 80,97% dan Rp. 2.601.573.293.515,67 atau 85,88%

a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2011 dan tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp. 1.965.502.958.749,00 dan Rp. 1.637.694.609.949,00, terealisasi Rp. 1.715.112.525.938,00 dan Rp. 1.433.022.731.280,00 atau sebesar 87,26% dari target tahun 2011 dan sebesar 87,50% dari target tahun 2010. Belanja Pegawai yang terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 408.034.753.444,00 dan Rp. 325.848.845.912,63 terealisasi sebesar Rp. 337.939.443.824,00 dan Rp. 268.247.257.429,00 atau sebesar 82,82% dari target tahun 2011 dan sebesar 82,32% dari target tahun 2010. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 1.557.468.205.305,00 dan Rp. 1.311.845.764.037,00 direalisasikan sebesar Rp. 1.377.173.082.114,00 atau sebesar 88,42% dari target yang ditetapkan dan Rp. 1.164.775.473.851,00 atau sebesar 88,79% dari target yang ditetapkan.

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2011 sebesar Rp. 1.715.112.525.938,00 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Belanja Tidak langsung	
Gaji Pokok PNS/Uang representasi	856.992.683.611,00
Tambahan Penghasilan	254.508.241.509,00
Belanja Penunjang Operasional	5.365.760.000,00
Tambahan Penghasilan & Tunjangan Profesi Guru PNS	220.098.407.200,00
Pajak	38.114.725.000,00
Retribusi	2.093.264.794,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.377.173.082.114,00
Belanja Langsung	
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Pelaksana Kegiatan	51.489.995.022,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan	94.684.224.195,00
Uang Lembur	26.077.370.300,00

Uang Kinerja	144.013.524.433,00
Honorarium Pengelolaan Kegiatan dana BOS	21.674.329.874,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	337.939.443.824,00
Total Belanja Pegawai	1.715.112.525.938,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2011 dan 2010 dianggarkan sebesar Rp.1.485.269.598.540,00 dan Rp. 1.011.359.060.669,09 terealisasi Rp.1.164.991.205.503,80 atau sebesar 78,43% dan Rp.848.903.215.231,67 atau sebesar 83,94% dari target yang ditetapkan.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2011 sebesar Rp1.164.991.205.503,80 adalah sebagai berikut :

BELANJA BARANG DAN JASA	Jumlah (Rp)
Belanja ATK, Bahan Habis Pakai	179.066.137.690,30
Belanja Dokumentasi, Bibit Tanaman, Bahan Kimia, Bahan Baku Bangunan	33.865.319.708,58
Belanja Jasa Publikasi, Listrik, Air, Telepon/fax	262.738.005.986,00
Belanja Premi Asuransi	336.602.113,00
Belanja Cetak, Jilid, Penggandaan	40.074.061.130,71
Belanja Sewa Gedung	8.606.207.127,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.044.827.686,00
Belanja Sewa Alat Berat	2.462.464.400,00
Belanja Sewa Perlengkapan	6.069.391.941,00
Belanja Sewa Alat	131.331.500,00
Belanja Makan Minum	53.020.886.317,00
Belanja Pakaian Dinas	11.164.830.475,00
Belanja Perjalanan Dinas	44.361.978.541,00
Belanja Beasiswa	3.034.000.000,00
Belanja Kursus/Diklat/Seminar	31.647.535.589,50
Belanja Jasa Konsultansi	52.203.696.560,79
Belanja Pemeliharaan	187.410.720.529,42
Belanja Transport Lokal	75.281.063.507,50
Belanja Rumah Tangga KDH/WKDH	1.686.126.034,00
Belanja Pemberian Hadiah	8.314.563.750,00
Belanja Jasa Operasional Kegiatan	105.191.197.961,00
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	48.280.256.956,00
Jumlah	1.164.991.205.503,80

c. Belanja Bunga

Pada tahun 2011 dan 2010 dianggarkan sebesar Rp.7.102.500.000,00 dan Rp. 7.102.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.903.307.374,00 atau terealisasi sebesar 40,88% pada tahun 2011 dan 3.620.536.118,00 atau

teralisasi sebesar 50,98% pada tahun 2010 dari target yang ditetapkan yang merupakan Belanja Bunga untuk pinjaman Loan IBRD No 3726 No. SLA 764 DP3 1994.

d. Belanja Hibah (Lampiran 35)

Pada tahun 2011 dan 2010 dianggarkan sebesar Rp.437.308.349.354,00 dan Rp.366.366.541.487,00 direalisasikan sebesar Rp.325.744.017.586,00 atau 74,49% dan Rp. 314.281.597.886,00 atau 85,78% dari target yang ditetapkan, digunakan untuk :

Belanja Hibah	2011	2010
Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rp -	Rp -
Badan/Lembaga/Organisasi swasta	Rp 287.325.955.045,00	Rp 250.818.352.191,00
Kelompok Masyarakat/ Perorangan	Rp 38.418.062.541,00	Rp 15.173.136.850,00
Hibah Pemilu Kepada Daerah dan wakil Kepala Daerah	Rp -	Rp 48.290.108.845,00
Jumlah	Rp 325.744.017.586,00	Rp 314.281.597.886,00

e. Belanja Bantuan Sosial (Lampiran 36)

Pada tahun 2011 dan 2010 dianggarkan sebesar Rp.4.600.000.000,00 dan Rp. 4.600.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.1.046.730.000,00 atau terealisasi 22,75 % dan Rp. 701.000.000,00 atau terealisasi 15,24 % dari target yang ditetapkan dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial	2011	2010
Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	Rp 43,700,000.00	Rp -
Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	Rp 38,000,000.00	Rp 232,000,000.00
Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	Rp 965,030,000.00	Rp 469,000,000.00
Bantuan Sosial kepada Partai Politik	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 1,046,730,000.00	Rp 701,000,000.00

f. Belanja Bantuan Keuangan

Pada tahun 2011 dan 2010 dianggarkan sebesar Rp.1.900.000.000,00 dan Rp.1.900.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.644.213.000,00 atau terealisasi 33,91% dan Rp.1.044.213.000,00 atau terealisasi sebesar 54,96% dari target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bantuan Keuangan	2011	2010
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten	Rp -	Rp 400,000,000.00
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 644,213,000.00	Rp 644,213,000.00
Jumlah	Rp 644,213,000.00	Rp 1,044,213,000.00

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2011 dan 2010 dianggarkan sebesar Rp.1.280.228.524.330,00 dan Rp.1.323.689.138.539,13 direalisasikan sebesar Rp.543.111.645.989,00 atau 42,42% dan sebesar Rp.1.034.993.417.352,81 atau 78,19% dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tanah

Pada tahun 2011 dan 2010 dianggarkan sebesar Rp.203.820.211.512,00 dan Rp. 41.363.804.041,00 terealisasi sebesar Rp.100.486.009.000,00 atau sebesar 49,30% dan Rp. 8.586.734.209,00 atau sebesar 20,76% dari target yang ditetapkan. Rincian realisasi Belanja Tanah Tahun 2011 sebesar Rp100.486.009.000,00 adalah sebagai berikut :

Belanja Tanah	Jumlah (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Penggunaan Lain	3,009,093,000.00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1,354,590,000.00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	96,122,326,000.00
Jumlah	100.486.009.000,00

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Pada tahun 2011 dan 2010 dianggarkan sebesar Rp.285.639.571.828,00 dan Rp. 250.530.995.475,00 terealisasi sebesar Rp.179.104.771.991,00 atau sebesar 62,70% dan Rp. 194.053.579.115,00 atau sebesar 77,46% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2011 sebesar Rp179.104.771.991,00 adalah sebagai berikut :

No	Belanja Peralatan dan Mesin	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Darat	11,765,373,864.00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	86,157,500.00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	30,546,923,444.00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	9,890,000.00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor	499,565,000.00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	374,478,000.00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel BerMesin	630,467,878.00
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak BerMesin	234,568,950.00

9	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	984,813,234.00
10	Belanja Modal Alat Bantu Kerja	608,174,010.00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	20,042,000.00
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpanan	69,745,500.00
13	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	8,422,334,537.00
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	7,690,031,960.00
15	Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	26,883,553,298.00
16	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat	1,499,198,580.00
17	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Sekolah	4,614,939,500.00
18	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	8,305,219,106.00
19	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	1,459,016,685.00
20	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	694,186,680.00
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	35,650,974,260.00
22	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	3,106,787,464.00
23	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	5,626,597,040.00
24	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga / Praktik Sekolah	1,669,715,100.00
25	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1,654,053,225.00
26	Belanja modal Dana BOS	25,997,965,176.00
Jumlah		179.104.771.991,00

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2011 dan 2010 dianggarkan sebesar Rp.384.073.604.300,00 dan Rp. 443.560.142.081,00 terealisasi sebesar Rp.157.938.496.455,00 atau sebesar 41,12% dan Rp. 347.576.283.838,81 atau sebesar 78,36% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2011 sebesar Rp157.938.496.455,00 adalah sebagai berikut :

No.	Belanja Gedung dan Bangunan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja	138,969,942,774.00
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	267,875,863.00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara	130,570,000.00
4	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman	5,624,434,891.00
5	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1,020,706,304.00
6	Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana kebersihan dan lingkungan	2,471,235,109.00
7	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas	9,453,731,514.00
Jumlah		157.938.496.455,00

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun 2011 dan 2010 dianggarkan sebesar Rp.389.506.730.552,00 dan Rp. 566.358.368.623,00 terealisasi sebesar Rp.102.454.759.850,00 atau sebesar 26,30% dan Rp. 482.365.036.576,00 atau sebesar 78,36% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2011 sebesar Rp102.454.759.850,00 sebagai berikut :

No.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	55,123,530,056.00
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	835,398,579.00
3	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku	1,289,923,105.00
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	4,156,386,390.00
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pematusan	22,921,485,390.00
6	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1,791,245,438.00
7	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Organik dan Non Organik	128,328,500.00
8	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	178,092,373.00
9	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	16,030,370,019.00
Jumlah		102.454.759.850,00

e. Belanja Aset Tetap lainnya.

Pada tahun 2011 dan 2010 dianggarkan sebesar Rp. 14.841.975.060,00 dan Rp. 19.377.396.718,00 terealisasi sebesar Rp.1.602.454.313,00 atau sebesar 10,79% dan Rp. 1.194.491.914,00 atau sebesar 6,16% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2011 sebesar Rp1.602.454.313,00 sebagai berikut :

No.	Belanja Aset Tetap Lainnya	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Buku	55,982,850.00
2	Belanja Modal Pengadaan Barang - Barang Perpustakaan	488,378,000.00
3	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	313,500,000.00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga	734,612,998.00
5	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak	9,980,465.00
Jumlah		1.602.454.313,00

f. Belanja Aset Lainnya (**Lampiran 37**)

Belanja Aset Tak Berwujud pada tahun 2011 dan 2010 dianggarkan sebesar Rp.2.346.431.078,00 dan Rp. 2.498.431.600,00 terealisasi sebesar Rp.1.525.154.380,00 atau sebesar 65,00% dan Rp. 1.217.291.700,00 atau sebesar 48,72%.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2011 dan tahun 2010

dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 dan Rp.10.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.156.768.500,00 dan Rp.502.550.000,00.

4. Transfer

Pada Tahun 2011 Transfer dianggarkan Rp3.190.280.754,00 yang merupakan Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Sidoarjo untuk bagi hasil Retribusi Terminal Purabaya, namun tidak direalisasikan. Sedangkan pada Tahun 2010 anggaran dan realisasi Transfer adalah Rp0,00

Dalam pengelolaan belanja, Pemerintah Kota Surabaya menekankan tentang penggunaan Belanja Daerah yang harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan.

Pada Tahun 2011 dan tahun 2010 untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp.5.195.102.211.727,00 dan Rp. 4.362.711.850.644,86 sedangkan realisasinya sebesar Rp.3.753.710.587.890,80 dan Rp. 3.637.069.260.868,48 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

Nomor	Nama SKPD	Jumlah			Bertambah / (Berkurang)
		Anggaran	Realisasi 2011	Realisasi 2010	
1	Dinas Pendidikan	1,458,608,246,445.00	1,242,832,712,106.80	1,042,340,011,238.67	(215,775,534,338.20)
2	Dinas Kesehatan	298,232,966,710.00	317,487,667,328.00	177,067,855,455.00	19,254,700,618.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soew andhie	99,775,882,204.00	72,450,083,118.00	65,596,564,216.00	(27,325,799,086.00)
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	123,816,392,735.00	46,094,229,353.00	33,306,240,122.00	(77,722,163,382.00)
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	721,512,005,326.00	308,462,459,027.00	572,300,172,470.00	(413,049,546,299.00)
6	Dinas Kebakaran	47,676,737,876.00	35,843,220,744.00	37,413,357,146.00	(11,833,517,132.00)
7	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	65,893,186,490.00	20,896,279,555.00	18,163,544,516.00	(44,996,906,935.00)
8	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	308,180,799,481.00	151,074,662,893.00	333,539,517,361.81	(157,106,136,588.00)
9	Badan Perencanaan Pembangunan	31,562,447,533.00	20,544,267,505.00	21,046,556,979.00	(11,018,180,028.00)
10	Dinas Perhubungan	126,336,071,136.00	103,585,973,711.00	71,405,195,111.00	(22,750,097,425.00)
11	Badan Lingkungan Hidup	18,680,046,419.00	15,438,414,208.00	13,002,535,507.00	(3,241,632,211.00)
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	299,276,549,215.00	248,471,877,492.00	236,021,794,303.00	(50,804,671,723.00)
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	23,342,754,486.00	13,634,888,467.00	9,103,133,895.00	(9,707,866,019.00)
14	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	35,467,266,316.00	28,533,796,132.00	31,820,558,836.00	(6,933,470,184.00)
15	Dinas Sosial	28,761,269,344.00	24,827,854,365.00	22,699,434,244.00	(3,933,414,979.00)
16	Dinas Tenaga Kerja	29,704,819,049.00	21,623,086,572.00	19,932,246,448.00	(8,081,732,477.00)
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	22,094,227,386.00	15,223,366,120.00	12,641,811,696.00	(6,870,861,266.00)
18	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal	10,816,195,283.00	8,625,269,543.00	5,830,233,616.00	(2,190,925,740.00)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26,540,300,718.00	23,893,948,986.00	17,709,867,691.00	(2,646,351,732.00)
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	68,436,009,893.00	45,387,558,724.00	12,157,979,603.00	(23,048,451,169.00)

21	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	16,657,195,457.00	14,704,928,339.00	14,599,237,471.00	(1,952,267,118.00)
22	Satuan Polisi Pamong Praja	32,751,170,204.00	26,520,029,306.00	17,047,890,006.00	(6,231,140,898.00)
23	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15,889,281,230.00	14,398,213,780.00	12,437,962,383.00	(1,491,067,450.00)
24	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,415,245,477.00	1,387,080,525.00	1,375,696,989.00	(28,164,952.00)
25	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5,645,522,918.00	4,855,460,504.00	4,273,978,258.00	(790,062,414.00)
26	Bagian Hukum	7,554,419,153.00	5,507,366,628.00	5,116,187,838.00	(2,047,052,525.00)
27	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	4,137,731,083.00	3,588,701,747.00	3,073,031,905.00	(549,029,336.00)
28	Bagian Kerjasama	8,018,702,064.00	6,298,227,285.00	4,138,769,997.00	(1,720,474,779.00)
29	Bagian Bina Program	11,351,679,438.00	9,248,493,551.00	9,889,587,115.00	(2,103,185,887.00)
30	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	2,204,660,224.00	1,992,287,905.00	1,635,388,332.00	(212,372,319.00)
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2,978,601,369.00	2,336,451,612.00	1,545,803,759.00	(642,149,757.00)
32	Bagian Umum dan Protokol	44,774,533,064.00	39,596,168,561.00	31,363,484,814.00	(5,178,364,503.00)
33	Bagian Perlengkapan	76,792,068,547.00	52,919,063,729.00	65,729,266,942.00	(23,873,004,818.00)
34	Bagian Hubungan Masyarakat	7,272,987,898.00	6,280,883,044.00	4,757,632,446.00	(992,104,854.00)
35	Sekretariat DPRD	74,173,901,617.00	41,128,422,432.00	41,112,426,733.00	(33,045,479,185.00)
36	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	607,398,973,867.00	423,444,310,438.00	405,750,777,136.00	(183,954,663,429.00)
37	Inspektorat	11,324,457,487.00	9,965,184,574.00	11,093,026,895.00	(1,359,272,913.00)
38	Kecamatan Genteng	8,686,442,286.00	7,563,721,776.00	4,969,737,391.00	(1,122,720,510.00)
39	Kecamatan Simokerto	7,571,676,053.00	6,219,421,161.00	4,306,215,607.00	(1,352,254,892.00)
40	Kecamatan Tegalsari	8,362,239,840.00	7,219,452,403.00	4,695,834,718.00	(1,142,787,437.00)
41	Kecamatan Bubutan	8,370,125,093.00	6,852,291,913.00	4,784,369,648.00	(1,517,833,180.00)
42	Kecamatan Kenjeran	7,252,703,817.00	5,814,837,672.00	3,808,116,182.00	(1,437,866,145.00)
43	Kecamatan Pabean Cantian	8,125,071,995.00	6,518,365,172.00	4,337,759,784.00	(1,606,706,823.00)
44	Kecamatan Semampir	9,112,458,952.00	6,828,148,235.00	4,427,023,569.00	(2,284,310,717.00)
45	Kecamatan Krembangan	7,978,518,847.00	6,949,868,294.00	4,462,535,517.00	(1,028,650,553.00)
46	Kecamatan Tambaksari	10,473,520,080.00	8,355,419,681.00	4,976,879,200.00	(2,118,100,399.00)
47	Kecamatan Gubeng	9,294,630,610.00	7,958,689,591.00	5,267,201,194.00	(1,335,941,019.00)
48	Kecamatan Rungkut	8,931,732,501.00	7,119,257,698.00	4,764,910,435.00	(1,812,474,803.00)
49	Kecamatan Gunung Anyar	6,516,226,512.00	5,541,520,452.00	3,599,753,086.00	(974,706,060.00)
50	Kecamatan Tenggiling Mejoyo	6,352,941,230.00	5,152,863,735.00	3,829,396,840.00	(1,200,077,495.00)
51	Kecamatan Sukolilo	8,798,047,622.00	7,248,256,223.00	4,802,724,390.00	(1,549,791,399.00)
52	Kecamatan Mulyorejo	8,581,488,060.00	6,805,046,821.00	4,490,433,718.00	(1,776,441,239.00)
53	Kecamatan Wonokromo	10,570,486,833.00	8,614,122,619.00	5,563,685,735.00	(1,956,364,214.00)
54	Kecamatan Karang Pilang	6,639,529,802.00	5,906,660,920.00	3,853,143,414.00	(732,868,882.00)
55	Kecamatan Dukuh Pakis	6,392,368,353.00	5,165,699,555.00	3,583,981,881.00	(1,226,668,798.00)
56	Kecamatan Gayungan	6,416,914,919.00	5,891,656,206.00	3,825,982,325.00	(525,258,713.00)
57	Kecamatan Jambangan	6,057,012,708.00	5,309,326,777.00	3,403,233,471.00	(747,685,931.00)
58	Kecamatan Wonocolo	7,664,930,165.00	6,567,971,368.00	4,474,071,384.00	(1,096,958,797.00)
59	Kecamatan Sawahan	10,583,010,642.00	8,570,342,094.00	5,636,816,957.00	(2,012,668,548.00)
60	Kecamatan Wiyung	6,176,501,070.00	5,178,867,263.00	3,344,245,069.00	(997,633,807.00)

61	Kecamatan Tandes	9,160,969,222.00	6,879,722,428.00	5,688,465,849.00	(2,281,246,794.00)
62	Kecamatan Asem Row o	5,883,487,403.00	4,724,023,306.00	3,433,570,624.00	(1,159,464,097.00)
63	Kecamatan Sukomanunggal	7,133,445,530.00	6,020,596,553.00	3,860,663,870.00	(1,112,848,977.00)
64	Kecamatan Benow o	6,578,589,299.00	5,254,142,872.00	3,591,017,983.00	(1,324,446,427.00)
65	Kecamatan Lakarsantri	7,648,426,859.00	6,540,525,831.00	4,294,807,748.00	(1,107,901,028.00)
66	Kecamatan Sambikerep	6,072,647,004.00	4,881,355,956.00	3,305,863,724.00	(1,191,291,048.00)
67	Kecamatan Pakal	6,776,434,083.00	5,868,730,021.00	3,767,364,549.00	(907,704,062.00)
68	Kecamatan Bulak	6,966,645,556.00	5,027,315,782.00	3,387,299,979.00	(1,939,329,774.00)
69	Badan Kepegaw aian dan Diklat	41,164,265,445.00	18,949,219,290.00	23,640,527,931.00	(22,215,046,155.00)
70	Kantor Ketahanan Pangan	2,767,743,191.00	2,557,156,475.00	1,609,762,052.00	(210,586,716.00)
71	Dinas Komunikasi dan Informatika	39,640,762,600.00	33,716,851,762.00	22,394,939,003.00	(5,923,910,838.00)
72	Badan Arsip dan Perpustakaan	17,949,833,904.00	16,180,169,694.00	13,064,908,043.00	(1,769,664,210.00)
73	Dinas Pertanian	45,768,986,871.00	27,403,678,974.00	33,952,616,482.00	(18,365,307,897.00)
74	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	31,626,091,628.00	27,252,227,408.00	21,830,642,043.00	(4,373,864,220.00)
JUMLAH		5,195,102,211,727.00	3,753,710,413,890.80	3,637,069,260,868.48	(1,441,391,797,836.20)

5.2.3. Penjelasan Pos-Pos Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup Defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran, sedangkan Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Neto tahun anggaran 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.497.675.249.831,35 dan Rp. 1.537.132.415.388,39 apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp.1.223.413.607.402,00 dan Rp.1.091.290.617.867,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp.725.735.357.570,65 dan selisih lebih sebesar Rp. 445.841.797.521,39. Perangkaan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2011 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut :

Ko de	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	1.234.413.607.402	505.770.166.765,28	(728.643.440.636,72)	40,97
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0	2.865.831.392,07	2.865.831.392,07	-

3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0		
Jumlah Penerimaan		1.234.413.607.402	508.635.998.157,35	(725.777.609.244,65)	41,20
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	0	0	0	0
3.2.3	Pembayaran pokok utang	11.000.000.000,00	10.960.748.326,00	(39.251.674,00)	99,64
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0
Jumlah Pengeluaran		11.000.000.000,00	10.960.748.326,00	(39.251.674,00)	99,64
Pembiayaan Neto		1.223.413.607.402,00	497.675.249.831,35	(725.738.357.570,65)	40,68
3.3	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	502.999.263.251,27	502.999.263.251,27	-

Sedangkan Perangkaan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2010 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut :

Ko de	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	1.112.291.1947.272,00	1.112.291.194.271,90	0,00	100
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	7.486.643.790,49	(7.486.643.790,49)	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00		
Jumlah Penerimaan		1.579.082.113.082	1.119.777.838.062,39	(459.304.275.019,61)	100
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	10.000.576.405,00	10.000.576.405,00	0,00	100
3.2.3	Pembayaran pokok utang	11.000.000.000,00	10.960.748.326,00	(19.251.674)	99,64
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Pengeluaran		21.000.576.405,00	20.961.324.731,00	(39.251.674)	99,74
Pembiayaan Neto		1.091.290.617.867,00	1.098.816.513.331,39	7.525.895.464,39	100
3.3	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	505.872.044.220,28	(505.872.044.220,28)	-

a. Pembiayaan Penerimaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2011 dan Tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp1.234.413.607.402,00 dan Rp1.112.291.194.271,90, terealisasi sebesar Rp508.635.998.157,35 dan Rp1.119.777.838.062,39 atau 41,20% dan 100,6. Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari dari Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah.

b. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA)

Pada Tahun 2011 dan Tahun 2010, Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) dianggarkan sebesar Rp1.234.413.607.402,00 dan Rp1.112.291.194.271,90, terealisasi sebesar Rp505.770.166.765,28

dan Rp1.112.291.194.271,90 atau 40,97% dan 100%, berasal dari SiLPA tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2011, Realisasi Penggunaan SiLPA lebih rendah sebesar Rp728,643,440,636.72 dari anggaran yang ditetapkan dan lebih rendah sebesar Rp101.877.455,00 dari realisasi SiLPA Tahun 2010. Hal itu dengan penjelasan sebagai berikut :

- Anggaran sebesar Rp1.234.413.607.402,00 merupakan APBD Murni Tahun 2011 (proses penyusunannya dimulai sejak 2010) dengan mendasari realisasi SiLPA 2009, yaitu sebesar Rp1.112.291.194.271,90, karena realisasi SiLPA Tahun 2010 belum diketahui. Setelah diketahui realisasi SiLPA Tahun 2010 sebesar Rp505.872.044.220,28, hal itu akan diakomodir pada APBD Perubahan Tahun 2011. Ternyata DPRD tidak mengesahkan Raperda Perubahan APBD Tahun 2011 yang diajukan Eksekutif, sehingga anggaran yang digunakan adalah APBD Murni;
- Realisasi SiLPA Tahun 2010 sebesar Rp505.872.044.220,28, namun Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pada Tahun 2011 sebesar Rp505.770.166.765,28 atau lebih rendah Rp101.877.455,00. Hal itu dikarenakan SiLPA Tahun 2010 sebesar Rp505.872.044.220,28, termasuk di dalamnya tagihan terhadap Anggota DPRD Kota Surabaya Tahun 2004 sebesar Rp101.877.455,00, yang sampai dengan 31 Desember 2011 belum diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya.

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Pada Tahun 2011 dan Tahun 2010, Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah dianggarkan masing-masing sebesar Rp0,00. Namun terdapat realisasi penerimaan yang berasal dari pengembalian dana bergulir, yaitu:

- Tahun 2011 sebesar Rp2.865.831.392,07, terdiri dari Dinas Koperasi sebesar Rp2.267.833.333 serta dari Bapermas dan KB sebesar Rp597.998.059,07 atas pengembalian dana talangan raskin;
- Tahun 2010 sebesar Rp7.486.643.790,49, terdiri dari Dinas Koperasi sebesar Rp7.402.644.982,90 serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp83.998.807,59 dan .

d. Pembiayaan Pengeluaran

Pembiayaan Pengeluaran terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri

e. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2011 tidak dianggarkan penyertaan modal dan Tahun 2010 dianggarkan penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sebesar Rp10.000.576.405,00 dan direalisasi sebesar Rp10.000.576.405,00 atau 100%

f. Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri

Pada Tahun 2011 dan Tahun 2010 Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat masing-masing dianggarkan sebesar Rp11.000.000.000,00 dan direalisasi sebesar Rp10.960.748.326,00, yang merupakan pembayaran pokok pinjaman utang Pemerintah Pusat Loan dan pembayaran pokok pinjaman utang Pemerintah Pusat Loan IBRD 3726-IND PPP SLA-764/DP3/1994.

5.2.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2011 dan 2010 sebesar Rp502.999.263.251,27 dan Rp505.872.044.200,28 terdiri dari :

Uraian	2011	2010
SILPA Pemkot	Rp 81.255.833.664,66	Rp505.654.432.154,36
SILPA BLUD RS dr Soewandhie	Rp 21.743.429.586,61	Rp 217.612.065,92
Jumlah	Rp 502.999.263.251,27	Rp 505.872.044.200,28

5.3. PENJELASAN KOMPONEN – KOMPONEN ARUS KAS

A. INFORMASI UMUM

Pengelolaan pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan penyajian laporan keuangan yang handal, tepat waktu dan dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Surabaya harus menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD. Untuk hal

tersebut Pemerintah Kota Surabaya berinisiatif menyusun laporan keuangan dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kota Surabaya telah mengimplementasikan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (SABK) dan Sistem Administrasi Penatausahaan Anggaran (SAPA) menghasilkan antara lain laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas dan Neraca sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165), Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan kedua kali dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

❖ Penyajian Laporan Keuangan

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

❖ **Laporan Arus Kas** adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas pada awal dan pada akhir periode akuntansi.

Arus kas disajikan ke dalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran (Perhitungan Pihak Ketiga).

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi.

Arus bersih kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan:

- Pendapatan Pajak Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak
- Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
- Pendapatan dari Dana Alokasi Umum
- Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus
- Pendapatan dari Dana Penyesuaian
- Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Propinsi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Tidak Terduga
- Belanja Bagi Hasil

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap yang bertujuan untuk meningkatkan dan menunjang operasi pemerintahan dan menghasilkan potensi pendapatan daerah di masa datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/penjualan aset tetap.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan diperoleh dari pembelian aset tetap atau belanja modal.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas pembiayaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana pembiayaan, yang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari :

- Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan
- Penerimaan Kembali Pinjaman

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari :

- Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi
- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal (investasi jangka panjang)
- Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah Lainnya

d. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas keuangan pemerintah yang tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Transaksi non anggaran berasal dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Transaksi Non anggaran meliputi:

1. Arus Masuk Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) yaitu penerimaan kas daerah yang berasal dari potongan pembayaran (SP2D), seperti Pajak penghasilan, potongan Taspen, Askes, Taperum dan potongan untuk pihak ketiga lainnya.

2. Arus Keluar Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) yaitu pengeluaran kas daerah untuk penyetoran pungutan atau potongan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang berhak.

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

	<u>Tahun 2011</u>	<u>Tahun 2010</u>
1. Arus Kas dari	Rp 526.273.340.988,23	Rp 436.047.194.693,70
Aktivitas Operasi		

Arus Kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2011 dan Tahun 2010 masing-masing surplus sebesar Rp.526.273.340.988,23 dan Rp.435.829.582.627,78. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

<u>Arus Masuk Kas:</u>	<u>Tahun 2011 (Rp)</u>	<u>Tahun 2010 (Rp)</u>
Pajak Daerah	1,488,358,147,753.27	525,403,484,538.00
Retribusi Daerah	209,834,317,887.85	183,312,246,927.48
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	75,962,115,305.92	63,304,547,605.63
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	75,972,538,598.99	117,079,090,924.34
Dana Bagi Hasil Pajak	225,590,330,815.00	726,559,911,282.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	8,692,232,539.00	6,536,131,410.00
Dana Alokasi Umum	679,262,759,000.00	652,532,472,000.00
Dana Alokasi Khusus	49,874,625,000.00	59,885,800,000.00
Dana Penyesuaian	386,951,310,320.00	203,857,336,800.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	509,508,087,368.00	441,429,059,739.00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi	1,551,780,688.00	2,520,802,796.00
Pendapatan Hibah	600,000,000.00	0.00
Bantuan Keuangan Propinsi	10,364,000,000.00	22,073,350,000.00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	125,000,000.00	20,082,152,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas	3,722,647,245,276.03	3,024,576,386,022.45
<u>Arus Keluar Kas:</u>		
Belanja Pegawai	1,711,126,696,293.00	1,433,022,731,280.00
Belanja Barang dan Jasa	1,154,752,171,534.80	848,903,215,231.67
Belanja Bunga	2,903,307,374.00	3,620,536,118.00
Belanja Hibah	325,744,017,586.00	314,281,597,886.00
Belanja Bantuan Sosial	1,046,730,000.00	701,000,000.00
Belanja Bantuan Keuangan	644,213,000.00	1,044,213,000.00
Belanja Tidak Terduga	156,768,500.00	502,550,000.00
Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar	3,196,373,904,287.80	2,602,075,843,515.67
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	526,273,340,988.23	422,500,542,506.78

Jumlah Arus Masuk Kas Tahun 2011 dan 2010 dari Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar Rp.1.488.358.147.753,27 dan Rp 525.403.484.538,00 terdiri dari :

Pajak Hotel	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Pajak Hotel	108,205,704,969.00	100,508,232,155.00
Pajak Restoran	131,138,493,688.00	115,459,616,842.00
Pajak Hiburan	29,896,451,597.00	26,612,846,480.00
Pajak Reklame	90,232,362,728.38	98,705,063,186.00
Pajak Penerangan Jalan	192,089,354,040.00	165,055,792,194.00
Pajak Parkir	21,841,038,427.00	19,061,933,681.00
Pajak Bumi dan Bangunan	498,640,108,489.44	0.00
BPHTB	416,314,633,814.45	0.00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak	1,488,358,147,753.27	525,403,484,538.00

Dengan perincian sebagai berikut :

	Kelompok Pajak Daerah	2011	2010
	Pajak Hotel		
1	Hotel Bintang Lima	48,498,946,295.00	48,701,140,386.00
2	Hotel Bintang Empat	33,161,633,048.00	29,609,915,771.00
3	Hotel Bintang Tiga	13,250,126,618.00	11,493,953,641.00
4	Hotel Bintang Dua	854,956,285.00	124,496,007.00
5	Hotel Bintang Satu	866,991,402.00	862,371,955.00
6	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	124,625,292.00	0.00
7	Hotel Non Bintang	11,448,426,029.00	9,716,354,395.00
	Jumlah	108,205,704,969.00	100,508,232,155.00
	Pajak Restoran		
1	Restoran	128,035,607,367.00	115,459,616,842.00
2	Katering	3,102,886,321.00	0.00
	Jumlah	131,138,493,688.00	115,459,616,842.00
	Pajak Hiburan		
1	Tontonan Film / Bioskop	10,258,102,550.00	11,006,711,000.00
2	Hiburan Non Bioskop	16,938,614,096.00	14,100,635,567.00
3	Hiburan Insidentil	2,699,734,951.00	1,505,499,913.00
	Jumlah	29,896,451,597.00	26,612,846,480.00
	Pajak Reklame		
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	73,759,389,678.38	83,535,062,686.00
2	Reklame Insidentil	16,472,973,050.00	15,170,000,500.00
	Jumlah Pajak Reklame	90,232,362,728.38	98,705,063,186.00
	Pajak Penerangan Jalan		
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	191,561,854,077.00	164,260,666,249.00
2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	527,499,963.00	795,125,945.00
	Jumlah	192,089,354,040.00	165,055,792,194.00
	Pajak Parkir		
1	Pajak Parkir	21,841,038,427.00	19,061,933,681.00
	Jumlah	21,841,038,427.00	19,061,933,681.00

Pajak Bumi Bangunan			
1	Pajak bumi Bangunan	498,640,108,489.44	0.00
Jumlah		498,640,108,489.44	0.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	416,314,633,814.45	0.00
Jumlah		416,314,633,814.45	0.00
Total		1,488,358,147,753.27	525,403,484,538.00

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.209.817.967.777,85 dan Rp 183.312.246.927,48 terdiri dari:

Retribusi	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	108,689,088,799.05	93,791,169,036.20
Retribusi Jasa Usaha	39,709,531,900.80	52,710,878,825.28
Retribusi Perijinan Tertentu	61,435,697,188.00	36,810,199,066.00
Jumlah	209,834,317,887.85	183,312,246,927.48

Retribusi Jasa Umum tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.108.689.088.799,05 dan Rp 93.791.169.036,20 terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	15,307,167,500.00	8,050,908,857.00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)	22,800,700,465.72	28,395,284,949.20
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil (Dinas Catatan Sipil)	2,446,107,500.00	8,356,978,500.00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)	607,595,000.00	668,320,000.00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dinas Perhubungan)	11,153,519,500.00	10,291,803,500.00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	12,286,136,900.00	7,253,706,500.00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Dinas Kebakaran)	1,755,553,278.00	1,343,861,820.00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	37,966,032,982.00	29,430,298,910.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Bhakti Darma Husada	4,235,326,173.33	0.00
Retribusi Penyedotan Kakus (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)	130,949,500.00	0.00
Jumlah	108,689,088,799.05	93,791,163,036.20

Retribusi Jasa Usaha tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.39.709.531.900,80 dan Rp 52.710.878.825,28 terdiri dari:

Retribusi Jasa Usaha	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	454,856,825.00	440,279,900.00
Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan)	6,336,819,000.00	5,907,532,030.00
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan)	1,178,881,500.00	1,166,488,000.00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)	0.00	152,589,500.00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2,317,068,098.00	2,179,294,580.00
Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan)	27,556,081,533.61	38,740,649,772.28
Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota (Dinas Bangunan Tanah dan Rumah)	499,938,815.19	310,543,530.00
Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI (Dinas Pariwisata)	300,550,250.00	308,600,000.00
Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya (Dinas Pemuda dan Olah Raga)	37,670,000.00	43,420,000.00
Pemakaian Gedung Serba Guna (Bagian Umum dan Protokol)	583,257,500.00	460,022,500.00
Uang atas Pemakaian Tanah (Dinas Bangunan Tanah dan Rumah)	438,888,379.00	2,430,602,863.00
Pemakaian Alat-alat Berat (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan)	0.00	13,342,000.00
Penggunaan Ruang Terbuka Hijau (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	5,520,000.00	551,594,150.00
Sewa Bus/Truk	0.00	5,920,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Retribusi Jasa Usaha	39,709,531,900.80	52,710,878,825.28

Retribusi Perijinan Tertentu tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.60.153.509.138,00 dan Rp. 36.810.199.066,00 terdiri dari:

Retribusi Perijinan Tertentu	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	53,281,732,773.00	26,292,804,166.00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	7,479,458,535.00	8,095,641,800.00
Retribusi Izin Trayek (Dinas Perhubungan)	657,005,880.00	646,854,600.00
Retribusi Ijin Jasa Konstruksi	17,500,000.00	653,500,000.00
Retribusi Izin Potong Pohon	0.00	396,000,000.00
Retribusi Izin di Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal	0.00	725,398,500.00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Retribusi Perijinan Tertentu	61,435,697,188.00	36,810,199,066.00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.75.962.115.305,92 dan Rp. 63.304.547.605,63 terdiri dari :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	71,785,523,872.92	61,162,413,655.63
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)	3,926,591,433.00	1,842,133,950.00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta PT STAR / Taman Remaja Surabaya	250,000,000.00	300,000,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	75,962,115,305.92	63,304,547,605.63

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) terdiri dari :

Penyertaan Modal	31 Desember 2010 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Perusahaan Daerah Air minum	50,002,870,000.00	49,458,638,900.00
Perusahaan Daerah Pasar Surya	447,933,805.00	1,587,975,084.00
Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan	320,055,291.00	54,028,191.00
P.T Bank Pembangunan Daerah Jatim	20,995,680,776.92	10,042,787,480.63
P.T Perkreditan Rakyat Jatim	18,984,000.00	18,984,000.00
Jumlah	71,785,523,872.92	61,162,413,655.63

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN) adalah bagian laba PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta adalah bagian laba PT.STAR / Taman Remaja Surabaya.

Jumlah Arus Masuk Kas dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.75.972.538.408,99 dan Rp.117.079.090.924,34, terdiri dari :

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Penerimaan Jasa Giro	7,304,298,879.85	3,170,651,018.72
Bunga Deposito	32,043,150,684.57	58,253,219,177.50
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	65,206,000.00	18,000,000.00
Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1,961,572,562.00	2,426,473,346.00
Hasil Eksekusi Atas Jaminan	821,811,346.00	412,468,400.00
Pendapatan Pengembalian	635,537,870.00	836,389,052.00
Penerimaan Lain-Lain	33,140,961,066.57	51,961,889,930.12
Jumlah	75,972,538,408.99	117,079,090,924.34

Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan bagi hasil pajak tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.225.590.330.815,00 dan Rp. 726.559.911.282,00 terdiri dari :

Bagi Hasil Pajak	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Pajak Bumi dan Bangunan	41,788,454,750.00	341,759,567,832.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0.00	235,436,405,710.00
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, 29 dan 21	163,995,617,981.00	133,826,567,326.00
Cukai Hasil Tembakau	19,806,258,084.00	15,537,370,414.00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak	225,590,330,815.00	726,559,911,282.00

Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan bagi hasil bukan pajak tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.8.692.232.539,00 dan Rp. 6.536.131.410,00 terdiri dari:

Bagi Hasil Bukan Pajak	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0.00	0.00
Provisi Sumber Daya Hutan	315,914,627.00	239,235,469.00
Iuran Eksplorasi dan Iuran eksploitasi (Royalti)	13,954,798.00	5,939,338.00
Pungutan Hasil Perikanan	261,048,242.00	133,334,511.00
Pertambangan Minyak Bumi	7,830,508,597.00	6,064,062,267.00
Pertambangan Gas Bumi	270,806,275.00	93,559,825.00
Jumlah	8,692,232,539.00	6,536,131,410.00

Jumlah Arus Masuk kas dari Dana Alokasi Umum untuk Tahun 2011 adalah sebesar Rp.679.262.759.000,00 dan pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp.652.532.472.000,00.

Jumlah Arus Masuk Kas dari Dana Alokasi Khusus untuk tahun 2011 sebesar Rp.49.874.625.000,00,00 dan pada Tahun 2010 sebesar Rp.59.885.800.000,00. Dana Alokasi Khusus tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi.

Jumlah Arus Masuk Kas dari Dana Penyesuaian tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.386.951.310.320,00 dan Rp. 203.857.336.800,00 Terdiri dari

Dana Penyesuaian	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009	10,083,000,000.00	12,771,000,000.00
Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010	213,022,713,320.00	182,755,136,800.00
Dana Penyesuaian DPPIP (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan)	0.00	3,481,200,000.00
Dana Penyesuaian DPIP (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah)	0.00	4,850,000,000.00
Dana BOSNAS SD dan SMP Negeri/Swasta	158,237,700,000.00	0.00
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	5,607,897,000.00	0.00
Jumlah Arus Masuk kas dari Dana Penyesuaian	386,951,310,320.00	203,857,336,800.00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.509.508.087.368,00 dan Rp. 441.429.059.739,00 yang terdiri dari :

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	175,873,740,308.00	157,852,320,761.00
Bea Nalik Nama Kendaraan Bermotor	224,423,979,609.00	173,344,179,621.00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	107,780,987,601.00	108,126,398,851.00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	93,091,037.00	359,280,034.00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1,289,775,531.00	1,720,559,861.00
Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)	46,513,282.00	26,320,611.00
Jumlah Arus Masuk kas dari Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	509,508,087,368.00	441,429,059,739.00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.1.551.780.688,00 dan Rp. 2.520.802.796,00 yang terdiri dari:

Bagi Hasil Lainnya Provinsi	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Ijin Memperpanjang Tenaga Asing (IMTA)	0.00	1,362,839,186.00
Bagi Hasil RP3HH	1,330,032,938.00	858,142,840.00
Retribusi TERA	221,747,750.00	299,820,770.00
Jumlah	1,551,780,688.00	2,520,802,796.00

Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan hibah sebesar Rp.600.000.000,00 dari PT Grande Family View dan PT Dian Permana masing-masing sebesar Rp.300.000.000,00 untuk partisipasi dana pembangunan saluran Kali Kendal Kecamatan Wiyung.

Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp.10.364.000.000,00 merupakan bantuan keuangan yang diterima dari propinsi tahun 2011 dan Lain-lain Pendapatan yang Daerah yang Sah berupa hadiah pemenang lomba PPA terbaik kategori Kabupaten/Kota sebesar Rp.125.000.000,00.

Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Pegawai tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp. 1.711.126.696.293,00 dan Rp 1.432.945.646.316,00 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Belanja Pegawai	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Belanja Tidak Langsung	1.377.173.082.114,00	1.164.775.473.851,00
Belanja Langsung	333.953.614.179,00	268.170.172.465,00
Jumlah Arus Keluar Kas Belanja Pegawai	1.711.126.696.293,00	1.432.945.646.316,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.1.154.752.171.534,80 dan Rp. 835.651.260.074,67.

Jumlah Belanja Bunga tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.2.903.307.374,00 dan Rp. 3.620.536.118,00 merupakan Belanja Bunga untuk pinjaman Loan IBRD No 3726 No. SLA 764 DP3 1994.

Jumlah Belanja Bantuan Hibah (**Lampiran 35**) Tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.325.744.017.586,00 dan Rp. 314.281.597.886,00 yang terdiri dari :

Belanja Hibah	31 Desember 2011 Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Hibah Kepada Pemda Lainnya	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta	287.325.955.045,00	250.818.352.191,00
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	38.418.062.541,00	15.173.136.850,00
Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	0,00	48.290.108.845,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Hibah	325.744.017.586,00	314.281.597.886,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial (**Lampiran 36**) tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp1.046.730.000,00 dan Rp. 701.000.000,00 yang terdiri dari:

Belanja Bantuan Sosial	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	43,700,000.00	0.00
Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	38,000,000.00	232,000,000.00
Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	965,030,000.00	469,000,000.00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Bantuan Sosial	1,046,730,000.00	701,000,000.00

Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp.644.213.000,00 dan Rp.1.044.213.000,00.

Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota	0.00	400,000,000.00
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	644,213,000.00	644,213,000.00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	644,213,000.00	1,044,213,000.00

Jumlah Belanja Tak Terduga pada Tahun 2011 sebesar Rp.156.768.500,00 merupakan pengembalian Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru dan telah disetor ke Rekening Kas Umum Negara pada tahun 2011, sedangkan belanja tersebut Tahun 2010 sebesar 502.550.000.

	31 Desember 2011	31 Desember 2009
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp (542.475.145.089,00)	Rp (1.028.991.663.804,81)

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun 2011 dan Tahun 2010 masing-masing defisit sebesar Rp. 542.475.145.089,00 dan Rp.1.028.991.663.804,81. Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus masuk kas investasi dikurangi dengan arus keluar kas investasi.

Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2011 dan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Arus Masuk Kas	2011 (Rp)	2010 (Rp)
Penjualan atas Tanah	0.00	1,233,000,000.00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin (Perlengkapan/Peralatan kantor tak terpakai)	636,500,900.00	4,768,753,548.00
Jumlah Arus Masuk Kas Investasi	636,500,900.00	6,001,753,548.00
Arus Keluar Kas		
Belanja Modal	543,111,645,989.00	1,034,993,417,352.81
Jumlah Arus Keluar Kas Investasi	543,111,645,989.00	1,034,993,417,352.81
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(542,475,145,089.00)	(1,028,991,663,804.81)

Arus Masuk Kas dari penjualan atas peralatan/perlengkapan kantor tak terpakai senilai Rp. 636.500.900,00,00 merupakan hasil dari penjualan alat kantor yang sudah tidak terpakai dan penjualan bekas bongkaran rehab gedung-gedung seperti gedung SDN, bongkaran paving, penjualan kursi eks Mitra dan dan penjualan bekas incinerator ex Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Arus Keluar Kas Tahun 2011 dan Tahun 2010 sebesar Rp.543.111.645.989,00 dan Rp. 1.034.993.417.352,81,00 merupakan Belanja Modal atas aset tetap sebagai berikut :

	31 Desember 2011 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
Belanja Modal Tanah	100,486,009,000.00	8,586,734,209.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179,104,771,991.00	194,053,579,115.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157,938,496,455.00	347,576,283,838.81
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Instalasi	102,454,759,850.00	482,365,036,576.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,602,454,313.00	1,194,491,914.00
Belanja Modal Aset Lainnya / Tidak Berwujud	1,525,154,380.00	1,217,291,700.00
Jumlah Arus Keluar Kas Investasi	543,111,645,989.00	1,034,993,417,352.81

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp 8.094.916.933,93)	(Rp 13.474.680.940,51)

Arus kas dari aktivitas pembiayaan Tahun 2011 dan Tahun 2010 masing-masing defisit sebesar Rp. 8.094.916.933,93 dan Rp. 13.474.680.940,51. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas pembiayaan yaitu arus masuk kas pembiayaan dikurangi dengan arus keluar kas pembiayaan. Jumlah Arus Masuk Kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp.2.865.831.392,07 merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman dari dana bergulir dari Dinas Koperasi.

Jumlah Arus Keluar Kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp.10.960.748.326,00 merupakan pembayaran Pokok Utang Pemerintah Pusat Loan IBRD 3726 –IND No SLA- 764/DP3/1994.

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	(Rp 6.170.648.371,61)	(Rp 9.847.188.223,39)

Arus kas dari aktivitas non anggaran tahun 2011 defisit sebesar (Rp.6.170.648.371,61) dan tahun 2010 defisit sebesar (Rp.9.847.188.223,39). Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari arus masuk kas non anggaran (Perhitungan Fihak Ketiga-PFK) dikurangi dengan arus keluar kas non anggaran (PFK).

Rincian arus kas dari aktivitas non anggaran Tahun 2011 dan Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
<u>Arus Masuk Kas</u>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp 82.690.227.345,00	Rp 253.464.140.850,61
Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu	Rp 11.315.493.815,00	Rp 6.239.987.283,00
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp 94.005.721.160,00	Rp 259.704.128.133,61
<u>Arus Keluar Kas</u>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp 100.170.296.864,61	Rp 257.080.448.990,00
Pengeluaran Sisa UP tahun berjalan	Rp 6.072.667,00	Rp 12.470.867.367,00
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp 100.176.369.531,61	Rp 269.551.316.357,00
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(Rp 6.170.648.371,61)	(Rp 9.847.188.223,39)

Arus masuk kas dari transaksi non anggaran Tahun 2011 dan Tahun 2010 sebesar Rp.94.005.721.160,00 dan Rp. 259.704.128.133,61 terdiri atas penerimaan :

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
▪ Iuran Wajib Pegawai	Rp 63.401.941.606,00	Rp 57.368.220.800,00
▪ Potongan PPh Pasal 21	Rp 0,00	Rp 14.515.766.663,00
▪ Potongan Taperum	Rp 1.740.330.000,00	Rp 1.773.920.000,00
▪ Potongan ASKES	Rp 12.688.395.639,00	Rp 11.481.079.266,00
▪ Lain-lain PFK	Rp 4.859.560.100,00	Rp 168.325.154.121,61

▪ Penerimaan sisa UP tahun yang lalu	Rp	11.315.493.815,00	Rp	6.239.987.283,00
Jumlah Arus Masuk Kas PFK	Rp	94.005.721.160,00	Rp	259.704.128.133,61

Arus Keluar Kas dari transaksi non anggaran sebesar Tahun 2011 dan Tahun 2010 sebesar Rp.100.176.369.531,61 dan Rp. 269.551.316.357,00 terdiri dari pembayaran untuk :

		31 Desember 2011		31 Desember 2010
▪ Iuran Wajib Pegawai	Rp	63.397.223.683,00	Rp	57.371.698.616,00
▪ Potongan PPh Pasal 21	Rp	0,00	Rp	14.516.835.790,00
▪ Potongan Taperum	Rp	1.740.162.000,00	Rp	1.773.700.000,00
▪ Potongan ASKES	Rp	12.687.661.335,00	Rp	11.481.946.356,00
▪ Lain-Lain PFK	Rp	22.345.249.846,61	Rp	171.936.268.228,00
▪ Pengeluaran sisa UP tahun berjalan	Rp	6.072.667,00	Rp	12.470.867.367,00
Jumlah Arus Keluar Kas PFK	Rp	100.176.369.531,61	Rp	269.551.316.357,00

2011

2010

5. Saldo Awal Kas Rp 536.727.104.651,97 Rp 1.159.451.042.275,90

Saldo kas per tanggal 1 Januari 2011 dan 2010 masing masing sebesar Rp.536.727.104.651,97 dan Rp. 1.159.451.042.275,90 terdiri atas :

		1 Januari 2011		1 Januari 2010
▪ Kas di Kas Daerah	Rp	536.727.104.651,97	Rp	1.153.211.054.992,90
▪ Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00	Rp	0,00
▪ Kas di BLUD Dr.M.Soewandi	Rp	0,00		
Jumlah Saldo Awal Kas	Rp	536.727.104.651,97	Rp	1.153.211.054.992,90

Secara keseluruhan saldo per tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp.551.269.966.258,81 namun yang dijadikan sebagai saldo awal untuk 1 Januari 2011 adalah sebesar Rp.549.415.584.084,89 dikarenakan saldo kas bendahara penerimaan sebesar Rp.28.289.800,00 dan saldo kas di BLUD RSUD dr.M.Soewandhie sebesar Rp.1.826.092.373,92 bukan merupakan saldo kas yang berasal dari mutasi keluar masuk kas namun berupa saldo kas yang diakui pada akhir tahun sehingga disesuaikan pada awal tahun / dijurnal balik.

31 Desember 2011

31 Desember 2010

6. Saldo Akhir Kas Rp 528.429.640.784,55 Rp 551.269.966.258,81

Saldo akhir kas per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp.528.429.640.784,55 dan Rp. 551.269.966.258,81 terdiri atas :

	31 Desember 2011		31 Desember 2010	
▪ Kas Daerah	Rp	506.259.735.245,66	Rp	536.727.104.651,97
▪ Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	300.738.179,00	Rp	12.470.867.367,00
▪ Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	125.737.773,28	Rp	28.289.800,00
▪ Kas BLU dr.M.Soewandhie	Rp	21.743.429.586,61	Rp	2.043.704.439,84
Jumlah Saldo Akhir Kas	Rp	528.429.640.784,55	Rp	551.269.966.258,81

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 sebesar Rp300.738.179,00 terdiri dari :

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
Uang Persediaan		
1.	RSUD Bhakti Dharma Husada	5.997.667,00
2.	Kec. Sambikerep	75.000,00
Jumlah 1		6.072.667,00
Utang pajak (PFK)		
1.	Dinas Pendidikan	3.170.250,00
2.	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK)	291.495.262,00
Jumlah 2		294.665.512,00
Jumlah 1 + 2		300.738.179,00

Sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp6.072.667,00 telah disetor kembali oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kas Daerah pada Tahun 2012.

Uang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp294.665.512,00 telah disetor/dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke KPPN pada Tahun 2012.

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp125.737.773,28 merupakan pendapatan Tahun 2011 yang baru dapat disetor

oleh bendahara penerimaan ke Kas Daerah pada Tahun 2012, yang terdapat pada SKPD :

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	13.615.000,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35.025.000,00
3	Dinas Perhubungan	69.698.500,00
4	RSUD Bhakti Dharma Husada	7.399.273,28
	JUMLAH	125.737.773,28

5.4. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Tidak ada rekonsiliasi, karena entitas pelaporan menerapkan basis kas atas pendapatan dan belanja

5.5. PENJELASAN LAIN - LAIN

1. Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp528.429.640.784,55 dibandingkan dengan SiLPA sebesar Rp502.999.263.251,27, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp25.312.504.952,00 dan pendapatan ditangguhkan sebesar Rp125.737.773,28, terdapat selisih sebesar sebesar Rp7.865.192,00. Selisih tersebut merupakan saldo utang PFK minus/piutang lain-lain eks PFK (kelebihan pembayaran PPh ps 21, Taperum dan ASKES Tahun 2011) yang merupakan komponen SiLPA Tahun 2011;
2. Nilai anggaran yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 merupakan APBD Murni TA 2011 karena Raperda Perubahan APBD TA 2011 tidak disahkan oleh DPRD. Realisasi belanja Tahun 2011, yang belum ada anggarannya pada APBD Murni TA 2011, dilaksanakan dengan mendasari Peraturan Walikota Surabaya. Belanja tersebut, terutama terkait pelaksanaan program-program Pemerintah Pusat, yang sumber dananya berasal dari transfer Pemerintah Pusat.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada

Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Surabaya merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah Kota Surabaya merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur, secara administratif terbagi ke dalam 31 Kecamatan dan 163 Kelurahan. Secara geografis terletak pada posisi 07.21 ' Lintang selatan dan 112.36' – 112.54' Bujur Timur yang berbatasan langsung dengan selat Madura di sebelah Utara, selat Madura di sebelah Timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan dan Kabupaten Gresik di sebelah Barat.

Luas Wilayah Kota Surabaya 33.306,30 km² dengan bentuk permukaan lahan wilayah Kota Surabaya 3 – 6 meter diatas permukaan laut (dataran rendah) kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah lidah dan gayungan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan laut.

B. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Pemerintah Kota Surabaya merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kota Surabaya juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

C. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi Pemerintah Kota Surabaya adalah Undang-undang N0. 16 Tahun 1950 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kota Surabaya.

D. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Dalam Tahun 2011 terjadi beberapa kali mutasi dan penggantian beberapa pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

E. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Pada periode Tahun Anggaran 2011 tidak terdapat penggabungan atau pemekaran entitas.

BAB VII

PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kota Surabaya selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Surabaya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya dalam penyampaian laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Surabaya telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI